

LAMPIRAN  
LAPORAN TAHUNAN KPK  
2020

**KOORDINASI  
DAN SUPERVISI  
PENINDAKAN**

**KOORDINASI DAN SUPERVISI  
PENINDAKAN**

**I. KEGIATAN PENGAWASAN (90 LAPORAN  
PENGAWASAN)**

**II. KEGIATAN PENELITIAN**

1. Kegiatan klarifikasi pengaduan masyarakat ke Kejati Jawa Barat terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang tahun 2015 dengan 3 (tiga) orang tersangka yaitu YOGIA PATRIANA ALSJAH selaku Direktur Utama, JUMALI selaku PPK, dan DIDI PRAMADI selaku pihak Penyedia Jasa.
2. Kegiatan klarifikasi pengaduan masyarakat ke Polda Jawa Barat terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Jalupang di Kabupaten Karawang senilai Rp 18.744.780.000,00 yang anggarannya bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2015.
3. Kegiatan klarifikasi pengaduan masyarakat ke Polres Ketapang terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan peningkatan Jalan Jambi - Sukaramai Kecamatan Manismata, Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2010 atas nama Tersangka DARMANSYAH, MUHAMMAD IKBAL, PAULUS UDU, AMAT JAYA, dan DENNERY.
4. Kegiatan klarifikasi pengaduan masyarakat ke Kejari Cimahi terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan APBD-P Kota Cimahi Tahun Anggaran 2006 dan APBD Kota Cimahi dalam Penyertaan Modal Daerah Kota Cimahi pada Perusahaan Daerah Jati Mandiri dan PT. Lingga Buana Wisesa dalam rangka pembangunan Pasar Raya Cibereum dan Pembangunan Sub Terminal atas nama Tersangka IDRIS ISMAIL dan H. ADJAN SUDJANA, SE.
5. Kegiatan klarifikasi pengaduan masyarakat ke Jampidsus Kejaksaan RI terkait tindak pidana korupsi berupa gratifikasi kepada Penyelenggaran Negara pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar dengan SPDP Nomor: B/3577/N.1/Fd.1/11/2019 tanggal 6 November 2019 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati Bali.
6. Kegiatan klarifikasi pengaduan masyarakat ke Jampidsus Kejaksaan RI terkait tindak pidana korupsi Pengadaan Barang di Pemerintah Kota Surabaya menggunakan Dana Hibah Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) Tahun 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.
7. Klarifikasi pengaduan masyarakat ke Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dugaan TPK penyimpangan pada pembangunan Taman Kota di Saumlaki Kab. MTB T.A. 2017.
8. Klarifikasi pengaduan masyarakat ke

Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dugaan TPK penyimpangan dalam pengelolaan dana subsidi pada BUMD PT. Kalwedo di Maluku Barat Daya Tahun 2013 – 2017.

9. Klarifikasi pengaduan masyarakat ke Kepolisian Daerah Maluku terkait dugaan TPK penyimpangan penggunaan anggaran dalam pembayaran lahan TPA Kota Ambon T.A. 2006.
10. Koordinasi terkait data informasi 28 (dua puluh delapan) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Polda Sumatera Utara dan Jajaran pada periode sampai dengan tahun 2019.  
Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/224/KOR.01.00/20-25/02/2020 tanggal 6 Februari 2020).
11. Koordinasi terkait data informasi 72 (tujuh puluh dua) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Kejati Sumatera Utara dan Jajaran pada periode sampai dengan tahun 2019.  
Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/232/KOR.01.00/20-25/02/2020 tanggal 10 Februari 2020).
12. Dugaan TPK pada proyek pembangunan gedung VIP RSUD H. Abdul Manan Simatupang di Kab. Asahan TA 2013.  
Kegiatan: Rapat koordinasi antara Kasubdit III Tipikor Polda Sumatera Utara dan Satgas Koordinasi dan Supervisi bidang Penindakan I Unit Koordinasi Wilayah KPK terkait rencana pelimpahan kasus tersebut.
13. Kegiatan klarifikasi pengaduan masyarakat terkait penanganan perkara TPK dalam pengadaan barang dan jasa pada Badan Pengawasan Nuklir (Bapeten) Tahun Anggaran 2013 kepada Polda Metro Jaya.
14. Kegiatan klarifikasi perkembangan penanganan perkara terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi – Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 dengan 5 (lima) orang tersangka yaitu Kadis PUPR, PPK, Sekdin, dan 2 (dua) orang Sub-kontraktor yang sedang dilaksanakan penyidikan oleh Kejati Jawa Barat.
15. Kegiatan klarifikasi pengaduan masyarakat ke Jampidsus Kejaksaan RI terkait perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian Kredit Modal Kerja pada Bank NTT Cabang Surabaya Tahun 2018 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi NTT
16. Koordinasi terkait data informasi 8 (delapan) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Polda Maluku dan Jajaran sampai dengan

31 Januari 2020.

- Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/189/KOR.03/20-25/01/2020 tanggal 31 Januari 2020).
17. Koordinasi terkait data informasi 29 (dua puluh sembilan) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Kejati Maluku dan Jajaran sampai dengan 31 Januari 2020.  
Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/190/KOR.03/20-25/01/2020 tanggal 31 Januari 2020).
  18. Koordinasi terkait data informasi 5 (lima) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Polda Maluku Utara dan Jajaran sampai dengan 31 Januari 2020.  
Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/195/KOR.03/20-25/02/2020 tanggal 03 Februari 2020).
  19. Koordinasi terkait data informasi 12 (dua belas) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Kejati Maluku Utara dan Jajaran sampai dengan 31 Januari 2020.  
Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/196/KOR.03/20-25/01/2020 tanggal 03 Februari 2020).
  20. Klarifikasi perkembangan penanganan perkara dugaan Polda Maluku Utara terkait dugaan TPK pemotongan dana desa di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara.
  21. Klarifikasi pengaduan masyarakat ke Kejati Maluku Utara terkait dugaan TPK pembebasan lahan waterboom Kota Ternate, Maluku Utara.
  22. Koordinasi terkait data informasi 24 (dua puluh empat) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Polda Sumatera Barat dan Jajaran pada periode sampai dengan tahun 2019.  
Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/444/KOR.01.00/20-25/02/2020 tanggal 28 Februari 2020).
  23. Koordinasi terkait data informasi 22 (dua puluh dua) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Kejati Sumatera Barat dan Jajaran pada periode sampai dengan tahun 2019.  
Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/414/KOR.01.00/20-25/02/2020 tanggal 25 Februari 2020).

24. Dugaan TPK penetapan besarnya honorarium penyusunan rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan gubernur dan tim evaluasi raperda APBD kabupaten/kota pada sekretaris daerah provinsi Lampung tahun anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Lampung  
Kegiatan: Koordinasi permintaan perkembangan penanganan perkara.
25. Kegiatan klarifikasi pengaduan masyarakat ke Kejati Kalimantan Barat terkait dugaan TPK mark-up pengadaan lahan parkir Krisdasarana yang menggunakan dana Rp 15 Milyar oleh Sumastro selaku Mantan Kadishubinfo yang saat ini menjabat sebagai Sekda Kota Singkawang.
26. Kegiatan klarifikasi pengaduan masyarakat ke Kejati Kalimantan Barat terkait dugaan TPK dana aspirasi dewan/pokir.
27. Kegiatan klarifikasi pengaduan masyarakat ke Polda Kalimantan Barat terkait dugaan TPK dana hibah bansos yang melibatkan 45 orang anggota DPRD periode 2015-2019 dengan anggaran 80 Milyar di Kabupaten Sambas TA 2018.
28. Kegiatan klarifikasi pengaduan masyarakat ke Polda Kalimantan Barat terkait TPK pembangunan gerbang kota pusaka di badan Sungai Singkawang oleh Kementerian PUPR, Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kalbar, Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Pemukiman Prov. Kalbar yang dilaksanakan tanpa sosialisasi, tanpa pemberitahuan dan tanpa plang proyek.
29. Kegiatan klarifikasi perkembangan penanganan perkara dugaan TPK pada kegiatan pembayaran rekening listrik, rekening air dan telepon yang dibayarkan oleh RSUD Kota Cilegon Tahun 2011, 2012 sampai Oktober 2013 atas nama Tersangka HENDRAWATI, SE Bin HILAL yang sedang dilaksanakan penyidikan oleh Polres Cilegon.
30. Koordinasi terkait data informasi 35 (tiga puluh lima) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Kejati Jateng dan Jajaran tahun 2016 – tahun 2019  
Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan koordinasi lebih lanjut (R/469/KOR.03/20-25/03/2020 tanggal 03 Maret 2020)
31. Koordinasi terkait data informasi 28 (dua puluh delapan) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Kejati Jateng dan Jajaran tahun 2017 – tahun 2019  
Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan koordinasi lebih lanjut (R/470/KOR.03/20-25/03/2020 tanggal 03 Maret 2020)
32. Kegiatan klarifikasi pengaduan masyarakat

- terhadap TPK Penyimpangan dalam Kegiatan Pemutakhiran Data Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2008 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Klaten.
33. Koordinasi terkait data informasi 76 (tujuh puluh enam) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Polda Jawa Timur dan Jajaran Tahun 2011 – Tahun 2019.  
Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/455/KOR.03/20-25/03/2020 tanggal 2 Maret).
34. Koordinasi terkait data informasi 71 (tujuh puluh satu) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Kejati Jawa Timur dan Jajaran Tahun 2011 – Tahun 2019.  
Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/457/KOR.03/20-25/03/2020 tanggal 2 Maret).
35. Kegiatan rekonsiliasi data SPDP dan perkembangan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi yang ditangani Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan jajaran.
36. Kegiatan rekonsiliasi data SPDP dan perkembangan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan jajaran.
37. Kegiatan klarifikasi terkait perkembangan penghitungan kerugian keuangan negara dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
38. Kegiatan klarifikasi pengaduan masyarakat ke Polres Parepare terkait dugaan TPK yang bersumber dari OTT di Lingkup Pemkot Parepare yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli.
39. Kegiatan klarifikasi pengaduan masyarakat ke Polda Papua terkait dugaan TPK penyuapan pihak KPUD Waropen pada tahun 2016 terkait Pilkada Kab. Waropen Tahun 2015.
40. Koordinasi terkait data informasi 9 (sembilan) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Polda Sulawesi Utara dan Jajaran sampai dengan 1 Februari 2020.  
Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/461/KOR.03/20-25/03/2020 tanggal 02 Maret 2020).
41. Koordinasi terkait data informasi 30 (tiga puluh) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Kejati Sulawesi Utara dan Jajaran sampai dengan 1 Februari 2020.  
Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/413/KOR.03/20-25/02/2020 tanggal 25 Februari 2020).
42. Kegiatan klarifikasi pengaduan masyarakat ke Kejaksaan Negeri Karimun terkait dugaan tindak pidana korupsi pada proses pembebasan tanah untuk kepentingan Penggaru desa Pangke Kecamatan Meral Kabupaten Karimun dengan nilai pengadaan sebesar Rp 8.301.992.000,00.
43. Kegiatan klarifikasi pengaduan masyarakat ke Kejaksaan Tinggi Bali terkait perkara tindak pidana korupsi Penyalahgunaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) oleh Perbekel/Kepala Desa Banjar sebesar 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang telah dicairkan.
44. Kegiatan klarifikasi pengaduan masyarakat ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan aset Pemerintah Kota Surabaya oleh Yayasan Kas Pembangunan dan PT YEKAPE Tahun 2017 sd 2019.
45. Koordinasi terkait data informasi 9 (sembilan) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Polda Sulawesi Utara dan Jajaran sampai dengan 1 Februari 2020.  
Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/461/KOR.03/20-25/03/2020 tanggal 02 Maret 2020).
46. Koordinasi terkait data informasi 30 (tiga puluh) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Kejati Sulawesi Utara dan Jajaran sampai dengan 1 Februari 2020.  
Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/413/KOR.03/20-25/02/2020 tanggal 25 Februari 2020).
47. Koordinasi terkait data informasi 38 (tiga puluh delapan) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Kejati Riau dan Jajaran periode tahun 2017 s.d 2020.  
Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/921/KOR.03/20-25/05/2020 tanggal 26 Mei 2020).
48. Koordinasi terkait data informasi 45 (empat puluh lima) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Polda Jawa Barat dan jajaran periode tahun 2014 s.d 2020.  
Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/924/KOR.03/20-25/05/2020 tanggal 26 Mei 2020).
49. Koordinasi terkait data informasi 57 (lima puluh tujuh) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Kejati Jawa Barat dan jajaran periode tahun 2017 s.d 2020.
- Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/925/KOR.03/20-25/05/2020 tanggal 26 Mei 2020).
50. Koordinasi terkait data informasi 41 (empat puluh satu) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Polda Bengkulu dan jajaran periode tahun 2015 s.d 2020.  
Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/922/KOR.03/20-25/05/2020 tanggal 26 Mei 2020).
51. Koordinasi terkait data informasi 59 (lima puluh sembilan) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Kejati Bengkulu dan jajaran periode tahun 2015 s.d 2020.  
Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/923/KOR.03/20-25/05/2020 tanggal 26 Mei 2020).
52. Kegiatan koordinasi perkembangan penanganan perkara dugaan TPK pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir TA 2012 atas nama tersangka HENDRAWAN, SE, MM dan H. JAMARIS, ST ke Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir (R/915/KOR.02.02/20-25/5/2020 tanggal 26 Mei 2020).
53. Klarifikasi Pengaduan Masyarakat atas dugaan TPK proyek buku ajar Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten T.A. 2004 yang pengerjaannya dilakukan oleh Kepolisian Resor Klaten, dengan tersangka ke-1 Drs. Sidik Purnomo yang sudah menjalani hukuman dan masih menyisakan 3 tersangka lainnya yang patut diduga turut serta dalam mewujudkan delik.
54. Klarifikasi Pengaduan Masyarakat atas dugaan TPK proyek dana hibah, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana di Kabupaten Klaten T.A. 2013 sebesar Rp. 47.714.138.000,- pada BPBD Kabupaten Klaten diduga mark up proyek yang pengerjaannya dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Klaten.
55. Klarifikasi Pengaduan Masyarakat atas dugaan TPK atas aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berupa tanah seluas kurang lebih 36.058m<sup>2</sup> (tiga puluh enam ribu lima puluh delapan meter persegi) oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak/tanpa izin dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyebabkan kerugian negara yang penanganannya dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.
56. Koordinasi terkait data informasi 38 (dua puluh delapan) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Kejati Gorontalo dan Jajaran pada periode sampai dengan bulan Maret tahun 2020.  
Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/917/KOR.03/20-25/05/2020 tanggal 26 Mei 2020).
57. Koordinasi terkait perkembangan penanganan 5 (lima) perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Polda Sumatera Utara dan Jajaran.  
Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan tindak lanjut hasil supervisi (R/1109/KOR.02.02/20-25/06/2020 tanggal 18 Juni 2020).
58. Koordinasi terkait perkembangan penanganan 4 (empat) perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Kejati Sumatera Utara dan Jajaran.  
Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan tindak lanjut hasil supervisi (R/1110/KOR.02.02/20-25/06/2020 tanggal 18 Juni 2020).
59. Koordinasi terkait perkembangan penanganan 1 (satu) perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Polda Maluku Utara dan Jajaran.  
Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan tindak lanjut hasil supervisi (R/1111/KOR.02.02/20-25/06/2020 tanggal 18 Juni 2020).
60. Koordinasi terkait data informasi 9 (sembilan) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Kejaksaan Tinggi Banten dan Jajaran sampai dengan Mei 2020.  
Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/982/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 02 Juni 2020).
61. Koordinasi terkait data informasi 23 (dua puluh tiga) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Kepolisian Daerah Banten dan Jajaran sampai dengan Mei 2020.  
Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/1017/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 08 Juni 2020).
62. Koordinasi terkait data informasi 57 (lima puluh tujuh) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dan Jajaran sampai dengan Mei 2020.  
Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/978/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 02 Juni 2020).
63. Koordinasi terkait data informasi 25 (dua puluh lima) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan Jajaran sampai dengan Mei 2020.  
Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/917/KOR.03/20-25/05/2020 tanggal 26 Mei 2020).

- penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/976/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 02 Juni 2020).
64. Koordinasi terkait data informasi 30 (tiga puluh) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Polda Metro Jaya dan jajaran pada periode 1 Januari 2013 – 30 April 2020.  
Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/892/KOR.03/20-25/05/2020 tanggal 15 Mei 2020).
65. Koordinasi terkait data informasi 33 (tiga puluh tiga) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Kejati DKI Jakarta dan jajaran pada periode 1 Januari 2016 – 30 April 2020.  
Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/891/KOR.03/20-25/05/2020 tanggal 15 Mei 2020).
66. Koordinasi terkait data informasi 21 (dua puluh satu) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Polda NTB dan jajaran pada periode 1 Januari 2017 – 30 April 2020.  
Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/889/KOR.03/20-25/05/2020 tanggal 15 Mei 2020).
67. Koordinasi terkait data informasi 23 (dua puluh tiga) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Kejati NTB dan jajaran pada periode 1 Januari 2017 – 30 April 2020.  
Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/890/KOR.03/20-25/05/2020 tanggal 15 Mei 2020).
68. Koordinasi terkait data informasi 25 (dua puluh lima) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Polda Aceh dan jajaran pada periode 1 Januari 2013 – 30 April 2020.  
Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/887/KOR.03/20-25/05/2020 tanggal 15 Mei 2020).
69. Koordinasi terkait data informasi 23 (dua puluh tiga) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Kejati Aceh dan jajaran pada periode 1 Januari 2016 – 30 April 2020.  
Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/888/KOR.03/20-25/05/2020 tanggal 15 Mei 2020).
70. Kegiatan klarifikasi pengaduan masyarakat ke Polda Lampung terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2017-2018, yaitu proyek pembangunan Gedung Bedah Sentral RSUD Kabupaten Pesawaran TA 2017 dengan

- pagu anggaran RP2.660.900.000,00 dan pengadaan Gedung Rawat Inap lantai II dan III RSUD Kabupaten Pesawaran TA 2018 dengan pagu anggaran Rp33.812.145.000,00 yang bersumber dari DAK.
71. Kegiatan klarifikasi pengaduan masyarakat ke Kejati Lampung terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penetapan honorarium penyusunan RAPERDA, RAPERGUB, dan tim evaluasi RAPERDA APBD Kab/Kota oleh Sekretariat Daerah Provinsi Lampung TA 2015.
72. Kegiatan update SPDP dan perkembangan penanganan perkara pada Kepolisian Daerah Jambi dan jajaran.  
Kegiatan: Rekonsiliasi data SPDP perkembangan penanganan perkara TPK melalui surat kepada Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: R/1148/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 25 Juni 2020.
73. Kegiatan update SPDP dan perkembangan penanganan perkara pada Kejaksaan Tinggi Jambi dan jajaran.  
Kegiatan: Rekonsiliasi data SPDP perkembangan penanganan perkara TPK melalui surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor: R/1149/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 25 Juni 2020.
74. Koordinasi perkembangan penanganan perkara TPK yang ditangani oleh Polda Kalimantan Selatan beserta jajaran.  
Kegiatan : Rekonsiliasi dan pemutakhiran data penanganan perkara TPK yang ditangani oleh Polda Kalimantan Selatan beserta jajaran
75. Koordinasi perkembangan penanganan perkara TPK yang ditangani oleh Kejati Kalimantan Selatan beserta jajaran.  
Kegiatan : Rekonsiliasi dan pemutakhiran data penanganan perkara TPK yang ditangani oleh Kejati Kalimantan Selatan beserta jajaran
76. Koordinasi perkembangan perhitungan kerugian keuangan negara terkait penanganan perkara TPK yang sedang dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan  
Kegiatan : Rekonsiliasi dan pemutakhiran data perhitungan kerugian keuangan negara terkait penanganan perkara TPK yang sedang dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
77. Koordinasi perkembangan perhitungan kerugian keuangan negara terkait penanganan perkara TPK yang sedang dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Kegiatan : Rekonsiliasi dan pemutakhiran data perhitungan kerugian keuangan negara terkait penanganan perkara TPK yang sedang dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
78. Koordinasi perkembangan perhitungan kerugian keuangan negara terkait penanganan perkara TPK yang sedang dilaksanakan oleh BPK RI atas permintaan Aparat Penegak Hukum di wilayah Kalimantan

- Selatan, Sulawesi Selatan, D.I. Yogyakarta, dan Kepulauan Bangka Belitung.
- Kegiatan : Rekonsiliasi dan pemutakhiran data perhitungan kerugian keuangan negara terkait penanganan perkara TPK yang sedang dilaksanakan oleh BPK RI atas permintaan Aparat Penegak Hukum di wilayah Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, D.I. Yogyakarta, dan Kepulauan Bangka Belitung.
79. Dugaan tindak pidana korupsi dalam proses penguasaan lahan masyarakat di Desa Sebamban Kabupaten Tanah Bumbu oleh perusahaan Hutan Tanaman Industri dan Perusahaan Tambang Batubara.  
Kegiatan : Penelitian terkait rencana pelimpahan terkait pengaduan masyarakat tersebut.
80. Dugaantindakpidanakorupsi penyalahgunaan anggaran kunjungan kerja DPRD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 – 2016.  
Kegiatan : Klarifikasi pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran kunjungan kerja DPRD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 – 2016 yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kab Banjar.
81. Pengaduan masyarakat perihal dugaan TPK terkait Pengelolaan Dana Pensiun dalam Pengelolaan Dana Pensiun milik Karyawan/eks Karayawan PTPN II pada DAPENBUN Tahun 2013 – 2015.  
Kegiatan: Telah dilaksanakan koordinasi dengan tim dumas terkait pengaduan masyarakat tersebut. Hasil diskusi telah dilaporkan melalui ND Korwil Penindakan Nomor: 66/KOR.01.12/25/06/2020 tanggal 16 Juni 2020.
82. Kegiatan klarifikasi pengaduan masyarakat ke Jampidsus Kejaksaan RI terkait TPK terkait Pengelolaan Dana Pensiun dalam Pengelolaan Dana Pensiun milik Karyawan/eks Karayawan PTPN II pada DAPENBUN Tahun 2013 – 2015 melalui Surat Nomor: R/1158/KOR.02.02/20-25/06/2020 tanggal 26 Juni 2020.
83. Kegiatan koordinasi perkembangan penanganan perkara TPK yang ditangani oleh Kejati Papua dan Jajaran  
Kegiatan: Koordinasi perkembangan penanganan perkara TPK berdasarkan Surat kepada Kajati Papua Nomor: R/1144/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 25 Juni 2020.
84. Kegiatan koordinasi perkembangan penanganan perkara TPK yang ditangani oleh Polda Papua dan Jajaran  
Kegiatan: Koordinasi perkembangan penanganan perkara TPK berdasarkan Surat kepada Kapolda Papua Nomor: R/1146/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 25 Juni 2020.
85. Koordinasi terkait data informasi 17 (tujuh belas) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Polda Gorontalo dan Jajaran pada periode sampai dengan bulan Maret tahun 2020.

- Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/918/KOR.03/20-25/05/2020 tanggal 26 Mei 2020).
86. Koordinasi terkait data informasi 8 (delapan) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Polda Kalimantan Utara dan Jajaran pada periode sampai dengan tahun 2020.  
Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/919/KOR.03/20-25/05/2020 tanggal 26 Mei 2020).
87. Koordinasi terkait data informasi 10 (sepuluh) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK di wilayah Kalimantan Utara yang dilaksanakan penyidikannya oleh Kejati Kalimantan Timur dan Jajaran pada periode sampai dengan tahun 2020.  
Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/920/KOR.03/20-25/05/2020 tanggal 26 Mei 2020).
88. Koordinasi terkait data informasi 24 (dua puluh empat) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan Jajaran.  
Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/1121/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 22 Juni 2020).
89. Koordinasi terkait data informasi 247 (dua puluh tujuh) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dan Jajaran.  
Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/1120/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 22 Juni 2020).
90. Koordinasi terkait data informasi 36 (tiga puluh enam) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Jajaran.  
Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/1169/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 26 Juni 2020).
91. Koordinasi terkait data informasi 33 (tiga puluh tiga) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan Jajaran.  
Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/1171/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 26 Juni 2020).
92. Koordinasi terkait perkembangan perkara dugaan TPK penyelewengan Dana Desa (DD) di Desa Sebudi Jaya, Kab. Aceh Tenggara,

- Tahun Anggaran 2019 yang disidik oleh Kejari Aceh Tenggara.
- Kegiatan: Koordinasi perkembangan penanganan perkara berdasarkan surat ke Kejati Aceh Nomor: R/1472/KOR.06/20-25/07/2020 tanggal 27 Juli 2020.
93. Koordinasi terkait data informasi 15 (lima belas) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Polda Kepulauan Riau dan Jajaran sampai dengan 18 Juni 2020.
- Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/1150/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 25 Juni 2020).
94. Koordinasi terkait data informasi 19 (sembilan belas) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Kejati Kepulauan Riau dan Jajaran sampai dengan 18 Juni 2020.
- Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/1151/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 25 Juni 2020).
95. Koordinasi terkait data informasi 56 (lima puluh enam) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan Jajaran.
- Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/1219/KOR.03/20-25/07/2019 tanggal 3 Juli 2020).
96. Koordinasi terkait data informasi 34 (tiga puluh empat) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.
- Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/1222/KOR.03/20-25/07/2020 tanggal 3 Juli 2020).
97. Kegiatan klarifikasi pengaduan masyarakat ke Kejari Jember terkait perkara dugaan TPK pekerjaan konstruksi Pasar Manggis dan Pasar lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember atas nama Terdakwa EDI SHANDY, ANAS MAARUF, dan FARIZ NURHIDAYAT.
98. Kegiatan update SPDP dan perkembangan penanganan perkara pada Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dan jajaran.
- Kegiatan: Rekonsiliasi data SPDP perkembangan penanganan perkara TPK melalui surat kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: R/1259/KOR.03/20-25/07/2020 tanggal 06 Juli 2020.
99. Kegiatan update SPDP dan perkembangan penanganan perkara pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dan jajaran.
- Kegiatan: Rekonsiliasi data SPDP perkembangan penanganan perkara TPK melalui surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: R/1258/KOR.03/20-25/07/2020 tanggal 06 Juli 2020.
100. Klarifikasi Pengaduan Masyarakat atas dugaan TPK Penyimpangan dalam Pengadaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) di Kabupaten Pematang Siantar Tahun Anggaran 2018 melalui surat Deputi Penindakan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: R/1498/KOR.06/20-25/07/2020 tanggal 28 Juli 2020.
101. Koordinasi perkembangan penanganan perkara TPK yang ditangani oleh Polda Kepulauan Bangka Belitung beserta jajaran.
- Kegiatan: Rekonsiliasi dan pemutakhiran data penanganan perkara TPK yang ditangani oleh Polda Kepulauan Bangka Belitung beserta jajaran
102. Koordinasi perkembangan penanganan perkara TPK yang ditangani oleh Kejati Kepulauan Bangka Belitung beserta jajaran.
- Kegiatan: Rekonsiliasi dan pemutakhiran data penanganan perkara TPK yang ditangani oleh Kejati Kepulauan Bangka Belitung beserta jajaran
103. Koordinasi perkembangan penanganan perkara TPK yang ditangani oleh Polda D.I. Yogyakarta beserta jajaran.
- Kegiatan: Rekonsiliasi dan pemutakhiran data penanganan perkara TPK yang ditangani oleh Polda D.I. Yogyakarta beserta jajaran
104. Koordinasi perkembangan penanganan perkara TPK yang ditangani oleh Kejati D.I. Yogyakarta beserta jajaran.
- Kegiatan: Rekonsiliasi dan pemutakhiran data penanganan perkara TPK yang ditangani oleh Kejati D.I. Yogyakarta beserta jajaran
105. Koordinasi perkembangan perhitungan kerugian keuangan negara penanganan perkara TPK yang sedang dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta
- Kegiatan: Rekonsiliasi dan pemutakhiran data perhitungan kerugian keuangan negara terkait penanganan perkara TPK yang sedang dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.
106. Dugaan tindak pidana korupsi dana APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2016 dan 2017 yang dialokasikan untuk kegiatan belanja langsung pakaian olahraga untuk pegawai lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
- Kegiatan: Klarifikasi pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dana APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2016 dan 2017 yang dialokasikan untuk kegiatan belanja langsung pakaian olahraga untuk pegawai lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang sedang ditangani oleh Polda Sulawesi Selatan.
107. Dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan air mancur kolam Kota Makale tahun anggaran 2017.
- Kegiatan: Klarifikasi pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan air mancur kolam Kota Makale tahun anggaran 2017 yang sedang ditangani oleh Kejati Sulawesi Selatan.
108. Dugaan tindak pidana pembangunan dan pengoperasian Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAM) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tahun anggaran 2016.
- Kegiatan: Klarifikasi pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dan pengoperasian Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAM) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tahun anggaran 2016 yang sedang ditangani oleh Kejari Makale.
109. Pengaduan masyarakat perihal dugaan TPK berupa Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pertamina Energy Tower (PET) oleh Pertamina (Persero) tahun 2013-2014
- Kegiatan: Telah dilaksanakan koordinasi dengan tim dumas terkait pengaduan masyarakat tersebut. Hasil diskusi telah dilaporkan melalui ND Korwil Penindakan Nomor: 84/KOR.01.12/25/07/2020 tanggal 15 Juli 2020.
110. Pengaduan masyarakat perihal dugaan TPK berupa Penerimaan Gratifikasi oleh Direktur Utama PT. Pembangunan Jawa Bali an. IAF
- Kegiatan: Telah dilaksanakan koordinasi dengan tim dumas terkait pengaduan masyarakat tersebut. Hasil diskusi telah dilaporkan melalui ND Korwil Penindakan Nomor: 85/KOR.01.12/25/07/2020 tanggal 15 Juli 2020.
111. Kegiatan klarifikasi pengaduan masyarakat ke Jampidsus Kejaksaan RI terkait TPK terkait Pengelolaan Dana Pensiun dalam Pengelolaan Dana Pensiun milik Karyawan/eks Karyawan PTPN II pada DAPENBUN Tahun 2013 – 2015 melalui Surat Nomor: R/1466/KOR.02.02/20-25/07/2020 tanggal 27 Juli 2020.
112. Kegiatan klarifikasi pengaduan masyarakat ke Jamintel Kejaksaan RI terkait TPK terkait berupa Penyalahgunaan Dana Pembangunan SD dan SMP di wilayah provinsi DKI Jakarta pada tahun 2007-2008 melalui Surat Nomor: R/1467/KOR.02.02/20-25/07/2020 tanggal 27 Juli 2020.
113. Koordinasi terkait data informasi 8 (delapan) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Polda Kalimantan Utara dan Jajaran pada periode sampai dengan tahun 2020.
- Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/1469/KOR.03.00/20-25/07/2020 tanggal 27 Juli 2020).
114. Koordinasi terkait data informasi 10 (sepuluh) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK di wilayah Kalimantan Utara yang dilaksanakan penyidikannya oleh Kejati Kalimantan Timur dan Jajaran pada periode sampai dengan tahun 2020.
- Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/1468/KOR.03.00/20-25/07/2020 tanggal 27 Juli 2020).
115. Koordinasi terkait data informasi 16 (enam belas) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Polda Lampung dan Jajaran sampai dengan 30 Juni 2020.
- Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/1451/KOR.03/20-25/07/2020 tanggal 24 Juli 2020).
116. Koordinasi terkait data informasi 15 (lima belas) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Kejati Lampung dan Jajaran sampai dengan 18 Juni 2020.
- Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/1450/KOR.03/20-25/07/2020 tanggal 24 Juli 2020).
117. Klarifikasi dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran dana hibah di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2018 kepada organisasi kemasyarakatan sebesar Rp 99.332.300.000,00 kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya melalui surat Deputi Bidang Penindakan KPK Nomor R/1671/KOR.06/20-25/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020.
118. Koordinasi terkait data informasi 23 (dua puluh tiga) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Kepolisian Daerah Papua Barat dan Jajaran.
- Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/1441/KOR.03/20-25/07/2020 tanggal 23 Juli 2020).
119. Koordinasi terkait data informasi 14 (empat belas) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Kejaksaan Tinggi Papua Barat.
- Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/1487/KOR.03/20-25/07/2020 tanggal 27 Juli 2020).
120. Kegiatan klarifikasi informasi perkembangan perkara terkait TPK berupa Penerimaan Hadiah atau Janji atas nama tersangka Pinangki Sinar Malasari melalui Surat Nomor: R/1692/KOR.02.02/20-25/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020.
121. Kegiatan klarifikasi pengaduan masyarakat terkait TPK Pembangunan Gedung Labor Olahraga Universitas Negeri Padang Tahun 2019 melalui Surat Nomor: R/1694/KOR.02.02/20-25/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020.

122. Kegiatan klarifikasi informasi perkembangan perkara terkait TPK yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau pihak lain yang mewakili di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2019-2020 melalui Surat Nomor: R/1748/KOR.02.02/20-25/08/2020 tanggal 27 Agustus 2020.
123. Kegiatan klarifikasi pengaduan masyarakat terkait TPK Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Gedung Pertamina Energy Tower (PET) Tahun 2013-2014 melalui Surat Nomor: R/1695/KOR.02.02/20-25/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020.
124. Klarifikasi pengaduan masyarakat ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pekerjaan Pembangunan Penunjang Diagnostic dan Ruang Rawat Inap (Radiologi, CT. Scan, laboratorium, Instalasi Farmasi) dan lanjutan pembangunan gedung IGD, Kamar Bedah, dan ruang rawat inap pada RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2018.
125. Klarifikasi pengaduan masyarakat ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pekerjaan Pembangunan Penunjang Diagnostic dan Ruang Rawat Inap (Radiologi, CT. Scan, laboratorium, Instalasi Farmasi) dan lanjutan pembangunan gedung IGD, Kamar Bedah, dan ruang rawat inap pada RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2018.
126. Kegiatan klarifikasi pengaduan masyarakat ke Kejati Kepulauan Riau terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Disdik Kepri) terkait pengadaan laptop sebanyak 2.400 unit dengan alokasi anggaran APBD Kepri TA 2019 yang diduga ada keterlibatan anggota DPRD Provinsi Kepri.
127. Kegiatan klarifikasi pengaduan masyarakat ke Kejati Kepulauan Riau terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait pengurusan izin pertambangan di PTSP Provinsi Kepri, dengan Tersangka AMJON (Kepala Dinas ESDM) dan TAUFIK AZMAN (Kepala PTSP).
128. Klarifikasi dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan penggantian jembatan air TB Terunjam B. Tahun Anggaran 2019 pada Kabupaten Bengkulu Tengah melalui surat nomor R-1758/KOR.06/20-25/09/2020 tanggal 3 September 2020 kepada Kajari Bengkulu Tengah Hal Klarifikasi Perkembangan Penanganan Perkara TPK.
129. Koordinasi terkait data 4 (empat) SPDP dan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan jajaran periode 2019 s.d 2020.  
Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R-1759/KOR.03/20-25/09/2020 tanggal 3 September 2020).
130. Dugaan TPK pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Kepulauan Bangka Belitung.  
Kegiatan: permintaan perkembangan penyidikan perkara dugaan TPK pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011.
131. Koordinasi terkait perkembangan perkara dugaan TPK penyimpangan proyek pemecah ombak/penimbunan Pantai di Desa Likupang pada BPBD Kabupaten Minahasa Utara oleh Kejati Sulawesi Utara.  
Kegiatan: Koordinasi perkembangan penanganan perkara berdasarkan surat ke Kejati Sulut Nomor: R/1847/KOR.02.02/20-25/09/2020 tanggal 22 September 2020.
132. Koordinasi terkait perkembangan perkara dugaan TPK penyimpangan pengelolaan dana bantuan banjir bandang dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kota Manado Tahun 2014 oleh Kejati Sulawesi Utara.  
Kegiatan: Koordinasi perkembangan penanganan perkara berdasarkan surat ke Kejati Sulut Nomor: R/1991/KOR.06/20-25/10/2020 tanggal 08 Oktober 2020.
133. Kegiatan klarifikasi pengaduan masyarakat ke Polda Nusa Tenggara Timur terkait dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan keuangan negara dalam Program Revolusi Pertanian Malaka/Belanja Bibit Bawang Merah dengan proyek senilai Rp10.800.000.000,00 Tahun Anggaran 2018.
134. Kegiatan klarifikasi pengaduan masyarakat ke Kejati Nusa Tenggara Timur terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan Bupati Malaka dalam penggunaan APBD TA 2016 senilai Rp5.000.000.000,00 yang seharusnya diunakan untuk pekerjaan ruas jalan lingkaran luar Kabupaten Malaka, namun digunakan untuk renovasi rumah orang tua Bupati Malaka yang kemudian dijadikan rumah jabatan Bupati.
135. Kegiatan klarifikasi pengaduan masyarakat ke Kejari Timur Tengah Utara terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan keuangan negara senilai Rp47.500.000.000,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Kabupaten Timur Tengah Utara Tahun Anggaran 2007 oleh Bupati Timur Tengah Utara.
136. Kegiatan klarifikasi pengaduan masyarakat ke Polresta Bogor terkait tindak pidana korupsi proyek pembangunan MCK Komunal dalam Program Sanimas di Wilayah Kota Bogor tahun anggaran 2013 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polresta Bogor.
137. Kegiatan klarifikasi pengaduan masyarakat ke Kejari Ponorogo terkait perkara dugaan Penyimpangan dalam Penyaluran Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) di Kabupaten Ponorogo TA 2017 senilai Rp 9 Miliar.
138. Kegiatan klarifikasi pengaduan masyarakat ke Polres Malang Kota terkait perkara dugaan TPK Pengadaan Incenerator RSUD Dr. Saiful Anwar Malang TA. 2016.
139. Kegiatan klarifikasi pengaduan masyarakat ke Bareskrim Polri terkait perkara TPK atas Pengadaan Kapal Kargo pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong Selatan yang terjadi pada tahun 2007.
140. Klarifikasi pengaduan masyarakat atas dugaan TPK penyimpangan dalam pengerjaan proyek pembangunan jalan Tungguwatu – Gorar – Lau Lau – Kobraur – Nafar (STA 21+100 -42+200) (DAK Penugasan) senilai Rp36.718.753.000,- di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan ARU T.A. 2018 yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Maluku.
141. Klarifikasi pengaduan masyarakat atas dugaan TPK pengadaan sarana penunjang peningkatan proses belajar mengajar di Sekolah Dasar sebagai perangkat ilmu komputer pembelajaran Sekolah Dasar di Kab. Kendal Tahun 2018 yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
142. Dugaan TPK pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Kepulauan Bangka Belitung.  
Kegiatan: penelitian terhadap laporan kemajuan penyidikan dugaan TPK pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka persiapan supervisi.
143. Klarifikasi pengaduan masyarakat ke Kejaksaan Tinggi Gorontalo terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Dana Bantuan APBD Bone Bolango Tahun 2011-2012.
144. Klarifikasi pengaduan masyarakat ke Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Tanah Taman Pemakaman Umum (TPU) Kabupaten OKU sumber dana APBD TA 2013 atas nama Tersangka JOHAN ANUAR.
145. Koordinasi terkait data informasi 09 (sembilan) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan Jajaran sampai dengan Oktober 2020.  
Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/2898/KOR.03/20-25/11/2020 tanggal 12 November 2020).
146. Koordinasi terkait data informasi 33 (tiga puluh tiga) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dan Jajaran sampai dengan Oktober 2020.  
Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/2307/KOR.03/20-25/11/2020 tanggal 12 November 2020).
147. Koordinasi terkait data informasi 44 (empat puluh empat) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Polda Nusa Tenggara Timur dan Jajaran sampai dengan 30 September 2020.  
Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/2072/KOR.03/20-25/10/2020 tanggal 19 Oktober 2020).
148. Koordinasi terkait data informasi 53 (lima puluh tiga) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Kejati Nusa Tenggara Timur dan Jajaran sampai dengan 30 September 2020.  
Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/2070/KOR.03/20-25/10/2020 tanggal 19 Oktober 2020).
149. Koordinasi terkait data informasi 18 (delapan belas) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Polda Kalimantan Timur dan Jajaran sampai dengan 30 September 2020.  
Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/2247/KOR.03/20-25/11/2020 tanggal 3 November 2020).
150. Koordinasi terkait data informasi 22 (dua puluh dua) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Kejati Kalimantan Timur dan Jajaran sampai dengan 30 September 2020.  
Kegiatan: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R/2249/KOR.03/20-25/11/2020 tanggal 3 November 2020).
151. Kegiatan permohonan informasi perkembangan penanganan perkara ke Polres Banyuwangi terkait perkara dugaan TPK Perbuatan melawan hukum merugikan keuangan negara berupa penggelapan penerimaan Pendapatan Asli Desa yang berasal dari pemanfaatan Tanah Kase Desa.
152. Kegiatan permohonan informasi perkembangan penanganan perkara ke Polres Banyuwangi terkait perkara dugaan TPK Perbuatan melawan hukum merugikan keuangan negara berupa pemotongan penyaluran dana PIP bagi siswa SMK di Kab. Banyuwangi.
153. Kegiatan permohonan informasi perkembangan penanganan perkara ke

- Polres Banyuwangi terkait perkara dugaan TPK Perbuatan melawan hukum merugikan keuangan negara berupa penggunaan dokumen tidak sah untuk melamar bekerja pada BLUD RSUD Blambangan Kab. Banyuwangi.
154. Kegiatan permohonan informasi perkembangan penanganan perkara ke Polresta Malang terkait perkara dugaan TPK pengadaan Incenerator RSUD Dr. Saiful Anwar Malang TA. 2016.
155. Klarifikasi pengaduan masyarakat atas dugaan TPK penyalahgunaan kewenangan pada penerbitan Izin Usaha Perkebunan Budidaya PT Maju Perkasa Sawit, PT Jamer Tulen, dan Koperasi Sanak Mandiri yang sedang ditangani oleh Polres Batanghari, melalui Surat KPK kepada Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: R/2282/KOR.06/20-25/11/2020 tanggal 09 November 2020.
156. Klarifikasi dan Koordinasi Perkembangan penanganan perkara TPK yang ditangani oleh Polda Sulawesi Tenggara dan jajaran, yang telah dilaksanakan pada Selasa, 17 November 2020 di Polda Sulawesi Tenggara.
157. Klarifikasi dan Koordinasi Perkembangan penanganan perkara TPK yang ditangani oleh Kejati Sulawesi Tenggara dan jajaran, yang telah dilaksanakan pada Rabu, 18 November 2020 di Kantor Kejati Sulawesi Tenggara.
158. Klarifikasi dan Koordinasi terkait penghitungan kerugian keuangan negara yang dimintakan bantuan oleh APH kepada BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang telah dilaksanakan pada Rabu, 18 November 2020, di kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.
159. Klarifikasi dan Koordinasi Perkembangan penanganan perkara TPK yang ditangani oleh Polda Maluku dan jajaran, yang telah dilaksanakan pada Rabu, 25 November 2020 di Polda Maluku.
160. Klarifikasi dan Koordinasi Perkembangan penanganan perkara TPK yang ditangani oleh Kejati Maluku dan jajaran, yang telah dilaksanakan pada Kamis, 26 November 2020 di Kantor Kejati Maluku.
161. Klarifikasi dan Koordinasi terkait penghitungan kerugian keuangan negara yang dimintakan bantuan oleh APH kepada BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, yang telah dilaksanakan pada Kamis, 26 November 2020, di kantor BPKP Perwakilan Provinsi Maluku.
162. Klarifikasi dan Koordinasi Perkembangan penanganan perkara TPK yang ditangani oleh Polda Jawa Tengah dan jajaran, yang telah dilaksanakan pada Senin, 30 November 2020 di Polda Jawa Tengah.
163. Koordinasi perkembangan penanganan perkara TPK yang ditangani oleh Polda Sulawesi Selatan beserta jajaran.  
Kegiatan: Rekonsiliasi dan pmutakhiran data

- penanganan perkara TPK yang ditangani oleh Polda Sulawesi Selatan beserta jajaran
164. Koordinasi perkembangan penanganan perkara TPK yang ditangani oleh Kejati Sulawesi Selatan beserta jajaran.  
Kegiatan: Rekonsiliasi dan pmutakhiran data penanganan perkara TPK yang ditangani oleh Kejati Sulawesi Selatan beserta jajaran
165. Koordinasi perkembangan penanganan perkara TPK yang ditangani oleh Polda Kalimantan Selatan beserta jajaran.  
Kegiatan: Rekonsiliasi dan pmutakhiran data penanganan perkara TPK yang ditangani oleh Polda Kalimantan Selatan beserta jajaran
166. Koordinasi perkembangan penanganan perkara TPK yang ditangani oleh Kejati Kalimantan Selatan beserta jajaran.  
Kegiatan: Rekonsiliasi dan pmutakhiran data penanganan perkara TPK yang ditangani oleh Kejati Kalimantan Selatan beserta jajaran
167. Koordinasi perkembangan perhitungan kerugian keuangan negara terkait penanganan perkara TPK yang sedang dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan  
Kegiatan: Rekonsiliasi dan pmutakhiran data perhitungan kerugian keuangan negara terkait penanganan perkara TPK yang sedang dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
168. Koordinasi perkembangan perhitungan kerugian keuangan negara terkait penanganan perkara TPK yang sedang dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan  
Kegiatan: Rekonsiliasi dan pmutakhiran data perhitungan kerugian keuangan negara terkait penanganan perkara TPK yang sedang dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
169. Koordinasi terkait data informasi 26 (dua puluh enam) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Polda Sumatera Barat dan Jajaran pada periode sampai dengan tahun 2020.  
Kegiatan: Pmutakhiran data perkembangan penanganan 26 (dua puluh enam) perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi.
170. Koordinasi terkait data informasi 7 (tujuh) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Kejati Sumatera Barat dan Jajaran pada periode sampai dengan tahun 2019.  
Kegiatan: Pmutakhiran data perkembangan penanganan 7 (tujuh) perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi.
171. Koordinasi terkait data informasi 27 (dua puluh tujuh) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Kejati Bengkulu dan Jajaran.  
Kegiatan: Pmutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R-2511/KOR.03/20-25/12/2020 tanggal 8 Desember

- 2020).
172. Koordinasi terkait data informasi 41 (empat puluh satu) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Polda Bengkulu dan Jajaran.  
Kegiatan: Pmutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R-2510/KOR.03/20-25/12/2020 tanggal 8 Desember 2020).
173. Koordinasi terkait data informasi 56 (lima puluh enam) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Kejati Jawa Barat dan Jajaran.  
Kegiatan: Pmutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R-2593/KOR.03/20-25/12/2020 tanggal 15 Desember 2020).
174. Koordinasi terkait data informasi 78 (tujuh puluh delapan) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Polda Jawa Barat dan Jajaran.  
Kegiatan: Pmutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R-2595/KOR.03/20-25/12/2020 tanggal 15 Desember 2020).
175. Klarifikasi perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jalan lingkungan RW 02, 03, 04, 05, 06, 09 dan 10 serta rehab gedung RW 06 Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilyahan (PIPPK) Pemerintah Kota Bandung TA 2015 atas nama Tersangka DIAN ROSDIANSYAH yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Besar Bandung (R-2592/KOR.06/20-25/12/2020 tanggal 15 Desember 2020).
176. Klarifikasi perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan dana bantuan keuangan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI TA 2013 melalui lembaga dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah atas nama Tersangka MAMAN SUHERMAN BIN AMINTA yang ditangani oleh Kepolisian Resor Majalengka (R-2591/KOR.06/20-25/12/2020 tanggal 15 Desember 2020).
177. Koordinasi terkait data informasi 33 (tiga puluh tiga) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Kejati Riau dan Jajaran.  
Kegiatan: Pmutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R-2499/KOR.03/20-25/12/2020 tanggal 7 Desember 2020).
178. Koordinasi terkait data informasi 24 (dua puluh empat) SPDP dan perkembangan

- penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikannya oleh Polda Riau dan Jajaran.  
Kegiatan: Pmutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan database dan bahan supervisi (R-2498/KOR.03/20-25/12/2020 tanggal 7 Desember 2020).
179. Kegiatan permohonan informasi perkembangan penanganan perkara ke Polda Papua Barat terkait perkara dugaan TPK Dugaan TPK Dana Hibah untuk Pengelola Situs Mansinam Objek Sejarah Injil di Tanah Papua Provinsi Papua Barat TA 2017 sebesar 5 Milyar.
180. Kegiatan permohonan informasi perkembangan penanganan perkara ke Polda Papua Barat terkait perkara dugaan TPK Dugaan TPK Dana Hibah untuk Pengelola Situs Mansinam Objek Sejarah Injil di Tanah Papua Provinsi Papua Barat TA 2018 sebesar 4 Milyar.
181. Kegiatan permohonan informasi perkembangan penanganan perkara ke Polres Raja Ampat terkait perkara dugaan TPK Penyalahgunaan APBD TA 2017 pada Kegiatan Pengadaan Perahu Fiber Aquatec di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Raja Ampat oleh CV RIMBA.
182. Klarifikasi dan Koordinasi Perkembangan penanganan perkara TPK yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan jajaran, yang telah dilaksanakan pada Selasa, 01 Desember 2020 di Kantor Kejati Jawa Tengah.
183. Klarifikasi dan Koordinasi terkait penghitungan kerugian keuangan negara yang dimintakan bantuan oleh APH kepada BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, yang telah dilaksanakan pada Selasa, 01 Desember 2020, di kantor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
184. Koordinasi perkembangan penanganan perkara TPK yang ditangani oleh Polda D.I. Yogyakarta.  
Kegiatan: Rapat koordinasi perkembangan penanganan perkara TPK yang ditangani oleh Polda D.I. Yogyakarta beserta jajaran
185. Koordinasi perkembangan penanganan perkara TPK yang ditangani oleh Kejati D.I. Yogyakarta beserta jajaran.  
Kegiatan: Rapat koordinasi perkembangan penanganan perkara TPK yang ditangani oleh Kejati D.I. Yogyakarta beserta jajaran
186. Koordinasi perkembangan perhitungan kerugian keuangan negara terkait penanganan perkara TPK yang sedang dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta  
Kegiatan: Rekonsiliasi dan pmutakhiran data perhitungan kerugian keuangan negara terkait penanganan perkara TPK yang sedang dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.

### III. KEGIATAN PENELAAHAN

1. Dugaan TPK dalam pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada beberapa Perusahaan Periode Tahun 2008 sd 2018 atas nama tersangka BT  
Kegiatan: Fasilitasi Penyidik Kejaksaan Agung RI dalam penitipan tahanan atas nama tersangka BT.
2. Dugaan TPK dalam pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada beberapa Perusahaan Periode Tahun 2008 sd 2018 atas nama tersangka HR  
Kegiatan: Fasilitasi Penyidik Kejaksaan Agung RI dalam penitipan tahanan atas nama tersangka HR
3. Dugaan TPK Pegawai Negeri yang menerima hadiah atau janji berkaitan dengan pengurusan permohonan restitusi pajak PT Cherng Tay Indonesia tahun 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung RI atas nama tersangka SHR, tersangka FG, dan tersangka W.  
Kegiatan: Fasilitasi Penyidik Kejaksaan Agung RI dalam pemeriksaan saksi.
4. Dugaan TPK dalam pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada beberapa Perusahaan Periode Tahun 2008 sd 2018 atas nama tersangka HR  
Kegiatan: Fasilitasi Penyidik Kejaksaan Agung RI dan Auditor BPK RI dalam permintaan keterangan terhadap tahanan atas nama tersangka HR.
5. Dugaan TPK berupa penerimaan hadiah atau janji terkait penanganan perkara penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP atas nama terdakwa RAYMOND RAWUNG dan HARRY SUWANDA yang dilakukan penuntutan di PN Jakarta Barat yang penuntutannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung RI atas nama terdakwa YSP, terdakwa YH, dan terdakwa AWS.  
Kegiatan: Fasilitasi menghadirkan terpidana AS untuk didengar keterangannya sebagai saksi di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat dalam persidangan perkara atas nama terdakwa AWS, terdakwa YH, dan terdakwa AWS.
6. Dugaan TPK berupa penerimaan hadiah atau janji terkait penanganan perkara Tindak Pidana Kepabebean atas nama terdakwa Surya Soedarma bin Lie Tjek Jauw yang penuntutannya di PN Semarang tahun 2019 yang penuntutannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung RI atas nama terdakwa K, terdakwa RE, dan terdakwa BC  
Kegiatan: Fasilitasi menghadirkan terpidana AS untuk didengar keterangannya sebagai saksi di Pengadilan Tipikor pada PN Semarang dalam persidangan perkara atas nama terdakwa K, terdakwa RE, dan terdakwa BC..
7. Dugaan TPK Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Dua – Perawas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2017 An. Tersangka MULYADI,

- EDDY SANTOSO dan HENDI MALIKI yang penyidikannya dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.
- Kegiatan : Fasilitasi Ahli Perhitungan Kerugian Negara pada tahap penyidikan bersama Penyidik Kejati Kalimantan Barat pada 14 Januari 2020.
8. Dugaan TPK Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Balai Berkuak – Mereban (Soil – Cement – HRS) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2017 An. Tersangka EDY KUSNADI, ABDUL MUJIBURRAHMAN, dan HENDI MALIKI yang penyidikannya dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.  
Kegiatan : Fasilitasi Ahli Perhitungan Kerugian Negara pada tahap penyidikan bersama Penyidik Kejati Kalimantan Barat pada 15 Januari 2020.
  9. Dugaan TPK perluasan sawah/cetak sawah Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kab. Dairi TA 2011 di Desa Simungun Kec. Siempat Nempu Hilir Kab. Dairi yang disidik oleh Kejari Dairi.  
Kegiatan: Gelar perkara bersama Aspidsus Kejati Sumatera Utara, Penyidik Kejari Dairi dan Satgas Koordinasi dan Supervisi bidang Penindakan I Unit Koordinasi Wilayah KPK di Kejati Sumatera Utara pada tanggal 18 Februari 2020.
  10. Dugaan TPK revitalisasi Asrama Haji tahun 2016 pada Kanwil Departemen Agama Provinsi Jambi  
Kegiatan: Fasilitasi pemeriksaan Ahli Konstruksi ITB dalam persidangan perkara a quo pada tanggal 10 Februari 2020.
  11. Dugaan TPK dalam akuisisi saham PT. Mendahara Agro Jaya Industri (PT. MAJI) oleh PT. Perkebunan Nusantara VI (PT. PTPN) pada tahun 2012  
Kegiatan: rapat koordinasi dengan Kepolisian Daerah Jambi dilakukan dalam rangka menindaklanjuti hasil pelimpahan Pulbaket KPK kepada Polda Jambi pada tanggal 11 Februari 2020.
  12. Dugaan TPK penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan Kredit Modal Kerja (KMK) yang mengakibatkan kerugian negara pada PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Tomang periode tahun 2017 s/d 2018 atas nama tersangka FSH yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta  
Kegiatan: gelar perkara antara Penyidik Kejati DKI Jakarta, Auditor BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, dan Satgas Penindakan Korwil 3 KPK.
  13. Dugaan TPK berupa penerimaan hadiah atau janji terkait penanganan perkara penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP atas nama terdakwa RAYMOND RAWUNG dan HARRY SUWANDA yang dilakukan penuntutan di PN Jakarta Barat yang penuntutannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung RI atas nama terdakwa YSP,

- terdakwa YH, dan terdakwa AWS.  
Kegiatan: Fasilitasi menghadirkan terdakwa AW untuk didengar keterangannya sebagai saksi di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat dalam persidangan perkara atas nama terdakwa AWS, terdakwa YH, dan terdakwa AWS
14. Dugaan TPK berupa penerimaan hadiah atau janji terkait penanganan perkara penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP atas nama terdakwa RAYMOND RAWUNG dan HARRY SUWANDA yang dilakukan penuntutan di PN Jakarta Barat yang penuntutannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung RI atas nama terdakwa YSP, terdakwa YH, dan terdakwa AWS.  
Kegiatan: Fasilitasi menghadirkan terdakwa SP untuk didengar keterangannya sebagai saksi di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat dalam persidangan perkara atas nama terdakwa AWS, terdakwa YH, dan terdakwa AWS
  15. Dugaan Tindak Pidana Korupsi di PT Asabri (Persero) terkait penyimpangan pada tata kelola investasi dan kegiatan lainnya yang dijalankan perusahaan sampai dengan tahun 2019 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya.  
Kegiatan: Fasilitasi Penyelidik Polda Metro Jaya dalam permintaan keterangan terhadap saksi.
  16. Dugaan TPK atas Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Floating Repair) Kapal Negara ALNILAM pada Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018, yang penyidikannya dilakukan oleh Kejari Pontianak.  
Kegiatan: Telah dilakukan gelar perkara antara Penyidik Kejari Pontianak, Jaksa pada Pidsus Kejaksaan RI, dan Satgas Penindakan Korwil 4 KPK pada 19 Februari 2020 dengan 10 (sepuluh) simpulan dan 4 (empat) rekomendasi.
  17. Dugaan TPK pembukaan dan penanaman areal tanaman baru kebun Kembang Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat oleh PT. Perkebunan Nusantara XIII, yang penyidikannya dilakukan oleh Kejati Kalimantan Barat.  
Kegiatan: Rapat koordinasi dengan Penyidik Kejati Kalimantan Barat, Ahli dari BIG, Ahli dari LAPAN, Auditor BPK RI, dan Satgas Penindakan Korwil 4 KPK terkait hasil dan penyerahan laporan Ahli yang dilaksanakan pada 27 Februari 2020 dengan hasil laporan Ahli telah diserahkan kepada Auditor BPK RI untuk kemudian dilakukan perhitungan kerugian negara.
  18. Dugaan TPK dalam pembangunan infrastruktur pembasahan untuk lahan gambut oleh Badan Restorasi Gambut pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah TA 2017, 2018, dan 2019, yang penyidikannya ditangani oleh Kejari Palangka Raya.  
Kegiatan: Telah dilaksanakan fasilitasi pemeriksaan Ahli Teknis dari Badan Geologi Kementerian

- Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) pada tanggal 06 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah dilaporkan dalam Nota Dinas kepada Plt. Deputi Bidang Penindakan.
19. Dugaan TPK dalam pembangunan infrastruktur pembasahan untuk lahan gambut oleh Badan Restorasi Gambut pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah TA 2017, 2018, dan 2019, yang penyidikannya ditangani oleh Kejari Palangka Raya.  
Kegiatan: Telah dilaksanakan fasilitasi pemeriksaan saksi dari distributor tunggal mesin pompa air bermerk Robin pada tanggal 06 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah dilaporkan dalam Nota Dinas kepada Plt. Deputi Bidang Penindakan
  20. Dugaan TPK atas penggelapan dana Pajak Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Kota Tanjungpinang yang diduga merugikan keuangan negara/daerah.  
Kegiatan: Gelar perkara bersama penyidik pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan Direktorat Monitor pada tanggal 23 Maret 2020.
  21. Dugaan TPK atas penggelapan dana Pajak Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Kota Tanjungpinang yang diduga merugikan keuangan negara/daerah.  
Kegiatan: Fasilitasi digital forensic dengan berkoordinasi dengan Direktorat Monitor KPK.
  22. Dugaan TPK di PT Asabri (Persero) terkait penyimpangan pada tata kelola investasi dan kegiatan lainnya yang dijalankan perusahaan sampai dengan tahun 2019 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya.  
Kegiatan: Fasilitasi Penyelidik Polda Metro Jaya dalam permintaan keterangan terhadap saksi pada tanggal 17 Maret 2019
  23. Dugaan TPK dalam pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada beberapa Perusahaan Periode Tahun 2008 sd 2018 atas nama tersangka BT, tersangka HR, tersangka HH, tersangka HH, dan tersangka S  
Kegiatan: Fasilitasi Penyidik Kejaksaan Agung RI dalam pemeriksaan saksi untuk berkas atas nama tersangka BT, tersangka HR, tersangka HH, tersangka HH, dan tersangka S.
  24. Dugaan TPK di PT Asabri (Persero) terkait penyimpangan pada tata kelola investasi dan kegiatan lainnya yang dijalankan perusahaan sampai dengan tahun 2019 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya.



Kegiatan: Fasilitasi Penyelidik Polda Metro Jaya dalam permintaan keterangan terhadap saksi pada tanggal 19 Maret 2019

25. Dugaan TPK pada proses pencairan dan pembayaran klaim tongkang LABROY 168 yang diajukan PT. Pelayaran Bintang Arwana Kapuas Armada kepada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Pontianak, yang penyidikannya dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pontianak.

Kegiatan : Fasilitasi Ahli Hukum Asuransi pada tahap persidangan bersama Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak pada 9 Maret 2020.

26. Dugaan TPK bantuan dana hibah, bidang perekonomian kepada kelompok masyarakat yang disalurkan oleh Kantor Disperindagkop dan UMKM Kota Salatiga yang bersumber dari APBD Kota Salatiga TA. 2012 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Salatiga.

Kegiatan: Telah dilakukan gelar perkara antara Penyidik Ditreskrimsus pada Bareskrim Polri, Penyidik pada Ditreskrimsus Polda Jateng, Penyidik pada Polres Salatiga dan Unit Korwil Penindakan KPK pada tanggal 12 Maret 2020.

27. Dugaan TPK berupa Penyalahgunaan Dana Hasil Lelang Tanah Kas Desa Dan Hasil Pungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 Desa Jenengan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan tahun 2014-2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Grobogan

Kegiatan: Telah dilakukan gelar perkara antara Penyidik Ditreskrimsus pada Bareskrim Polri, Penyidik pada Ditreskrimsus Polda Jateng, Penyidik pada Polres Grobogan dan Unit Korwil Penindakan KPK pada tanggal 12 Maret 2020.

28. Dugaan TPK yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara dengan cara tidak menyetorkan seluruh uang Penerimaan Retribusi PKB pada Dinas Perhubungan Kota Semarang setiap harinya ke Kasda Kota Semarang di Bank Jateng tahun anggaran 2017 dan 2018 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Porestabes Semarang.

Kegiatan: Telah dilakukan gelar perkara antara Penyidik Ditreskrimsus pada Bareskrim Polri, Penyidik pada Ditreskrimsus Polda Jateng, Penyidik pada Polrestabes Semarang dan Unit Korwil Penindakan KPK pada tanggal 12 Maret 2020.

29. Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berasal dari TPK Penyimpangan Setoran Kas Daerah Pemerintah Kota Semarang ke Rekening Giro dan Deposito An. Walikota Cq Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Semarang pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Tahun 2008 s.d. 2014 di Kantor UPTD Kasda Pemkot Semarang yang

penyidikannya dilaksanakan oleh Porestabes Semarang.

Kegiatan: Telah dilakukan gelar perkara antara Penyidik Ditreskrimsus pada Bareskrim Polri, Penyidik pada Ditreskrimsus Polda Jateng, Penyidik pada Polrestabes Semarang dan Unit Korwil Penindakan KPK pada tanggal 12 Maret 2020.

30. Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada kegiatan pembebasan lahan Rumah Potong Unggas (RPU) Tahun Anggaran 2015 pada SKPD Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan, atas nama terdakwa ABDUL YAJID Bin TASLIM RESRO DIKRIMO, yang penuntutannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Balikpapan.

Kegiatan: Telah dilakukan fasilitasi pemeriksaan Ahli Keuangan Daerah dari Universitas Diponegoro, di Pengadilan Tipikor pada PN Samarinda pada tanggal 10 Maret 2020.

31. Dugaan TPK dalam pembangunan infrastruktur pembasahan untuk lahan gambut oleh Badan Restorasi Gambut pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah TA 2017, 2018, dan 2019, yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Palangka Raya.

Kegiatan: Fasilitasi pemeriksaan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) pada tanggal 05 Maret 2020.

32. Dugaan TPK dalam pembangunan infrastruktur pembasahan untuk lahan gambut oleh Badan Restorasi Gambut pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah TA 2017, 2018, dan 2019, yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Palangka Raya.

Kegiatan: Fasilitasi pemeriksaan Saksi dari Badan Restorasi Gambut (BRG) pada tanggal 06 Maret 2020.

33. Dugaan TPK penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp39.000.000.000,- di Kabupaten Enrekang TA 2015, yang penyidikannya dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Kegiatan: Gelar perkara bersama penyidik pada Kejati Sulawesi Selatan pada tanggal 4 Maret 2020.

34. Dugaan TPK suap Proyek Irigasi Anggaran DAK sebesar Rp49.000.000.000,- di Kementerian PUPR Kab. Bulukumba TA 2017, yang penyidikannya dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Kegiatan: Gelar perkara bersama penyidik pada Kejati Sulawesi Selatan pada tanggal 4 Maret 2020.

35. Dugaan TPK pengadaan Media Sistem Teknologi dan Informasi (TIK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 sebesar Rp1.500.000.000,- di Dinas Pendidikan Kota Parepare, yang penyidikannya dilakukan oleh

Polres Parepare.

Kegiatan: Gelar perkara bersama penyidik pada Polres Parepare pada tanggal 5 Maret 2020.

36. Dugaan TPK potongan 5% Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2018 untuk rehab puluhan sekolah senilai Rp8.500.000.000,-, yang penyidikannya dilakukan oleh Polres Parepare.

Kegiatan: Gelar perkara bersama penyidik pada Polres Parepare pada tanggal 5 Maret 2020.

37. Dugaan TPK di BPBD Kab. Waropen dalam Pengadaan Proyek Talud Beton Pengaman Pantai di Kampung Paradoi dan Ghoyui TA 2017, yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Papua.

Kegiatan: Gelar perkara bersama penyidik pada Polres Papua pada tanggal 16 Maret 2020.

38. Dugaan TPK Gratifikasi Penerimaan Suap oleh Penyelenggara Negara dan TPPU oleh YERMIAS BISAI, S.H., Wakil Bupati Waropen Tahun 2010 s.d. 2018, yang penyidikannya dilakukan oleh Kejati Papua.

Kegiatan: Gelar perkara bersama penyidik pada Polres Papua pada tanggal 17 Maret 2020.

39. Dugaan TPK pada proses pelepasan tanah proyek pembangunan pelabuhan peti kemas Distrik Depapre, Kab. Jayapura TA 2008 – 2013, yang penyidikannya dilakukan oleh Kejari Jayapura.

Kegiatan: Gelar perkara bersama penyidik pada Polres Papua pada tanggal 17 Maret 2020.

40. Dugaan TPK di Pegunungan Bintang TA 2016 s.d. 2017, yang ditelaah oleh Direktorat Penyelidikan KPK.

Kegiatan: Penyerahan dokumen hasil telaahan kepada Polda Papua melalui Berita Acara Pelimpahan Perkara dan Surat Tanda Penyerahan Dokumen pada tanggal 16 Maret 2020.

41. Dugaan TPK dalam pembangunan Rumah Sangat Sederhana di Kab. Puncak TA 2017 s.d. 2018, yang ditelaah oleh Direktorat Penyelidikan KPK.

Kegiatan: Penyerahan dokumen hasil telaahan kepada Polda Papua melalui Berita Acara Pelimpahan Perkara dan Surat Tanda Penyerahan Dokumen pada tanggal 16 Maret 2020.

42. Dugaan TPK PT Asabri (Persero) terkait penyimpangan pada tata kelola investasi dan kegiatan lainnya yang dijalankan perusahaan sampai dengan tahun 2019 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya.

Kegiatan: Fasilitasi Penyelidik Polda Metro Jaya dalam permintaan keterangan terhadap saksi pada tanggal 16 April 2019.

43. Dugaan TPK dan TPPU dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Taman Pemakaman Umum (TPU) Kabupaten OKU sumber dana APBD 2013 senilai Rp6.000.000.000,- atas nama Tsk JOHAN ANUAR yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Sumatera Selatan.

Kegiatan: Telah dilakukan gelar perkara via Aplikasi

Zoom antara Penyidik Polda Sumatera Selatan, Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Subdit 5 Dit Tipidkor Bareskrim Polri dan Unit Korwil Penindakan KPK pada tanggal 11 Mei 2020 dengan 2 (dua) kesimpulan.

44. Dugaan TPK dan TPPU dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Taman Pemakaman Umum (TPU) Kabupaten OKU sumber dana APBD 2013 senilai Rp6.000.000.000,- atas nama Tsk JOHAN ANUAR yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Sumatera Selatan.

Kegiatan: Telah dilakukan gelar perkara antara Penyidik Polda Sumatera Selatan, Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Subdit 5 Dit Tipidkor Bareskrim Polri, Auditor pada BPK RI dan Unit Korwil Penindakan KPK pada tanggal 20 Mei 2020 dengan 3 (tiga) kesimpulan.

45. Dugaan TPK berupa Penerimaan hadiah atau janji yang diberikan oleh Rektor Universitas Negeri Jakarta kepada pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kegiatan : Gelar perkara dan penyerahan dokumen/uang/barang bukti dari KPK bersama Penyelidik KPK dan Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan terkait pelimpahan penanganan perkara bertempat di Kantor Polres Metro Jakarta Selatan berdasarkan Berita Acara Pelimpahan Perkara dan Surat Tanda Penyerahan Dokumen (STPED) tanggal 21 Mei 2020

46. Dugaan TPK berupa Penerimaan hadiah atau janji yang diberikan oleh Rektor Universitas Negeri Jakarta kepada pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kegiatan : Gelar perkara bersama dengan Penyidik Polda Metro Jaya terkait pelimpahan penanganan perkara bertempat di Kantor Polda Metro Jaya pada tanggal 22 Mei 2020

47. Dugaan TPK berupa Penerimaan hadiah atau janji yang diberikan oleh Rektor Universitas Negeri Jakarta kepada pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kegiatan : Fasilitasi Pemeriksaan Saksi dari Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK oleh Penyidik Polda Metro Jaya bertempat di Ruang Riksa 1 dan 2 Lt. 2 KPK pada tanggal 26 Mei 2020

48. Dugaan TPK berupa Penerimaan hadiah atau janji yang diberikan oleh Rektor Universitas Negeri Jakarta kepada pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kegiatan : Fasilitasi Pemeriksaan Saksi dari Direktorat Penyelidikan KPK oleh Penyidik Polda Metro Jaya bertempat di Ruang Riksa 1 dan 2 Lt. 2 KPK pada tanggal 29 Mei 2020

49. Dugaan TPK terkait Bantuan Dana Pemerintah kepada KONI Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Kejaksaan Agung RI.

Kegiatan: Fasilitasi Penyidik Kejaksaan Agung RI

- dalam permintaan keterangan Tersangka atas nama MIFTAHUL ULUM tanggal 19 Mei 2020
50. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD Kab. Morowali Utara TA 2015 dengan nilai Rp.588.000.000,- yang diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atas nama Tsk TERHARD LAWANDI yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah.  
Kegiatan: Telah dilakukan gelar perkara antara Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dengan Unit Korwil Penindakan KPK pada tanggal 18 Juni 2020 di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dengan 3 (dua) kesimpulan.
51. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD Kab. Morowali Utara TA 2015 dengan nilai Rp.588.000.000,- yang diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atas nama Tsk RIFAI BAGENDA yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah.  
Kegiatan: Telah dilakukan gelar perkara antara Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dengan Unit Korwil Penindakan KPK pada tanggal 18 Juni 2020 di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dengan 3 (dua) kesimpulan.
52. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Perencanaan Pembangunan Kantor DPRD Kab. Morowali Utara TA 2015 yang dikerjakan oleh CV. Aditya Cipta Media Jasa dengan nilai kontrak sebesar Rp.298.485.000,- yang diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atas nama Tsk KRISTOFERUS LAGARINDA yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah.  
Kegiatan: Telah dilakukan gelar perkara antara Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dengan Unit Korwil Penindakan KPK pada tanggal 18 Juni 2020 di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dengan 3 (dua) kesimpulan.
53. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Perencanaan Pembangunan Kantor DPRD Kab. Morowali Utara TA 2015 yang dikerjakan oleh CV. Aditya Cipta Media Jasa dengan nilai kontrak sebesar Rp.298.485.000,- yang diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atas nama Tsk BASO MUHTAR yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah.  
Kegiatan: Telah dilakukan gelar perkara antara Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dengan Unit Korwil Penindakan KPK pada tanggal 18 Juni 2020 di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dengan 3 (dua) kesimpulan.
54. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Kantor DPRD Kab. Morut Tahap I 2016 yang dikerjakan oleh CV. Multi Global Konstrindo dengan nilai kontrak setelah perubahan (Addendum) sebesar Rp.9.004.617.000,- yang diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atas nama Tsk AMRING JUNIFAN yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah.  
Kegiatan: Telah dilakukan gelar perkara antara Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dengan Unit Korwil Penindakan KPK pada tanggal 18 Juni 2020 di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dengan 3 (dua) kesimpulan.
55. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Kantor DPRD Kab. Morut Tahap I 2016 yang dikerjakan oleh CV. Multi Global Konstrindo dengan nilai kontrak setelah perubahan (Addendum) sebesar Rp.9.004.617.000,- yang diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atas nama Tsk CHRISTIAN HADI CHANDRA yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah.  
Kegiatan: Telah dilakukan gelar perkara antara Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dengan Unit Korwil Penindakan KPK pada tanggal 18 Juni 2020 di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dengan 3 (dua) kesimpulan.
56. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Kantor DPRD Kab. Morut Tahap I 2016 yang dikerjakan oleh CV. Multi Global Konstrindo dengan nilai kontrak setelah perubahan (Addendum) sebesar Rp.9.004.617.000,- yang diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atas nama Tsk ISMAIL TAYF yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah.  
Kegiatan: Telah dilakukan gelar perkara antara Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dengan Unit Korwil Penindakan KPK pada tanggal 18 Juni 2020 di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dengan 3 (dua) kesimpulan.
57. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Kantor DPRD Kab. Morut Tahap I 2016 yang dikerjakan oleh CV. Multi Global Konstrindo dengan nilai kontrak setelah perubahan (Addendum) sebesar Rp.9.004.617.000,- yang diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atas nama Tsk RONNYT. SAPUTRA yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah.  
Kegiatan: Telah dilakukan gelar perkara antara Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dengan Unit Korwil Penindakan KPK pada tanggal 18 Juni 2020 di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dengan 3 (dua) kesimpulan.
58. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Kantor DPRD Kab. Morut Tahap I 2016 yang dikerjakan oleh CV. Multi Global Konstrindo dengan nilai kontrak setelah perubahan (Addendum) sebesar Rp.9.004.617.000,- yang diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atas nama Tsk SAFRUDIN MAJID yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah.  
Kegiatan: Telah dilakukan gelar perkara antara Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dengan Unit Korwil Penindakan KPK pada tanggal 18 Juni 2020 di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dengan 3 (dua) kesimpulan.
59. Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Kab. Buol pada Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Buol periode tahun 2013-2015 atas nama Tsk BAMBANG SU'A yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah.  
Kegiatan: Telah dilakukan gelar perkara antara Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dengan Unit Korwil Penindakan KPK pada tanggal 18 Juni 2020 di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dengan 5 (dua) kesimpulan.
60. Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Kab. Buol pada Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Buol periode tahun 2013-2015 atas nama Tsk ITHO MURTADHA yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah.  
Kegiatan: Telah dilakukan gelar perkara antara Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dengan Unit Korwil Penindakan KPK pada tanggal 18 Juni 2020 di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dengan 5 (dua) kesimpulan.
61. Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Kab. Buol pada Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Buol periode tahun 2013-2015 atas nama Tsk ANDRE HASIBUAN yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah.  
Kegiatan: Telah dilakukan gelar perkara antara Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dengan Unit Korwil Penindakan KPK pada tanggal 18 Juni 2020 di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dengan 5 (dua) kesimpulan.
62. Tindak Pidana Korupsi Proyek Pekerjaan Jembatan Torate CS Tahun Anggaran 2018 yang dikerjakan oleh PT. Mitra Aiyangga Nusantara dengan nilai kontrak sebesar Rp. 14.900.900.000,- pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Satuan Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Tsk CHRISTIAN ANDI PELANG yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.  
Kegiatan: Telah dilakukan gelar perkara antara Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dengan Unit Korwil Penindakan KPK pada tanggal 18 Juni 2020 di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dengan 2 (dua) kesimpulan.
63. Dugaan TPK berupa penyimpangan pada tata kelola investasi dan kegiatan lainnya yang dijalankan BUMN PT. ASABRI (Persero) Tbk. yang disidik oleh Polda Metro Jaya.  
Kegiatan: Fasilitasi Pemeriksaan Saksi dari Tahanan Kejagung di Ruta Klas 1 Cabang KPK BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT oleh Penyidik Polda Metro Jaya bertempat di Kantor Polda Metro Jaya pada tanggal 22 Juni 2020
64. Dugaan TPK berupa penyimpangan pada tata kelola investasi dan kegiatan lainnya yang dijalankan BUMN PT. ASABRI (Persero) Tbk. yang disidik oleh Polda Metro Jaya.  
Kegiatan: Fasilitasi Pemeriksaan Saksi dari Tahanan Kejagung di Ruta Klas 1 Cabang KPK BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT oleh Penyidik Polda Metro Jaya bertempat di Kantor Polda Metro Jaya pada tanggal 25 Juni 2020
65. Klarifikasi Dugaan Tindak Pidana Perbankan dan/atau Penipuan dan/atau Penggelapan dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilidiki oleh Polda Metro Jaya.  
Kegiatan: Fasilitasi Pemeriksaan Saksi dari Tahanan Kejagung di Ruta Klas 1 Cabang KPK BENNY TJOKROSAPUTRO oleh Penyidik Polda Metro Jaya bertempat di Kantor Polda Metro Jaya pada tanggal 23 Juni 2020.
66. Dugaan TPK Pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang bersumber dari APBN TA. 2015 dan 2016 Periode Januari-April 2016 dan Dana BOMM/SSM (Bantuan Operasional Manajemen Mutu - Subsidi Sekolah Menengah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.  
Kegiatan: Fasilitasi Pemeriksaan Ahli Keuangan Negara di persidangan secara online di Pengadilan Tipikor pada PN Mamuju tanggal 10 Juni 2020.
67. Dugaan TPK dalam pengadaan media pembelajaran (Perangkat Keras) Berbasis IT dan Multimedia, pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018.  
Kegiatan: Gelar perkara dengan Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Riau dan Satgas Penindakan Koordinasi Wilayah V KPK tanggal 15 Juni 2020.
68. Pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proses penguasaan lahan masyarakat di Desa Sebanban Kabupaten Tanah Bumbu oleh perusahaan Hutan Tanaman Industri dan Perusahaan Tambang Batubara.  
Kegiatan: Pelimpahan hasil penelitian terhadap pengaduan masyarakat tersebut ke Kedeputan Pencegahan sebagai bahan bahan informasi pada saat melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
69. Dugaan TPK dalam pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada beberapa Perusahaan Periode Tahun 2008 sd 2018 atas nama tersangka HH  
Kegiatan: Fasilitasi menghadirkan terpidana HH dalam pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat dalam persidangan perkara atas nama terdakwa HH tanggal 3 Juni 2020
70. Dugaan TPK dalam pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada beberapa Perusahaan Periode Tahun 2008 sd 2018 atas nama tersangka HR  
Kegiatan: Fasilitasi menghadirkan terpidana HR dalam pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat dalam persidangan perkara atas nama terdakwa HR

- tanggal 3 Juni 2020
71. Dugaan TPK dalam pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada beberapa Perusahaan Periode Tahun 2008 sd 2018 atas nama tersangka BT  
Kegiatan: Fasilitasi menghadirkan terpidana BT dalam pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat dalam persidangan perkara atas nama terdakwa BT tanggal 3 Juni 2020
72. Dugaan TPK dalam Pemberian Fasilitas Pembiayaan dari PT. Danareksa Sekuritas kepada Debitur PT. Evio Securities dengan tersangka atas nama MARCIANO HENSONDRIE HERMAN yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Kejaksaan Agung RI  
Kegiatan: Fasilitasi Penyidik Kejaksaan Agung RI dalam penitipan tahanan atas nama tersangka MARCIANO HENSONDRIE HERMAN
73. Dugaan TPK dalam Pemberian Fasilitas Pembiayaan dari PT. Danareksa Sekuritas kepada Debitur PT. Evio Securities dengan tersangka atas nama ERIZAL, SE Bin SANIDJAR LUDIN yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Kejaksaan Agung RI  
Kegiatan: Fasilitasi Penyidik Kejaksaan Agung RI dalam penitipan tahanan atas nama tersangka ERIZAL, SE Bin SANIDJAR LUDIN
74. Dugaan TPK kegiatan pengadaan Alkes, Dokter dan KB RSUD dr. RASIDIN Kota Padang Tahun Anggaran 2013 yang terjadi pada Tahun Anggaran 2013 yang penuntutannya dilaksanakan oleh Kejari Padang  
Kegiatan: Fasilitasi menghadirkan 10 saksi dalam pemeriksaan di persidangan secara online pada Pengadilan Tipikor pada PN Padang tanggal 5 Juni 2020.
75. Dugaan TPK kegiatan pengadaan Alkes, Dokter dan KB RSUD dr. RASIDIN Kota Padang Tahun Anggaran 2013 yang terjadi pada Tahun Anggaran 2013 yang penuntutannya dilaksanakan oleh Kejari Padang  
Kegiatan: Fasilitasi menghadirkan 7 saksi dalam pemeriksaan di persidangan secara online pada Pengadilan Tipikor pada PN Padang tanggal 10 Juni 2020.
76. Dugaan TPK kegiatan pengadaan Alkes, Dokter dan KB RSUD dr. RASIDIN Kota Padang Tahun Anggaran 2013 yang terjadi pada Tahun Anggaran 2013 yang penuntutannya dilaksanakan oleh Kejari Padang  
Kegiatan: Fasilitasi menghadirkan 7 saksi dalam pemeriksaan di persidangan secara online pada Pengadilan Tipikor pada PN Padang tanggal 12 Juni 2020.
77. Dugaan TPK kegiatan pengadaan Alkes, Dokter dan KB RSUD dr. RASIDIN Kota Padang Tahun Anggaran 2013 yang terjadi pada Tahun Anggaran 2013 yang penuntutannya dilaksanakan oleh Kejari Padang  
Kegiatan: Fasilitasi menghadirkan 2 saksi dalam pemeriksaan di persidangan secara online pada Pengadilan Tipikor pada PN Padang tanggal 17 Juni 2020.
78. Dugaan TPK kegiatan pengadaan Alkes, Dokter dan KB RSUD dr. RASIDIN Kota Padang Tahun Anggaran 2013 yang terjadi pada Tahun Anggaran 2013 yang penuntutannya dilaksanakan oleh Kejari Padang  
Kegiatan: Fasilitasi menghadirkan 2 saksi dalam pemeriksaan di persidangan secara online pada Pengadilan Tipikor pada PN Padang tanggal 19 Juni 2020.
79. Dugaan TPK kegiatan pengadaan Alkes, Dokter dan KB RSUD dr. RASIDIN Kota Padang Tahun Anggaran 2013 yang terjadi pada Tahun Anggaran 2013 yang penuntutannya dilaksanakan oleh Kejari Padang  
Kegiatan: Fasilitasi menghadirkan Ahli Kerugian Keuangan Negara di persidangan secara online pada Pengadilan Tipikor pada PN Padang tanggal 26 Juni 2020.
80. Dugaan TPK dalam pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada beberapa Perusahaan Periode Tahun 2008 sd 2018 atas nama tersangka HERU HIDAYAT  
Kegiatan: Fasilitasi Penyidik Kejaksaan Agung RI dalam permintaan keterangan sebagai saksi atas nama Heru Hidayat tanggal 9 Juni 2020
81. Dugaan TPK dalam pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada beberapa Perusahaan Periode Tahun 2008 sd 2018 atas nama tersangka BENNY TJOKROSAPUTRO  
Kegiatan: Fasilitasi Penyidik Kejaksaan Agung RI dalam permintaan keterangan sebagai saksi atas nama Benny Tjokrosaputro tanggal 9 Juni 2020
82. Dugaan TPK dalam Pemberian Fasilitas Pembiayaan dari PT. Danareksa Sekuritas kepada Debitur PT. Aditya Tirta Renata yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Kejagung RI  
Kegiatan: Fasilitasi Penyidik Kejaksaan Agung RI dalam permintaan keterangan sebagai saksi atas nama MARCIANO HENSONDRIE HERMAN, SE tanggal 18 Juni 2020
83. Dugaan TPK dalam Pemberian Fasilitas Pembiayaan dari PT. Danareksa Sekuritas kepada Debitur PT. Aditya Tirta Renata yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Kejagung RI  
Kegiatan: Fasilitasi Penyidik Kejaksaan Agung RI dalam permintaan keterangan sebagai saksi atas nama ERIZAL, SE Bin SANIDJAR LUDIN F tanggal 18 Juni 2020
84. Dugaan TPK dalam Pemberian Fasilitas Pembiayaan dari PT. Danareksa Sekuritas kepada Debitur PT. Aditya Tirta Renata yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Kejagung RI  
Kegiatan: Fasilitasi Penyidik Kejaksaan Agung RI dalam permintaan keterangan sebagai tersangka atas nama MARCIANO HENSONDRIE HERMAN, SE tanggal 19 Juni 2020
85. Dugaan TPK dalam Pemberian Fasilitas Pembiayaan dari PT. Danareksa Sekuritas kepada Debitur PT. Aditya Tirta Renata yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Kejagung RI  
Kegiatan: Fasilitasi Penyidik Kejaksaan Agung RI dalam permintaan keterangan sebagai tersangka atas nama MARCIANO HENSONDRIE HERMAN, SE tanggal 25 Juni 2020
86. Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Paket Peningkatan Jalan Penghubung dari Lokasi Sei Rahayu I-Sei Rahayu Kec. Teweh Tengah TA 2016 melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Barut atas nama Tsk YASER ARAFAT, S.T., M.H yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah.  
Kegiatan: Telah dilakukan gelar perkara antara Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dengan Unit Korwil Penindakan KPK pada tanggal 03 Juli 2020 di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dengan 7 (tujuh) kesimpulan.
87. Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana dan Bantuan Pemerintah pada Kegiatan Pembelian Kebun Karet di Desa Darmo Kasih Kec. Belimbing Kab. Muara Enim TA 2017 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Muara Enim.  
Kegiatan: Telah dilakukan gelar perkara antara Penyidik Kepolisian Resor Muara Enim dengan Unit Korwil Penindakan KPK pada tanggal 10 Juli 2020 di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan 3 (dua) kesimpulan.
88. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Kegiatan Penanaman Pohon Program Pemboran BN-AA15 PT. Pertamina EP Asset I Field Ramba Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2013 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Musi Banyuasin.  
Kegiatan: Telah dilakukan gelar perkara antara Penyidik Kepolisian Resor Musi Banyuasin dengan Unit Korwil Penindakan KPK pada tanggal 10 Juli 2020 di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan 4 (empat) kesimpulan.
89. Tindak Pidana Korupsi Uang Hasil Tagihan Rekening Air Bersih pada Unit Rambutan PDAM Tirta Musi Palembang Tahun 2018/2019 atas nama Tsk M. ROIHAN HAKIM yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.  
Kegiatan: Telah dilakukan gelar perkara antara Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dengan Unit Korwil Penindakan KPK pada tanggal 10 Juli 2020 di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan 3 (dua) kesimpulan.
90. Dugaan Penyimpangan pada Penjualan Minyak Mentah Milik Pertamina RU-III Plaju dari Mt. Andhika Arsanti ke Mt. Merlion II yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.  
Kegiatan: Telah dilakukan gelar perkara antara Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan Unit Korwil Penindakan KPK pada tanggal 10 Juli 2020 di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dengan 3 (dua) kesimpulan.
91. Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Taman Pemakaman Umum (TPU) Kabupaten OKU Sumber Dana APBD TA 2013 atas nama Tsk JOHAN ANUAR yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.  
Kegiatan: Telah dilakukan gelar perkara antara Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan Unit Korwil Penindakan KPK pada tanggal 10 Juli 2020 di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dengan 3 (dua) kesimpulan.
92. Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Taman Pemakaman Umum (TPU) Kabupaten OKU Sumber Dana APBD TA 2013 atas nama Tsk JOHAN ANUAR yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.  
Kegiatan: Telah dilakukan gelar perkara antara Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan Unit Korwil Penindakan KPK pada tanggal 23 Juli 2020 di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dengan 4 (dua) kesimpulan.
93. Ambil Alih Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Taman Pemakaman Umum (TPU) Kabupaten OKU Sumber Dana APBD TA 2013 atas nama Tsk JOHAN ANUAR yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.  
Kegiatan: Telah dilakukan gelar perkara antara Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan Unit Korwil Penindakan KPK pada tanggal 23 Juli 2020 di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
94. Dugaan TPK berupa penyimpangan pada tata kelola investasi dan kegiatan lainnya yang dijalankan BUMN PT. ASABRI (Persero) Tbk. yang disidik oleh Polda Metro Jaya.  
Kegiatan: Fasilitasi Pemeriksaan Saksi dari Tahanan Kejagung di Ruta Klas 1 Cabang KPK BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT oleh Penyidik Polda Metro Jaya bertempat di Kantor Polda Metro Jaya pada tanggal 7 Juli 2020
95. Dugaan TPK berupa penyimpangan pada tata kelola investasi dan kegiatan lainnya yang dijalankan BUMN PT. ASABRI (Persero) Tbk. yang disidik oleh Polda Metro Jaya.  
Kegiatan: Fasilitasi Pemeriksaan Saksi dari Tahanan Kejagung di Ruta Klas 1 Cabang KPK BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT oleh Penyidik Polda Metro Jaya bertempat di Kantor Polda Metro Jaya pada tanggal 9 Juli 2020
96. Dugaan TPK berupa penyimpangan pada tata kelola investasi dan kegiatan lainnya yang dijalankan BUMN PT. ASABRI (Persero) Tbk.

- yang disidik oleh Polda Metro Jaya.  
Kegiatan: Fasilitasi Pemeriksaan Saksi dari Tahanan Kejagung di Ruta Klas 1 Cabang KPK BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT oleh Penyidik Polda Metro Jaya bertempat di Kantor Polda Metro Jaya pada tanggal 10 Juli 2020
97. Dugaan TPK pada Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas PUPR Kab. Simeulue yang bersumber dari dana APBK Kab. Simeulue TA 2017 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.790.000.000,- yang disidik oleh Polda Aceh.  
Kegiatan: Gelar perkara bersama penyidik pada Bareskrim Polri dan Polda Aceh pada tanggal 13 Juli 2020.
98. Dugaan TPK pada Pembangunan Pasar Ikan dan Pasar Sayur Keude Bakongan Kabupaten Aceh Selatan dengan nilai kontrak Rp. 1.648.389.000,- yang bersumber dari dana APBA tahun anggaran 2016 yang dilaksanakan oleh CV. CAHAYA ARTHA MULIA dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh yang disidik oleh Polres Aceh Selatan.  
Kegiatan: Gelar perkara bersama penyidik pada Bareskrim Polri, Polda Aceh dan Polres Aceh Selatan pada tanggal 13 Juli 2020.
99. Dugaan TPK Penganggu Instalasi Air Bersih Bio Teknologi di Kec. Sawang Kab. Aceh Utara TA 2011 anggaran Rp. 2.425.250.000,- yang disidik oleh Polres Lhokseumawe.  
Kegiatan: Gelar perkara bersama penyidik pada Bareskrim Polri, Polda Aceh, dan Polres Lhokseumawe pada tanggal 13 Juli 2020.
100. Dugaan TPK Penyalahgunaan Kewenangan Penggunaan Uang/Anggaran Pemkab Gayo Lues bersumber Dana APBD 2003 s.d. 2006 yang disidik oleh Polda Aceh dan Polres Gayo Lues.  
Kegiatan: Gelar perkara bersama penyidik pada Bareskrim Polri, Polda Aceh, dan Polres Gayo Lues pada tanggal 14 Juli 2020.
101. Dugaan TPK Pembangunan pusat pasar kegiatan Revitalisasi Pasar Tradisional Dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Usulan Daerah (Tahap 1) TA 2015 dengan sumber DAK Tambahan Usulan Daerah tahun 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp.12.620.000.000,- dan pembangunan revitalisasi pasar Kecamatan Simpang Kiri tahap II (DAK TAMBAHAN 2015) TA 2016 dengan sumber DAK Tambahan Usulan Daerah tahun 2015 dengan nilai kontrak Rp 16.384.265.000,- pada Dinas Perindustrian, Pertambangan, Koperasi dan UKM Kota Subulussalam yang disidik oleh Kejari Subulussalam.  
Kegiatan: Gelar perkara bersama penyidik pada Kejagung RI, Kejati Aceh, dan Kejari Subulussalam pada tanggal 15 Juli 2020.
102. Dugaan TPK pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKPBPBS) pada Pekerjaan Perencanaan untuk Paket Kegiatan Pembangunan Terminal Pelabuhan

- Penyeberangan Balohan Sabang TA 2016 dengan anggaran sebesar Rp. 633.975.000,- yang disidik oleh Kejari Sabang.  
Kegiatan: Gelar perkara bersama penyidik pada Kejagung RI, Kejati Aceh, dan Kejari Sabang pada tanggal 15 Juli 2020.
103. Dugaan TPK berupa penyimpangan pada tata kelola investasi dan kegiatan lainnya yang dijalankan BUMN PT. ASABRI (Persero) Tbk. yang disidik oleh Polda Metro Jaya.  
Kegiatan: Fasilitasi Pemeriksaan Saksi dari Tahanan Kejagung di Ruta Klas 1 Cabang KPK BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT oleh Penyidik Polda Metro Jaya bertempat di Kantor Polda Metro Jaya pada tanggal 28 Juli 2020.
104. Dugaan TPK berupa permintaan "Uang Koordinasi" pada saat melakukan kegiatan pekerjaan salvage/pekerjaan bawah air dan olah gerak di pelabuhan CPO Kabil.  
Kegiatan: Telah dilakukan gelar perkara antara Penyidik pada Ditreskrimsus Polda Kepri, Perwakilan Direktorat Tipidkor Bareskrim Polri, dan Unit Korwil Penindakan KPK pada tanggal 8 Juli 2020 dengan 2 (dua) kesimpulan dan 4 (empat) rekomendasi.
105. Dugaan TPK dalam pengadaan media pembelajaran (Perangkat Keras) Berbasis IT dan Multimedia, pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018.  
Kegiatan: Fasilitasi Penyidik Kejaksanaan Tinggi Riau dalam pemeriksaan Saksi pada tanggal 2 Juli 2020.
106. Dugaan TPK dalam pengadaan media pembelajaran (Perangkat Keras) Berbasis IT dan Multimedia, pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018.  
Kegiatan: Fasilitasi Penyidik Kejaksanaan Tinggi Riau dalam pemeriksaan Ahli Keuangan Negara pada tanggal 2 Juli 2020.
107. Dugaan TPK dalam pengadaan media pembelajaran (Perangkat Keras) Berbasis IT dan Multimedia, pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018.  
Kegiatan: Rapat koordinasi dengan Penyidik Kejaksanaan Tinggi Riau dan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa pada tanggal 3 Juli 2020.
108. Dugaan TPK dalam pengadaan media pembelajaran (Perangkat Keras) Berbasis IT dan Multimedia, pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018.  
Kegiatan: Koordinasi Fasilitasi Pemeriksaan Kesesuaian Spek oleh Ahli IT dan Digital Forensik KPK.
109. Dugaan TPK dalam pengadaan media pembelajaran (Perangkat Keras) Berbasis IT dan Multimedia, pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018 atas nama tersangka HAFES TIMTIM AP dan RAHMAD DHANIL.  
Kegiatan: Fasilitasi Penyidik Kejaksanaan Tinggi Riau dalam pemeriksaan Saksi pada tanggal 29 Juli 2020.
110. Dugaan TPK Kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan Jerora II – Sei Ana Kecamatan Sintang pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sintang dengan menggunakan Anggaran APBD Kabupaten Sintang TA 2013 An. Terlapor ASKIMAN yang ditangani oleh Penyidik Polda Kalimantan Barat.

- Kegiatan: Telah dilakukan rapat koordinasi terkait perkembangan penanganan perkara dimaksud antara Penyidik Polda Kalimantan Barat, Bareskrim Polri, dan Satgas Penindakan Koorwil VI di Kantor Kepolisian Daerah Kalimantan Barat pada 15 Juli 2020.
111. Dugaan TPK rogram peningkatan ketahanan pangan penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian perluasan areal sawah sumber dana APBN Tahun 2009 sebesar Rp 750.000.000,- Satker Dinas Pertanian Kab. Landak dengan luas 100 Hektar di Dusun Ipuh Pansi Desa Kayu Tanam Kecamatan Mandor Kabupaten Landak An. tersangka UNTUNG WIJAYA MUNGOK yang ditangani oleh Penyidik Polres Landak.  
Kegiatan: Telah dilakukan rapat koordinasi terkait perkembangan penanganan perkara dimaksud antara Penyidik Polres Landak, Polda Kalimantan Barat, Bareskrim Polri, dan Satgas Penindakan Koorwil VI di Kantor Kepolisian Daerah Kalimantan Barat pada 15 Juli 2020.
112. Dugaan TPK Pekerjaan Peningkatan Jalan Jambi-Sukaramai APBD Tahun Anggaran 2010 ditangani oleh Penyidik Polres Ketapang.  
Kegiatan: Telah dilakukan rapat koordinasi terkait perkembangan penanganan perkara dimaksud antara Penyidik Polres Ketapang, Polda Kalimantan Barat, Bareskrim Polri, dan Satgas Penindakan Koorwil VI di Kantor Kepolisian Daerah Kalimantan Barat pada 15 Juli 2020.
113. Dugaan TPK pengadaan meja kursi belajar siswa SMAS/SMKS pada Dinas Pendidikan Kab. Kubu Raya Tahun Anggaran 2014 yang ditangani oleh Penyidik Polresta Pontianak.  
Kegiatan: Telah dilakukan rapat koordinasi terkait perkembangan penanganan perkara dimaksud antara Penyidik Polresta Pontianak, Polda Kalimantan Barat, Bareskrim Polri, dan Satgas Penindakan Koorwil VI di Kantor Kepolisian Daerah Kalimantan Barat pada 15 Juli 2020.
114. Dugaan TPK suap pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 yang terjadi di Dapil 2 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya ditangani oleh Penyidik Polresta Pontianak.  
Kegiatan: Telah dilakukan rapat koordinasi terkait perkembangan penanganan perkara dimaksud antara Penyidik Polresta Pontianak, Polda Kalimantan Barat, Bareskrim Polri, dan Satgas Penindakan Koorwil VI di Kantor Kepolisian Daerah Kalimantan Barat pada 15 Juli 2020.

115. Dugaan TPK dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Auditorium Serba Guna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi TA 2018 an. tersangka KRISTIANA,ST.,M.PSDA BINTI ANWAR, dkk.  
Kegiatan: Telah dilakukan kegiatan fasilitasi Ahli Pengadaan Barang dan Jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa di Pengadilan Tipikor pada PN Jambi pada tanggal 20 Juli 2020.
116. Dugaan TPK dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Auditorium Serba Guna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi TA 2018 an. tersangka KRISTIANA,ST.,M.PSDA BINTI ANWAR, dkk.  
Kegiatan: Telah dilakukan kegiatan fasilitasi Ahli Teknik Kontruksi dari Universitas Politeknik Negeri Bandung di Pengadilan Tipikor pada PN Jambi pada tanggal 20 Juli 2020.
117. Dugaan TPK Pekerjaan Pembangunan Cold Storage dana tugas pembantuan Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.belitung yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Kepulauan Bangka Belitung.  
Kegiatan: Gelar perkara bersama antara Penyidik Polda Kep Bangka Belitung, Dit Tipidkor Bareskrim Polri, dan Unit Koordinasi Wilayah KPK.
118. Dugaan TPK penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Simpang Rimba TA. 2016 dan TA. 2017 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Kepulauan Bangka Belitung.  
Kegiatan: Gelar perkara bersama antara Penyidik Polda Kep Bangka Belitung, Dit Tipidkor Bareskrim Polri, dan Unit Koordinasi Wilayah KPK.
119. Dugaan TPK penyelewengan pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Bleberan TA. 2019 yang berasal dari hasil usaha BUMDes SEJAHTERA Desa Bleberan Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul TA. 2018 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda D.I. Yogyakarta  
Kegiatan: Gelar perkara bersama antara Penyidik Polda D.I. Yogyakarta, Dit Tipidkor Bareskrim Polri, dan Unit Koordinasi Wilayah KPK.
120. TPK dalam pengadaan jasa fullboard meeting hotel pada kantor Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Seni dan Budaya Yogyakarta T.A. 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda D.I. Yogyakarta.  
Kegiatan: Gelar perkara bersama antara Penyidik Polda D.I. Yogyakarta, Dit Tipidkor Bareskrim Polri, dan Unit Koordinasi Wilayah KPK.
121. TPK Uang Sewa Tanah Kas Desa Trimulyo, Jetis, Bantul tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Bantul.  
Kegiatan: Gelar perkara bersama antara Penyidik Polres Bantul, Dit Reskrimsus Polda D.I.

- Yogyakarta, Dit Tipidkor Bareskrim Polri, dan Unit Koordinasi Wilayah KPK.
122. Dugaan TPK dalam Pembangunan PLTS Komunal 5 Kwp yang terletak di Kec. Kayan Hilir Kab. Malinau Prov. Kalimantan Utara dengan menggunakan anggaran yang berasal dari APBN TA. 2016 DIPA Kemendes PDPT RI dibawah Satker Ditjen PDTU dengan nilai kontrak sebesar Rp. 16.329.460.000,- dengan nilai kerugian keuangan Negara sebesar Rp4.355.335.956,- yang disidik oleh Polda Kalimantan Utara.  
Kegiatan: Gelar perkara bersama Penyidik Dit Tipidkor pada Bareskrim Polri, Penyidik Dit Reskrimsus pada Polda Kaltara, Penyidik pada Polres jajaran Kaltara serta Satgas Koordinasi dan Supervisi bidang Penindakan I Unit Koordinasi Wilayah KPK di Polda Kalimantan Utara pada tanggal 6 Agustus 2020.
123. Dugaan TPK Pengelolaan/penggunaan ADD dan Dana Desa Tengku Dacing TA. 2015 dengan nilai kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 788.647.897,- yang disidik oleh Polres Bulungan.  
Kegiatan: Gelar perkara bersama Penyidik Dit Tipidkor pada Bareskrim Polri, Penyidik Dit Reskrimsus pada Polda Kaltara, Penyidik pada Polres jajaran Kaltara serta Satgas Koordinasi dan Supervisi bidang Penindakan I Unit Koordinasi Wilayah KPK di Polda Kalimantan Utara pada tanggal 6 Agustus 2020.
124. Dugaan TPK Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Pasar Tahun Anggaran 2014 dengan nilai kerugian keuangan Negara sebesar Rp76.617.499 yang disidik oleh Polres Bulungan.  
Kegiatan: Gelar perkara bersama Penyidik Dit Tipidkor pada Bareskrim Polri, Penyidik Dit Reskrimsus pada Polda Kaltara, Penyidik pada Polres jajaran Kaltara serta Satgas Koordinasi dan Supervisi bidang Penindakan I Unit Koordinasi Wilayah KPK di Polda Kalimantan Utara pada tanggal 6 Agustus 2020.
125. Dugaan TPK Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yang disidik oleh Polres Tarakan.  
Kegiatan: Gelar perkara bersama Penyidik Dit Tipidkor pada Bareskrim Polri, Penyidik Dit Reskrimsus pada Polda Kaltara, Penyidik pada Polres jajaran Kaltara serta Satgas Koordinasi dan Supervisi bidang Penindakan I Unit Koordinasi Wilayah KPK di Polda Kalimantan Utara pada tanggal 6 Agustus 2020.
126. Dugaan TPK Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membiayai atau menerima pembayaran dengan pemotongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya yang disidik oleh Polres Tarakan.  
Kegiatan: Gelar perkara bersama Penyidik Dit Tipidkor pada Bareskrim Polri, Penyidik Dit Reskrimsus pada Polda Kaltara, Penyidik pada Polres jajaran Kaltara serta Satgas Koordinasi dan Supervisi bidang Penindakan I Unit Koordinasi Wilayah KPK di Polda Kalimantan Utara pada tanggal 6 Agustus 2020.
127. Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam akuisisi Bank Pundi menjadi BPD Banten oleh PT Banten Global Development pada Tahun 2016 yang penyelidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Banten dan Penyelidik KPK RI.  
Kegiatan: Telah dilakukan rapat koordinasi antara Penyelidik Kejaksaan Tinggi Banten, Penyelidik KPK dengan Unit Korwil Penindakan KPK pada tanggal 24 Agustus 2020 di Gedung Merah Putih KPK RI dengan 3 (tiga) kesimpulan.
128. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah, Perencanaan dan Pembangunan Gedung DPRD Kab. Morowali Utara TA 2015 s.d TA 2016 atas nama Tersangka AMRING JUNIFAN, S.T yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah.  
Kegiatan: Telah dilakukan fasilitasi pengambilan keterangan Ahli Geoteknik pada Kementerian PUPR pada tanggal 18 Agustus 2020 di Gedung Merah Putih KPK RI.
129. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah, Perencanaan dan Pembangunan Gedung DPRD Kab. Morowali Utara TA 2015 s.d TA 2016 atas nama Tersangka CHRISTIAN HADI CHANDRA yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah.  
Kegiatan: Telah dilakukan fasilitasi pengambilan keterangan Ahli Geoteknik pada Kementerian PUPR pada tanggal 18 Agustus 2020 di Gedung Merah Putih KPK RI.
130. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah, Perencanaan dan Pembangunan Gedung DPRD Kab. Morowali Utara TA 2015 s.d TA 2016 atas nama Tersangka H. ISMAIL THAYF yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah.  
Kegiatan: Telah dilakukan fasilitasi pengambilan keterangan Ahli Geoteknik pada Kementerian PUPR pada tanggal 18 Agustus 2020 di Gedung Merah Putih KPK RI.
131. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah, Perencanaan dan Pembangunan Gedung DPRD Kab. Morowali Utara TA 2015 s.d TA 2016 atas nama Tersangka RONNY TANU SAPUTRA yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah.  
Kegiatan: Telah dilakukan fasilitasi pengambilan keterangan Ahli Geoteknik pada Kementerian PUPR pada tanggal 18 Agustus 2020 di Gedung Merah Putih KPK RI.
132. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah, Perencanaan dan Pembangunan Gedung DPRD Kab. Morowali Utara TA 2015 s.d TA 2016 atas nama Tersangka AMRING JUNIFAN, S.T yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah.  
Kegiatan: Telah dilakukan fasilitasi pengambilan keterangan Ahli Konstruksi pada Kementerian PUPR pada tanggal 18 Agustus 2020 di Gedung Merah Putih KPK RI.
133. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah, Perencanaan dan Pembangunan Gedung DPRD Kab. Morowali Utara TA 2015 s.d TA 2016 atas nama Tersangka CHRISTIAN HADI CHANDRA yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah.  
Kegiatan: Telah dilakukan fasilitasi pengambilan keterangan Ahli Konstruksi pada Kementerian PUPR pada tanggal 18 Agustus 2020 di Gedung Merah Putih KPK RI.
134. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah, Perencanaan dan Pembangunan Gedung DPRD Kab. Morowali Utara TA 2015 s.d TA 2016 atas nama Tersangka H. ISMAIL THAYF yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah.  
Kegiatan: Telah dilakukan fasilitasi pengambilan keterangan Ahli Konstruksi pada Kementerian PUPR pada tanggal 18 Agustus 2020 di Gedung Merah Putih KPK RI.
135. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah, Perencanaan dan Pembangunan Gedung DPRD Kab. Morowali Utara TA 2015 s.d TA 2016 atas nama Tersangka RONNY TANU SAPUTRA yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah.  
Kegiatan: Telah dilakukan fasilitasi pengambilan keterangan Ahli Konstruksi pada Kementerian PUPR pada tanggal 18 Agustus 2020 di Gedung Merah Putih KPK RI.
136. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut (PIPG) di Provinsi Kalimantan Tengah TA 2018 berupa Pembangunan Sumur Bor sebanyak 900 titik dan kelengkapannya oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Palangka Raya.  
Kegiatan: Telah dilakukan gelar perkara antara Penyidik Kejaksaan Negeri Palangka Raya dengan Unit Korwil Penindakan KPK, serta didampingi oleh perwakilan Kejaksaan Agung RI pada tanggal 27 Agustus 2020 di Kejaksaan Negeri Palangka Raya dengan 5 (lima) kesimpulan.
137. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Sumur Bor Model SBO-30-2 dan Peralatan Pengeboran berdasarkan Kontrak Nomor: SPK.08/TRGD/IX/2018 tanggal 27 September 2018 terkait Pembuatan Sumur Bor sebanyak 700 titik dan Kelengkapannya oleh PT. Kalangkap pada Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Lahan Gambut (PIPG) di Provinsi Kalimantan Tengah TA 2018 atas nama Tersangka MOHAMMAD SEMAN, S.T yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Palangka Raya.  
Kegiatan: Telah dilakukan fasilitasi Ahli BPKP di persidangan perkara tanggal 27 Agustus 2020 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya.
138. Dugaan TPK berupa penyimpangan pada tata kelola investasi dan kegiatan lainnya yang dijalankan BUMN PT. ASABRI (Persero) Tbk. yang disidik oleh Polda Metro Jaya.  
Kegiatan: Fasilitasi Pemeriksaan Saksi dari Tahanan Kejagung di Ruta Klas 1 Cabang KPK BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT oleh Penyidik Polda Metro Jaya bertempat di Kantor Polda Metro Jaya pada tanggal 4 Agustus 2020.
139. Dugaan TPK berupa penyimpangan pada tata kelola investasi dan kegiatan lainnya yang dijalankan BUMN PT. ASABRI (Persero) Tbk. yang disidik oleh Polda Metro Jaya.  
Kegiatan: Fasilitasi Pemeriksaan Saksi dari Tahanan Kejagung di Ruta Klas 1 Cabang KPK BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT oleh Penyidik Polda Metro Jaya bertempat di Kantor Polda Metro Jaya pada tanggal 7 Agustus 2020.
140. Dugaan TPK berupa penyimpangan pada tata kelola investasi dan kegiatan lainnya yang dijalankan BUMN PT. ASABRI (Persero) Tbk. yang disidik oleh Polda Metro Jaya.  
Kegiatan: Gelar perkara bersama penyidik pada Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya pada tanggal 5 Agustus 2020.
141. Dugaan TPK yang terjadi di PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Jl. Abdul Muis No. 8-10 Jakarta Pusat terkait penjualan daging sapi impor pada tahun 2016 sd tahun 2017 dari PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia kepada PT. Agrochemindo Niagatma Sukses Makmur yang disidik oleh Polda Metro Jaya.  
Kegiatan: Gelar perkara bersama penyidik pada Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya pada tanggal 5 Agustus 2020.
142. Dugaan TPK dalam Pengadaan Jasa Konsultasi Pembuatan Peta Topografi Skala 1 : 1000 dengan Teknologi Light Detection and Ranging (LIDAR) yang disidik oleh Polda Metro Jaya.  
Kegiatan: Gelar perkara bersama penyidik pada Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya pada tanggal 5 Agustus 2020.
143. Dugaan TPK penyalahgunaan keuangan yang berasal dari pembayaran beberapa instansi Pemerintah terkait penyediaan jasa perhotelan di Unit Usaha Grand Cempaka Resort & Convention Hotel salah satu Unit Usaha PT. Jakarta Tourisindo (BUMD) Tahun 2014 s.d. 2015 yang disidik oleh Kejati DKI Jakarta.  
Kegiatan: Gelar perkara bersama penyidik pada Kejagung RI dan Kejati Aceh pada tanggal 11

- Agustus 2020.
144. Dugaan TPK dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2011-2012 pada Bank Jawa Timur Cabang Pembantu Wolter Monginsidi yang disidik oleh Kejati DKI Jakarta.  
Kegiatan: Gelar perkara bersama penyidik pada Kejagung RI dan Kejati Aceh pada tanggal 11 Agustus 2020.
145. Dugaan TPK dalam pengadaan media pembelajaran (Perangkat Keras) Berbasis IT dan Multimedia, pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018.  
Kegiatan: Fasilitasi Penyidik Kejaksaan Tinggi Riau dalam pemeriksaan Ahli Keuangan Negara pada tanggal 10 Juli 2020.
146. Dugaan TPK Kegiatan penataan Taman Pelabuhan Waisai TA 2011 yang ditangani oleh Polres Raja Ampat.  
Kegiatan: Telah dilakukan rapat koordinasi terkait perkembangan penanganan perkara dimaksud antara Penyidik Polres Raja Ampat, Polda Papua Barat, Bareskrim Polri, dan Satgas Penindakan Koorwil VI di Kantor Kepolisian Daerah Papua Barat pada 11 Agustus 2020.
147. Dugaan TPK Belanja Bantuan Sosial Keagamaan (Otsus) untuk Bantuan Ibadah Haji bagi 20 orang Jamaah Haji yang ditangani oleh Polres Kaimana.  
Kegiatan: Telah dilakukan rapat koordinasi terkait perkembangan penanganan perkara dimaksud antara Penyidik Polres Kaimana, Polda Papua Barat, Bareskrim Polri, dan Satgas Penindakan Koorwil VI di Kantor Kepolisian Daerah Papua Barat pada 11 Agustus 2020.
148. Dugaan TPK Pembangunan Gedung Balai Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Kab. Sorong Tahun 2017 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.1.650.000.000 yang ditangani oleh Polres Sorong.  
Kegiatan: Telah dilakukan rapat koordinasi terkait perkembangan penanganan perkara dimaksud antara Penyidik Polres Sorong, Polda Papua Barat, Bareskrim Polri, dan Satgas Penindakan Koorwil VI di Kantor Kepolisian Daerah Papua Barat pada 11 Agustus 2020.
149. Dugaan TPK Kegiatan penataan Taman Pelabuhan Waisai TA 2011 yang ditangani oleh Polres Raja Ampat.  
Kegiatan: Telah dilakukan rapat koordinasi terkait perkembangan penanganan perkara dimaksud antara Jaksa Peneliti Kejari Sorong dan Satgas Penindakan Koorwil VI di Kantor Kejaksaan Negeri Sorong pada 13 Agustus 2020.
150. Dugaan TPK Pembangunan Gedung Balai Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Kab. Sorong Tahun 2017 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.1.650.000.000 yang ditangani oleh Polres Sorong.  
Kegiatan: Telah dilakukan rapat koordinasi

- terkait perkembangan penanganan perkara dimaksud antara Jaksa Peneliti Kejari Sorong dan Satgas Penindakan Koorwil VI di Kantor Kejaksaan Negeri Sorong pada 13 Agustus 2020.
151. Dugaan TPK penyimpangan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban Anggaran/Dana Jasa Pelabuhan di lingkungan PT. Pertamina RU-IV Cilacap Fungsi Marine, an. tersangka Paulus Andrianto, yang ditangani oleh Kejari Cilacap.  
Kegiatan: Telah dilaksanakan kegiatan fasilitasi pencarian orang an. tersangka Paulus Andrianto yang dilaksanakan pada tanggal 2 – 6 Agustus 2020 di wilayah hukum Yogyakarta.
152. Dugaan TPK dalam Pemberian Fasilitas Pembiayaan dari PT. Danareksa Sekuritas kepada Debitur PT. Evio Sekuritas yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Kejagung RI  
Kegiatan: Fasilitasi Penyidik Kejaksaan Agung RI dalam permintaan keterangan sebagai tersangka atas nama MARCIANOHERSONDRIE HERMAN, SE tanggal 6 Agustus 2020.
153. Dugaan TPK dalam pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada beberapa Perusahaan Periode Tahun 2008 sd 2018 an. Tersangka Korporasi PT. Jasa Capital Asset Management yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Kejagung RI.  
Kegiatan: Fasilitasi Penyidik Kejaksaan Agung RI dalam permintaan keterangan sebagai saksi mahkota atas nama HERU HIDAYAT tanggal 7 Agustus 2020.
154. Dugaan TPK dalam pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada beberapa Perusahaan Periode Tahun 2008 sd 2018 an. Tersangka Korporasi PT. Jasa Capital Asset Management yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Kejagung RI.  
Kegiatan: Fasilitasi Penyidik Kejaksaan Agung RI dalam permintaan keterangan sebagai saksi mahkota atas nama HENDRISMAN RAHIM tanggal 7 Agustus 2020.
155. Dugaan TPK dalam Pemberian Fasilitas Pembiayaan dari PT. Danareksa Sekuritas kepada Debitur PT. Aditya Tirta Renata yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Kejagung RI  
Kegiatan: Fasilitasi Penyidik Kejaksaan Agung RI dalam permintaan keterangan sebagai tersangka atas nama ERIZAL, SE Bin SANIDJAR LUDIN tanggal 10 Agustus 2020.
156. Dugaan TPK dalam pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada beberapa Perusahaan Periode Tahun 2008 sd 2018 an. Tersangka Korporasi PT. Jasa Capital Asset Management yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Kejagung RI.  
Kegiatan: Fasilitasi Penyidik Kejaksaan Agung RI

- dalam permintaan keterangan sebagai saksi mahkota atas nama BENNY TJOKROSAPUTRO tanggal 11 Agustus 2020.
157. Dugaan TPK dalam pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada beberapa Perusahaan Periode Tahun 2008 sd 2018 an. Tersangka Korporasi PT. Prospera Asset Management yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Kejagung RI.  
Kegiatan: Fasilitasi Penyidik Kejaksaan Agung RI dalam permintaan keterangan sebagai saksi mahkota atas nama BENNY TJOKROSAPUTRO tanggal 14 Agustus 2020.
158. Dugaan TPK dalam pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada beberapa Perusahaan Periode Tahun 2008 sd 2018 an. Tersangka Korporasi PT. Prospera Asset Management yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Kejagung RI.  
Kegiatan: Fasilitasi Penyidik Kejaksaan Agung RI dalam permintaan keterangan sebagai saksi mahkota atas nama HERU HIDAYAT tanggal 14 Agustus 2020.
159. Dugaan TPK dalam pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada beberapa Perusahaan Periode Tahun 2008 sd 2018 an. Tersangka Korporasi PT. Prospera Asset Management yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Kejagung RI.  
Kegiatan: Fasilitasi Penyidik Kejaksaan Agung RI dalam permintaan keterangan sebagai saksi mahkota atas nama HENDRISMAN RAHIM tanggal 14 Agustus 2020.
160. Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Jasa Kegiatan/Pekerjaan Penimbunan dan Pembuatan Turap Penahan Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang yang menggunakan APBD TA 2017 dengan nilai kontrak Rp12.372.301.000,- yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.  
Kegiatan: Telah dilakukan gelar perkara antara Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Bareskrim Polri, BPK RI, Ahli Teknis Politeknik Negeri Bandung, dan Unit Korwil Penindakan KPK pada tanggal 03 September 2020 di Gedung Merah Putih KPK RI dengan 4 (empat) kesimpulan.
161. Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembayaran Rekening Listrik, Rekening Air dan Telepon yang dibayarkan oleh RSUD Kota Cilegon Tahun 2011, 2012 sampai Bulan Oktober 2013 atas nama Tersangka HENDRAWATI, S.E bin HILAL yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Cilegon.  
Kegiatan: Telah dilakukan gelar perkara antara Penyidik Kepolisian Resor Cilegon, Bareskrim Polri, Kejaksaan Negeri Cilegon, dan Unit Korwil Penindakan KPK pada tanggal 16 September 2020 di Kejaksaan Negeri Cilegon dengan 5

- (lima) kesimpulan.
162. Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Olahraga di Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kota Serang TA 2013 atas nama Tersangka H. NASIR, S.Sos, M.Si yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Banten.  
Kegiatan: Telah dilakukan gelar perkara antara Penyidik Kepolisian Daerah Banten, Bareskrim Polri, Kejaksaan Tinggi Banten dan Unit Korwil Penindakan KPK pada tanggal 17 September 2020 di Kejaksaan Tinggi Banten dengan 7 (tujuh) kesimpulan.
163. Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Olahraga di Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kota Serang TA 2013 atas nama Tersangka SUHARMAN RAHMAT, S.H yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Banten.  
Kegiatan: Telah dilakukan gelar perkara antara Penyidik Kepolisian Daerah Banten, Bareskrim Polri, Kejaksaan Tinggi Banten dan Unit Korwil Penindakan KPK pada tanggal 17 September 2020 di Kejaksaan Tinggi Banten dengan 7 (tujuh) kesimpulan.
164. Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Infrastruktur Pembahasan Lahan Gambut (PIPG) di Provinsi Kalimantan Tengah TA 2018 berupa Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Sumur Bor Model SBO-30-2 sebanyak 700 titik dan Peralatan terkait Pembuatan Sumur Bor dan Kelengkapannya oleh PT. Kalangkap, serta Pembangunan Sumur Bor sebanyak 900 titik dan kelengkapannya oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Terdakwa ARIANTO, S.Hut., M.Si yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Palangka Raya.  
Kegiatan: Telah dilakukan fasilitasi pemanggilan saksi atas nama Kusniyadi di persidangan perkara pada tanggal 24 September 2020 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Kalimantan Tengah.
165. Dugaan TPK dalam Pemberian Fasilitas Pembiayaan dari PT. Danareksa Sekuritas kepada Debitur PT. Aditya Tirta Renata yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Kejagung RI.  
Kegiatan: Fasilitasi Penyidik Kejaksaan Agung RI dalam permintaan keterangan sebagai tersangka atas nama ERIZAL, SE Bin SANIDJAR LUDIN tanggal 7 September 2020.
166. Dugaan TPK dalam Pemberian Fasilitas Pembiayaan dari PT. Danareksa Sekuritas kepada Debitur PT. Aditya Tirta Renata yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Kejagung RI.  
Kegiatan: Fasilitasi Penyidik Kejaksaan Agung RI dalam permintaan keterangan sebagai tersangka atas nama ERIZAL, SE Bin SANIDJAR LUDIN tanggal 8 September 2020.

167. TPK Pemberian dan Penerimaan Hadiah terkait Red Notice atas nama JOKOSOEGIARTO TJANDRA yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Bareskrim Polri.  
Kegiatan: Fasilitasi rekonstruksi perkara dengan total sebanyak 51 (lima puluh satu) adegan telah dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2020.
168. TPK memberi dan menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggaraan Negara yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Kejagung RI.  
Kegiatan: Fasilitasi Penyidik Kejaksaan Agung RI dalam penitipan tahanan atas nama tersangka ANDI IRFAN JAYA tanggal 2 September 2020.
169. TPK memberi dan menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggaraan Negara atas nama Tersangka JOKO SOEGIARTO TJANDRA yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Kejagung RI.  
Kegiatan: Fasilitasi Penyidik Kejaksaan Agung RI dalam permintaan keterangan sebagai saksi atas nama ANDI IRFAN JAYA tanggal 18 September 2020.
170. TPK terkait Red Notice atas nama JOKO SOEGIARTO TJANDRA yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Bareskrim Polri  
Kegiatan: Gelar perkara bersama pada tanggal 11 September 2020 antara Pimpinan KPK, Penyelidik KPK, Penyidik KPK, Jaksa Penuntut Umum KPK, Unit Korwil Bidang Penindakan KPK dan Penyidik Bareskrim Polri.
171. TPK terkait Penerimaan Hadiah atau Janji oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait dengan Pengurusan Fatwa MA sehubungan dengan perkara terpidana an. JOKO SOEGIARTO TJANDRA yang penyidikannya dilakukan oleh Kejagung RI yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik pada Jampidsus Kejagung RI.  
Kegiatan: Gelar perkara bersama pada tanggal 11 September 2020 antara Pimpinan KPK, Penyelidik KPK, Penyidik KPK, Jaksa Penuntut Umum KPK, Unit Korwil Bidang Penindakan KPK dan Penyidik pada Jampidsus Kejagung RI.
172. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Jasa Kegiatan/Pekerjaan Penimbunan dan Pembuatan Turap Penahan Tanah Sungai oleh PT. Palcon Indonesia pada Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang yang menggunakan APBD TA 2017 dengan nilai kontrak Rp12.372.301.000,- yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.  
Kegiatan: Telah dilakukan fasilitasi pemeriksaan fisik turap gelar perkara antara Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Ahli Teknis Politeknik Negeri Bandung, dan Unit Korwil Penindakan KPK pada tanggal 04 – 10 Oktober 2020 di Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
173. Dugaan TPK terhadap pekerjaan pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015. yang disidik oleh Kejari Lombok Timur.  
Kegiatan: Gelar perkara bersama penyidik pada Kejari Lombok Timur, Kejati NTB, dan Jampidsus Kejagung RI 1 Oktober 2020.
174. Dugaan TPK pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKPBPBS) pada Pekerjaan Perencanaan untuk Paket Kegiatan Pembangunan Terminal Pelabuhan Penyeberangan Balohan Sabang Tahun Anggaran 2016 dengan anggaran sebesar Rp 633.975.000,- yang disidik oleh Kejari Sabang.  
Kegiatan: Fasilitasi Pemeriksaan Ahli di persidangan atas nama SUDARMAWAN dari LKPP bertempat di Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh pada tanggal 26 Oktober 2020.
175. Dugaan TPK pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKPBPBS) pada Pekerjaan Perencanaan untuk Paket Kegiatan Pembangunan Terminal Pelabuhan Penyeberangan Balohan Sabang Tahun Anggaran 2016 dengan anggaran sebesar Rp 633.975.000,- yang disidik oleh Kejari Sabang.  
Kegiatan: Fasilitasi Pemeriksaan Ahli di persidangan atas nama AKIB PANDUAEBYANTO dari BPKP RI bertempat di Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh pada tanggal 26 Oktober 2020.
176. Dugaan TPK pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKPBPBS) pada Pekerjaan Perencanaan untuk Paket Kegiatan Pembangunan Terminal Pelabuhan Penyeberangan Balohan Sabang Tahun Anggaran 2016 dengan anggaran sebesar Rp 633.975.000,- yang disidik oleh Kejari Sabang.  
Kegiatan: Fasilitasi Pemeriksaan Ahli di persidangan atas nama SOFYAN LUTHAN dari BPKP Perwakilan Provinsi Aceh bertempat di Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh pada tanggal 26 Oktober 2020.
177. Dugaan tindak pidana korupsi atas penggelapan dana Pajak Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Kota Tanjungpinang yang penyidikannya dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanjungpinang untuk pelaksanaan kegiatan digital forensic.  
Kegiatan: Fasilitasi Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungpinang untuk pelaksanaan kegiatan digital forensic.
178. Dugaan TPK dalam dalam pekerjaan penggantian jembatan air Taba Terunjam di Kabupaten Bengkulu Tengah yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Bengkulu Tengah.  
Kegiatan: Telah dilakukan gelar perkara via Aplikasi Zoom antara Penyidik Kejari Bengkulu Tengah, Aspidsus Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan jajaran serta Unit Korwil Penindakan KPK pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan 3 (tiga) kesimpulan.
179. TPK pada Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Floating Repair) Kapal Negara ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018 yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pontianak.  
Kegiatan: Rapat Koordinasi antara Penyidik Kejari Pontianak, Jaksa pada Jampidsus Kejaksaan Agung RI, Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, dan Satgas Penindakan Koorwil 6 KPK pada 5 Oktober 2020.
180. TPK pada Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Floating Repair) Kapal Negara ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018 yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pontianak.  
Kegiatan: Fasilitasi Auditor Perhitungan Kerugian Negara dari BPKP Provinsi Kalimantan Barat terkait kegiatan klarifikasi terhadap saksi-saksi dalam perkara a quo pada 5 – 9 Oktober 2020.
181. TPK pada Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Floating Repair) Kapal Negara ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018 yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pontianak.  
Kegiatan: Fasilitasi Penyidik Kejari Pontianak terkait kegiatan pemeriksaan ahli Pengadaan Barang dan Jasa dari LKPP pada 6 Oktober 2020.
182. TPK pada Penyimpangan Proyek Pengukuran Tanah Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan TA 2017 yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur.  
Kegiatan: Fasilitasi Rapat Koordinasi antara Penyidik Polda Jawa Timur dan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK terkait pelimpahan dokumen pengaduan masyarakat guna memperkuat pembuktian perkara a quo pada 19 Oktober 2020.
183. Dugaan TPK pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Kepulauan Bangka Belitung.  
Kegiatan: Gelar perkara bersama antara Penyidik Polda Kepulauan Bangka Belitung, BPK RI, Dit Tipidkor Bareskrim Polri, dan Satgas Penindakan Korwil 8 KPK.
184. TPK memberi dan menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggaraan Negara atas nama Tersangka JOKO SOEGIARTO TJANDRA yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Kejagung RI.  
Kegiatan: Fasilitasi Penyidik Kejaksaan Agung RI dalam permintaan keterangan sebagai tersangka atas nama ANDI IRFAN JAYA tanggal 8 Oktober 2020.
185. TPK berupa Penerimaan Hadiah atau Janji atau Gratifikasi oleh Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dari PT. Pelangi Putera Mandiri dan PT. Titanium Property yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Kejagung RI.  
Kegiatan: Fasilitasi Penyidik Kejaksaan Agung RI dalam penitipan tahanan atas nama tersangka YUNAN ANWAR tanggal 6 Oktober 2020.
186. TPK berupa Penerimaan Hadiah atau Janji atau Gratifikasi oleh Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dari PT. Pelangi Putera Mandiri dan PT. Titanium Property yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Kejagung RI.  
Kegiatan: Fasilitasi Penyidik Kejaksaan Agung RI dalam penitipan tahanan atas nama tersangka MARYONO tanggal 6 Oktober 2020.
187. TPK berupa Penerimaan Hadiah atau Janji atau Gratifikasi oleh Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dari PT. Pelangi Putera Mandiri dan PT. Titanium Property yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Kejagung RI.  
Kegiatan: Fasilitasi Penyidik Kejaksaan Agung RI dalam permintaan keterangan sebagai saksi atas nama YUNAN ANWAR tanggal 19 Oktober 2020.
188. TPK berupa Penerimaan Hadiah atau Janji atau Gratifikasi oleh Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dari PT. Pelangi Putera Mandiri dan PT. Titanium Property yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Kejagung RI.  
Kegiatan: Fasilitasi Penyidik Kejaksaan Agung RI dalam permintaan keterangan sebagai saksi atas nama MARYONO tanggal 19 Oktober 2020.
189. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Indikasi Kepentingan Pribadi atas Pemberian Kredit kepada PT Djaya Abadi Soraya sebesar Rp4.500.000.000,- dan kepada CV Cahaya Rezeki sebesar Rp4.210.000.000,- oleh Pimpinan Cabang Bank BJB Tangerang Tahun 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Banten.  
Kegiatan: Telah dilakukan gelar perkara antara Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Agung, BPKP Perwakilan Provinsi Banten, dan Unit Korwil Penindakan KPK pada tanggal 04 November 2020 di Aula Kejaksaan Tinggi Banten dengan 4 (empat) kesimpulan.
190. Dugaan Penyimpangan dalam Pemberian Kredit Pembiayaan Kapal Tanker oleh PT. Holmes sebesar Rp11.000.000.000,- pada Bank BJB Syariah Cabang Tangerang Tahun 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Banten.  
Kegiatan: Telah dilakukan gelar perkara antara Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Agung, BPKP Perwakilan Provinsi Banten, dan Unit Korwil Penindakan KPK pada tanggal 04 November 2020 di Aula Kejaksaan Tinggi Banten dengan 4 (empat) kesimpulan.
191. Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam

- Pembelian Gas Bumi oleh PD.PDE (Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi) oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.  
Kegiatan: Telah dilakukan gelar perkara antara Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, BPK RI, dan Unit Korwil Penindakan KPK pada tanggal 10 November 2020 di Gedung Merah Putih KPK dengan 5 (empat) kesimpulan.
192. Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Jasa Kegiatan/Pekerjaan Penimbunan dan Pembuatan Turab Penahan Tanah Sungai ole PT. Palcon Indonesia pada Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang yang menggunakan APBD TA 2017 dengan nilai kontrak Rp12.372.301.000,- yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.  
Kegiatan: Telah dilakukan penyerahan laporan hasil pemeriksaan fisik turap gelar perkara antara Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Ahli Teknis Politeknik Negeri Bandung, dan Unit Korwil Penindakan KPK pada tanggal 11 November 2020 di Politeknik Negeri Bandung, Provinsi Jawa Barat.
193. Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Jasa Kegiatan/Pekerjaan Penimbunan dan Pembuatan Turab Penahan Tanah Sungai ole PT. Palcon Indonesia pada Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang yang menggunakan APBD TA 2017 dengan nilai kontrak Rp12.372.301.000,- yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.  
Kegiatan: Telah dilakukan fasilitasi pengambilan keterangan Ahli Teknis dari Politeknik Negeri Bandung pada tanggal 11 November 2020 di Politeknik Negeri Bandung, Provinsi Jawa Barat.
194. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Indikasi Kepentingan Pribadi atas Pemberian Kredit kepada PT Djaya Abadi Soraya sebesar Rp4.500.000.000,- dan kepada CV Cahaya Rezeki sebesar Rp4.210.000.000,- oleh Pimpinan Cabang Bank BJB Tangerang Tahun 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Banten.  
Kegiatan: Telah dilakukan fasilitasi pemeriksaan oleh Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Banten tanggal 16 – 18 November di Serang dan Tangerang, Banten.
195. Dugaan Penyimpangan dalam Pemberian Kredit Pembiayaan Kapal Tanker oleh PT. Holmes sebesar Rp11.000.000.000,- pada Bank BJB Syariah Cabang Tangerang Tahun 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Banten.  
Kegiatan: Telah dilakukan fasilitasi pemeriksaan oleh Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Banten tanggal 16 – 18 November di Serang dan Tangerang, Banten.
196. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Indikasi Kepentingan Pribadi atas Pemberian Kredit kepada PT Djaya Abadi Soraya sebesar

- Rp4.500.000.000,- dan kepada CV Cahaya Rezeki sebesar Rp4.210.000.000,- oleh Pimpinan Cabang Bank BJB Tangerang Tahun 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Banten.  
Kegiatan: Telah dilakukan fasilitasi pemeriksaan oleh Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Banten tanggal 23 – 25 November di Bank BJB Kantor Pusat, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
197. Dugaan Penyimpangan dalam Pemberian Kredit Pembiayaan Kapal Tanker oleh PT. Holmes sebesar Rp11.000.000.000,- pada Bank BJB Syariah Cabang Tangerang Tahun 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Banten.  
Kegiatan: Telah dilakukan fasilitasi pemeriksaan oleh Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Banten tanggal 23 – 25 November di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat.
198. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kumuh Kahayang Hilir Kabupaten Pulang Pisau yang Bersumber dari Dana APBN TA 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Pulang Pisau.  
Kegiatan: Telah dilakukan gelar perkara antara Penyidik Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Pidsus Kejagung RI, BPK RI, Ahli Teknis Universitas Lambung Mangkurat, dan Unit Korwil Penindakan KPK pada tanggal 19 November 2020 di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dengan 5 (lima) kesimpulan.
199. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah PDAM Kab. Kapuas TA 2016 s/d 2018 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.  
Kegiatan: Telah dilakukan gelar perkara antara Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Pidsus Kejagung RI, dan Unit Korwil Penindakan KPK pada tanggal 19 November 2020 di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dengan 4 (empat) kesimpulan.
200. Dugaan TPK pada kegiatan perjalanan Dinas ke luar negeri pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2016 yang disidik oleh Polres Minahasa.  
Kegiatan: Gelar perkara bersama penyidik pada Polres Minahasa, Polda Sulut, dan Bareskrim Polri pada tanggal 2 November 2020.
201. Dugaan TPK berupa penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial Unit Sekolah Baru (USB) SMA Tahun Anggaran 2014 dalam pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 2 Beo yang terjadi selang bulan September 2013 s.d. bulan Mei 2014 di Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud yang disidik oleh Polres Talaud.  
Kegiatan: Gelar perkara bersama penyidik pada Polres Talaud, Polda Sulut, dan Bareskrim Polri pada tanggal 2 November 2020.

202. Dugaan TPK Dana kegiatan Rehabilitasi Jalan Ruas Marinsow - Tanjung Pulisan Lokasi Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara dengan nilai kontrak sebesar Rp 6.337.307.000,- APBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2015 di Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kabupaten Minahasa Utara yang disidik oleh Polres Minahasa Utara.  
Kegiatan: Gelar perkara bersama penyidik pada Polres Minut, Polda Sulut, dan Bareskrim Polri pada tanggal 2 November 2020.
203. Dugaan TPK penyimpangan penggunaan Dana APBD Kabupaten Minahasa Selatan untuk pekerjaan konstruksi tembok pengaman pantai Kelurahan Ranoiajo pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan yang disidik oleh Kejari Minahasa Selatan.  
Kegiatan: Gelar perkara bersama penyidik pada Kejari Minsel, Kejati Sulut, dan Jampidsus Kejagung RI pada tanggal 3 November 2020.
204. Dugaan pada pembangunan gedung rawat inap pria dan wanita Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Noongan Tahun Anggaran 2015 yang disidik oleh Kejari Minahasa.  
Kegiatan: Gelar perkara bersama penyidik pada Kejari Minahasa, Kejati Sulut, dan Jampidsus Kejagung RI pada tanggal 3 November 2020.
205. Dugaan TPK pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bitung dalam pekerjaan pengadaan peralatan dan mesin gedung produksi tepung ikan senilai Rp 765.400.000,- yang disidik oleh Kejari Bitung.  
Kegiatan: Gelar perkara bersama penyidik pada Kejari Bitung, Kejati Sulut, dan Jampidsus Kejagung RI pada tanggal 3 November 2020.
206. Dugaan TPK pekerjaan peningkatan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Aertembaga Kota Bitung tahun 2008 yang disidik oleh Kejari Bitung.  
Kegiatan: Gelar perkara bersama penyidik pada Kejari Bitung, Kejati Sulut, dan Jampidsus Kejagung RI pada tanggal 3 November 2020.
207. Dugaan TPK pada pembelian Surat Utang Negara (SUN) atau Surat Berharga pada Bank Sulut Go yang disidik oleh Kejati Sulut.  
Kegiatan: Gelar perkara bersama penyidik pada Kejati Sulut dan Jampidsus Kejagung RI pada tanggal 3 November 2020.
208. Dugaan TPK dalam penyimpangan pengadaan komputer dan aplikasinya pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon tahun 2013 yang disidik oleh Kejari Tomohon.  
Kegiatan: Gelar perkara bersama penyidik pada Kejari Tomohon, Kejati Sulut, dan Jampidsus Kejagung RI pada tanggal 3 November 2020.
209. Dugaan TPK pada Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesenian Marching Band, Belanja Modal dan Belanja Hibah pada Dinas

- Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB Tahun 2017 yang disidik oleh Polda NTB.  
Kegiatan: Gelar perkara bersama penyidik pada Polda NTB dan Bareskrim Polri pada tanggal 26 November 2020.
210. Dugaan TPK pembangunan Dermaga/Jetty/ Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 yang disidik oleh Polda NTB.  
Kegiatan: Gelar perkara bersama penyidik pada Polda NTB dan Bareskrim Polri pada tanggal 26 November 2020.
211. Dugaan TPK Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Manggeasi, Kecamatan Dompnu, Kabupaten Dompnu Tahun Anggaran 2016 yang disidik oleh Polres Dompnu.  
Kegiatan: Gelar perkara bersama penyidik pada Polres Dompnu, Polda NTB, dan Bareskrim Polri pada tanggal 27 November 2020.
212. Dugaan TPK Penyelewengan Dana BOS di SMKN 1 Lunyuk Tahun 2015 yang disidik oleh Polres Sumbawa.  
Kegiatan: Gelar perkara bersama penyidik pada Polres Sumbawa, Polda NTB, dan Bareskrim Polri pada tanggal 27 November 2020.
213. Dugaan TPK Menjual aset tanah milik pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2013 hingga tahun 2015 yang terdaftar kartu inventaris barang (KIB) A dengan kode barang 1.11.02.001 register 0007 tahun pengadaan 2012 yang disidik oleh Polres Sumbawa Barat.  
Kegiatan: Gelar perkara bersama penyidik pada Polres Sumbawa Barat, Polda NTB, dan Bareskrim Polri pada tanggal 27 November 2020.
214. Dugaan TPK paket pekerjaan pengadaan benih bawang merah pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Malaka Tahun ANggaran 2018 dengan nilai kontrak Rp9.680.000.000,00 yang penyidikannya dilakukan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur.  
Kegiatan: Rapat Koordinasi Pertama antara KPK dengan penyidik Polda Nusa Tenggara Timur yang membahas mengenai perkembangan penanganan perkara serta hambatan yang dihadapi dalam penanganan perkara.
215. Dugaan TPK dalam dalam pekerjaan penggantian jembatan air Taba Terunjam di Kabupaten Bengkulu Tengah yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Bengkulu Tengah.  
Kegiatan: Telah dilakukan gelar perkara antara Satgas Penindakan Korwil V KPK, Jampidsus Kejaksaan RI, Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah, BPK RI dan Ahli Konstruksi Politeknik Bandung pada tanggal 12 November 2020 dengan 3 (tiga) kesimpulan.
216. Gelar perkara perkara antara Satgas Penindakan Korwi V, Direktorat Pengaduan



- Masyarakat KPK, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Itjen Kemenag RI terkait pelimpahan dokumen pengaduan masyarakat kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terkait dugaan tindak pidana korupsi pengeluaran dana BOS di Kanwil Kemenag Jawa Barat tahun 2018/2019 yang dituangkan dalam notulensi rapat koordinasi dan Surat Tanda Penyerahan Dokumen (STPED) tanggal 19 November 2020.
217. TPK pada Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Floating Repair) Kapal Negara ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018 yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pontianak.  
Kegiatan: Fasilitasi Penyidik Kejari Pontianak terkait kegiatan pemeriksaan fisik Kapal Negara ALNILAM dengan Ahli klasifikasi kapal dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia dan Auditor BPKP Perwakilan Kalimantan Barat pada 4 November 2020.
218. TPK penggunaan dana hibah pembangunan menara masjid besar Al-Fattah Kec. Sukowono TA. 2013 yang bersumber dari dana APBD TA. 2013 Kab. Jember atas nama Tersangka M. MAHALI FATHORROHMAN dan BAMBANG HADIDARMO yang ditangani oleh Polres Jember.  
Kegiatan: Rapat Koordinasi antara Penyidik Polres Jember, Penyidik Polda Jatim, dan Satgas Penindakan Koorwil 6 KPK pada 17 November 2020.
219. TPK pelaksanaan kegiatan Prona Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jember di Desa Klatakan Kec. Tanggul Kab. Jember Tahun 2013 dan Tahun 2014 atas nama EDY TRIYONO dan WIWID WIDIYANTO yang ditangani oleh Polres Jember.  
Kegiatan: Rapat Koordinasi antara Penyidik Polres Jember, Penyidik Polda Jatim, dan Satgas Penindakan Koorwil 6 KPK pada 17 November 2020.
220. Dugaan TPK pada Kerjasama Operasional (KSO)/Joint Operation antara PDP Kahyangan Jember dengan PT. Nanggala Mitra Lestari dalam Pengelolaan Karet Kebun sebanyak 159.111 kg Tahun 2013 yang ditangani oleh Polres Jember.  
Kegiatan: Rapat Koordinasi antara Penyidik Polres Jember, Penyidik Polda Jatim, dan Satgas Penindakan Koorwil 6 KPK pada 17 November 2020.
221. Dugaan TPK dalam pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Ngimbang-Bluluk pada Dinas PU Binamarga Kab. Lamongan dengan anggaran APBD TA 2015 yang tidak sesuai spesifikasi yang ditangani oleh Polda Jawa Timur.  
Kegiatan: Rapat Koordinasi antara Penyidik Polda Jatim, Bareskrim Polri, dan Satgas Penindakan Koorwil 6 KPK pada 18 November 2020.
222. Dugaan TPK dengan menggunakan keuangan pemerintah Kota Surabaya TA. 2007 sebesar Rp 720.000.000 atas nama Tersangka BAMBANG DWI HARTONO yang ditangani oleh Polda

- Jawa Timur.  
Kegiatan: Rapat Koordinasi antara Penyidik Polda Jatim, Bareskrim Polri, dan Satgas Penindakan Koorwil 6 KPK pada 18 November 2020.
223. Dugaan TPK dalam pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri APBD TA. 2010, 2011, 2012, 2013 atas nama Tersangka AGUS WAHYUDI, SH, M.Si, Ka Bappemas Prov Jatim (Sekretaris Kota Kediri TA. 2011-2014) yang ditangani oleh Polda Jawa Timur.  
Kegiatan: Rapat Koordinasi antara Penyidik Polda Jatim, Bareskrim Polri, dan Satgas Penindakan Koorwil 6 KPK pada 18 November 2020.
224. Dugaan TPK terhadap penggunaan anggaran belanja kursus-kursus singkat (pelatihan) Kode Rekening 120 15 0008 5221601 DPRD Kota Surabaya yang ditangani oleh Polrestabes Surabaya.  
Kegiatan: Rapat Koordinasi antara Penyidik Polda Jatim, Bareskrim Polri, dan Satgas Penindakan Koorwil 6 KPK pada 18 November 2020.
225. Dugaan TPK pembangunan RSUD Dr. Harjono Ponorogo Sumber APBN TA 2009 & 2010 yang terjadi di RSUD Dr. Harjono lama jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Ponorogo atau RSUD Dr. Harjono Ponorogo baru Jalan Raya Ponorogo-Pacitan masuk Kel. Pakunden Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo yang ditangani oleh Polres Ponorogo.  
Kegiatan: Rapat Koordinasi antara Penyidik Polda Jatim, Bareskrim Polri, dan Satgas Penindakan Koorwil 6 KPK pada 18 November 2020.
226. Rapat koordinasi perkembangan penanganan perkara dugaan TPK pembentukan atau pendefinitifan desa tidak sesuai prosedur dengan menggunakan dokumen yang tidak sah sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah atas Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelola pada beberapa desa di Kabupaten Konawe TA 2016, TA 2017, dan TA 2018, yang ditangani Polda Sulawesi Tenggara, pada tanggal 17 November 2020.
227. Rapat koordinasi perkembangan penanganan perkara dugaan TPK yang dilakukan oknum Staf Dinas Diknas Prov. Sultra dengan cara melakukan pemotongan sebagian dana BSM TA 2011 terhadap beberapa Sekolah Dasar se Kab. Buton, yang ditangani oleh Polres Buton, pada tanggal 17 November 2020.
228. Rapat koordinasi perkembangan penanganan perkara dugaan TPK penyalahgunaan dana pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMKN 1 Pakue Tengah Kab. Kolaka Utara TA 2012 pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kab. Kolaka Utara, yang ditangani oleh Polres Kolaka Utara, pada tanggal 17 November 2020.
229. Rapat koordinasi perkembangan penanganan perkara dugaan TPK penyalahgunaan wewenang dalam pengurusan ijin usaha pertambangan batuan di kabupaten kolaka timur tahun 2015-2016, yang penyidikannya

- dilakukan oleh Polres Kolaka, pada tanggal 17 November 2020.
230. Rapat koordinasi perkembangan penanganan perkara dugaan TPK Permintaan dan Pendistribusian Bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual Prov. Maluku Tahun 2016 sampai dengan 2017, yang ditangani Polda Maluku, pada tanggal 25 November 2020.
231. Rapat koordinasi perkembangan penanganan perkara dugaan TPK pengadaan 4 mesin speedboat pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya T.A. 2015, yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Maluku, pada tanggal 25 November 2020.
232. Rapat koordinasi perkembangan penanganan perkara dugaan TPK Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Dunjela - Tempat Wisata Papaliseran) Dak Fisik Afirmasi Bidang Transportasi TA. 2018 Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kab. Kepulauan Aru, yang ditangani oleh Polres Aru, pada tanggal 25 November 2020.
233. Rapat koordinasi perkembangan penanganan perkara dugaan TPPU sehubungan dengan dugaan TPK penyalahgunaan dana kas PT. BPD Maluku - Maluku Utara Cabang Dobo, yang ditangani oleh Polda Maluku, pada tanggal 25 November 2020.
234. Dugaan TPK pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Kepulauan Bangka Belitung.  
Kegiatan: Gelar perkara bersama antara Penyidik Polda Kepulauan Bangka Belitung, BPK RI, Dit Tipidkor Bareskrim Polri, dan Satgas Penindakan Koorwil 8 KPK.
235. Dugaan TPK dalam Proyek Pipanisasi Avtur dan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Makassar ke Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Hasanuddin yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati Sulawesi Selatan.  
Kegiatan: Rapat koordinasi penyelesaian perkara antara Penyidik Kejati Sulawesi Selatan dan Satgas Penindakan Koorwil 8 KPK.
236. Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan dan Penerbitan Sertifikat di Kawasan Hutan Produksi Mapongka Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati Sulawesi Selatan.  
Kegiatan: Rapat koordinasi penyelesaian perkara antara Penyidik Kejati Sulawesi Selatan dan Satgas Penindakan Koorwil 8 KPK.
237. Dugaan TPK pada Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Takalar yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (DITJEN EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2016 dan 2017 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati

- Sulawesi Selatan.  
Kegiatan: Rapat koordinasi penyelesaian perkara antara Penyidik Kejati Sulawesi Selatan dan Satgas Penindakan Koorwil 8 KPK.
238. Dugaan Penyimpangan Pengeluaran Uang Milik PT. Nusantara Terminal Service (Anak Perusahaan PT. Pelindo IV) yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati Sulawesi Selatan.  
Kegiatan: Rapat koordinasi penyelesaian perkara antara Penyidik Kejati Sulawesi Selatan dan Satgas Penindakan Koorwil 8 KPK.
239. Dugaan TPK pembangunan gedung puskesmas batua Tahap I pada Dinas Kesehatan kota Makassar Tahun Anggaran 2018 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Sulawesi Selatan.  
Kegiatan: Rapat koordinasi penyelesaian perkara antara Penyidik Polda Sulawesi Selatan dan Satgas Penindakan Koorwil 8 KPK.
240. Dugaan TPK pekerjaan pembuatan peta topography dengan skala 1:1.000 kawasan perkotaan Barabai dan pemanfaatannya untuk pra desain jalan lingkar barat Kota Barabai di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) Tahun Anggaran 2011 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Hulu Sungai Tengah.  
Kegiatan: Gelar perkara bersama antara Penyidik Polres Hulu Sungai Tengah, Polda Kalimantan Selatan, Dit Tipidkor Bareskrim Polri, dan Satgas Penindakan Koorwil 8 KPK.
241. Dugaan TPK pungli pada pembuatan/penerbitan sertifikat tanah melalui jalur PRONA 2016 kab. Kotabaru yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Kotabaru.  
Kegiatan: Rapat koordinasi penyelesaian perkara antara Penyidik Polres Kotabaru, Polda Kalimantan Selatan, Dit Tipidkor Bareskrim Polri, dan Satgas Penindakan Koorwil 8 KPK.
242. Dugaan TPK penggelapan dana BLSM untuk 10 Desa di Kec. PL. Barat Lontar Kotabaru Tahun 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Kotabaru.  
Kegiatan: Rapat koordinasi penyelesaian perkara antara Penyidik Polres Kotabaru, Polda Kalimantan Selatan, Dit Tipidkor Bareskrim Polri, dan Satgas Penindakan Koorwil 8 KPK.
243. Dugaan TPK penyalahgunaan kekuasaan atas terbitnya Surat Keputusan Pengangkatan CPNS an. Zainul Erfan, SS pada penerimaan CPNS dilingkungan Kantor Wilayah Depag Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2009 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Kalsel.  
Kegiatan: Rapat koordinasi penyelesaian perkara antara Penyidik Polda Kalimantan Selatan, Dit Tipidkor Bareskrim Polri, dan Satgas Penindakan Koorwil 8 KPK.
244. TPK pada Pekerjaan Penataan Bangunan Kawasan Strategi Masjid Raya Sumbang Kota Padang TA 2017 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Kejati Sumatera Barat

Kegiatan: Gelar perkara bersama pada tanggal 25 November 2020 antara Korwil IX KPK, Jampidsus pada Kejaksaan Agung RI dan Penyidik pada Kejati Sumatera Barat.

245. TPK pada pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Gedung Operasi RSUD dr. Adnan WD Tahun 2017 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Kejati Sumatera Barat

Kegiatan: Gelar perkara bersama pada tanggal 25 November 2020 antara Korwil IX KPK, Jampidsus pada Kejaksaan Agung RI dan Penyidik pada Kejati Sumatera Barat.

246. Dugaan TPK dalam pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada beberapa Perusahaan Periode Tahun 2008 sd 2018 an. Tersangka Korporasi PT. GAP Capital yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Kejagung RI.

Kegiatan: Fasilitasi Penyidik Kejaksaan Agung RI dalam permintaan keterangan sebagai saksi mahkota atas nama Hendrisman Rahim tanggal 10 November 2020.

247. Dugaan TPK dalam pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada beberapa Perusahaan Periode Tahun 2008 sd 2018 an. Tersangka Korporasi PT. Jasa Capital yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Kejagung RI.

Kegiatan: Fasilitasi Penyidik Kejaksaan Agung RI dalam permintaan keterangan sebagai saksi mahkota atas nama Hendrisman Rahim tanggal 11 November 2020.

248. Dugaan TPK dalam pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada beberapa Perusahaan Periode Tahun 2008 sd 2018 an. Tersangka Korporasi PT. Millenium Capital yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Kejagung RI.

Kegiatan: Fasilitasi Penyidik Kejaksaan Agung RI dalam permintaan keterangan sebagai saksi mahkota atas nama Hendrisman Rahim tanggal 12 November 2020.

249. Dugaan TPK dalam pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada beberapa Perusahaan Periode Tahun 2008 sd 2018 an. Tersangka Korporasi PT. Pinnacle Persada yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Kejagung RI.

Kegiatan: Fasilitasi Penyidik Kejaksaan Agung RI dalam permintaan keterangan sebagai saksi mahkota atas nama Hendrisman Rahim tanggal 12 November 2020.

250. Dugaan TPK dalam pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada beberapa Perusahaan Periode Tahun 2008 sd 2018 an. Tersangka Korporasi PT. Oso Management yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Kejagung RI.

Kegiatan: Fasilitasi Penyidik Kejaksaan Agung RI dalam permintaan keterangan sebagai saksi mahkota atas nama Hendrisman Rahim tanggal 12 November 2020.

251. Dugaan TPK dalam pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada beberapa Perusahaan Periode Tahun 2008 sd 2018 an. Tersangka Korporasi PT. Sinarmas yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Kejagung RI.

Kegiatan: Fasilitasi Penyidik Kejaksaan Agung RI dalam permintaan keterangan sebagai saksi mahkota atas nama Hendrisman Rahim tanggal 12 November 2020.

252. Dugaan TPK dalam pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada beberapa Perusahaan Periode Tahun 2008 sd 2018 an. Tersangka Korporasi PT. Corfina Capital yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Kejagung RI.

Kegiatan: Fasilitasi Penyidik Kejaksaan Agung RI dalam permintaan keterangan sebagai saksi mahkota atas nama Hendrisman Rahim tanggal 12 November 2020.

253. Dugaan TPK dalam pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada beberapa Perusahaan Periode Tahun 2008 sd 2018 an. Tersangka Korporasi PT. Maybank Asset Management yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Kejagung RI.

Kegiatan: Fasilitasi Penyidik Kejaksaan Agung RI dalam permintaan keterangan sebagai saksi mahkota atas nama Hendrisman Rahim tanggal 26 November 2020.

254. Dugaan TPK dalam pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada beberapa Perusahaan Periode Tahun 2008 sd 2018 an. Tersangka Korporasi PT. Pool Advista yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Kejagung RI.

Kegiatan: Fasilitasi Penyidik Kejaksaan Agung RI dalam permintaan keterangan sebagai saksi mahkota atas nama Hendrisman Rahim tanggal 30 November 2020.

255. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kumuh Kahayang Hilir Kabupaten Pulang Pisau yang Bersumber dari Dana APBN TA 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Pulang Pisau.

Kegiatan: Telah dilakukan gelar perkara antara Perwakilan Pidsus Kejagung RI, Perwakilan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Penyidik Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Tim Auditor BPK RI, dan Ahli Tekhnis dari Universitas Lambung Mangkurat pada tanggal 01 Desember 2020 di Ruang Rapat Lt. 16 Gedung Merah Putih KPK RI dengan 3 (tiga) kesimpulan.

256. Dugaan TPK paket pekerjaan pengadaan benih bawang merah pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Malaka Tahun Anggaran 2018 dengan nilai kontrak Rp9.680.000.000,00 yang penyidikannya dilakukan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur.

Kegiatan: Gelar Perkara Terpadu yang diikuti oleh

Perwakilan dari Bareskrim, Perwakilan dari Pidsus Kejagung RI, Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Penyidik pada Polda Nusa Tenggara Timur, BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur, Ahli Teknis, dan Ahli LKPP.

257. Dugaan TPK Penyalahgunaan dana pembebasan tanah untuk kantor Pemkab Bandung Barat atas nama tersangka ENDANG RAHMAT.

Kegiatan: Koordinasi fasilitasi auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat (Ahli PKKN) dalam sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana pembebasan tanah untuk kantor Pemkab Bandung Barat atas nama terdakwa ENDANG RAHMAT di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 4 November 2020.

258. Dugaan TPK Pembangunan Gedung balai penyuluhan pertanian pada Dinas pertanian Kab. Sorong Tahun 2017 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Sebesar Rp.1.650.000.000 yang ditangani oleh Polres Sorong.

Kegiatan: Rapat Koordinasi antara Penyidik Polres Sorong, Kejari Sorong, Penyidik Polda Papua Barat, dan Satgas Penindakan Koorwil 6 KPK pada 17 Desember 2020.

259. Dugaan TPK kegiatan penataan taman pelabuhan Waisai TA 2011 yang ditangani oleh Polres Raja Ampat.

Kegiatan: Rapat Koordinasi antara Penyidik Polres Raja Ampat, Kejari Sorong, Penyidik Polda Papua Barat, dan Satgas Penindakan Koorwil 6 KPK pada 18 Desember 2020.

260. Dugaan TPK belanja bantuan sosial keagamaan (Otsus) untuk batuan Ibadah Haji bagi 20 orang jamaah Haji yang ditangani oleh Polres Kaimana.

Kegiatan: Rapat Koordinasi antara Penyidik Polda Papua Barat dan Satgas Penindakan Koorwil 6 KPK pada 18 Desember 2020.

261. Dugaan TPK atas pengadaan kapal kargo pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong Selatan yang terjadi pada tahun 2007 berdasarkan kontrak Nomor: 552.2/52/DISHUB-SS/2007 tanggal 12 September 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp 4.404.787.000,00 yang ditangani oleh Polda Papua Barat.

Kegiatan: Rapat Koordinasi antara Penyidik Polda Papua Barat dan Satgas Penindakan Koorwil 6 KPK pada 18 Desember 2020.

262. Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan dan Penerbitan Sertifikat di Kawasan Hutan Produksi Mapongka Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati Sulawesi Selatan.

Kegiatan: Rapat koordinasi bersama Ahli Hukum Agraria dan Ahli Hukum Pidana terkait rencana permintaan keterangan/ pendapat ahli.

263. Dugaan TPK pembangunan gedung puskesmas batua Tahap I pada Dinas Kesehatan kota Makassar Tahun Anggaran

2018 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Sulawesi Selatan

Kegiatan: Rapat koordinasi antara Penyidik Polda Sulawesi Selatan, Auditor BPK RI, dan Satgas Penindakan Korwil 8 KPK terkait rencana pemeriksaan fisik bangunan.

264. Dugaan TPK pembangunan gedung puskesmas batua Tahap I pada Dinas Kesehatan kota Makassar Tahun Anggaran 2018 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Sulawesi Selatan

Kegiatan: Rapat koordinasi antara Satgas Penindakan Korwil 8 KPK dan Ahli Teknik Konstruksi terkait rencana pemeriksaan fisik bangunan.

265. Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan dan Penerbitan Sertifikat di Kawasan Hutan Produksi Mapongka Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati Sulawesi Selatan.

Kegiatan: Fasilitasi Penyidik Kejati Sulawesi Selatan dalam permintaan keterangan/ pendapat Ahli Hukum Agraria.

266. Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan dan Penerbitan Sertifikat di Kawasan Hutan Produksi Mapongka Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati Sulawesi Selatan.

Kegiatan: Fasilitasi Penyidik Kejati Sulawesi Selatan dalam permintaan keterangan/ pendapat Ahli Hukum Pidana.

#### IV. PENYELESAIAN PERKARA SUPERVISI

1. Dugaan TPK kegiatan pengadaan Alkes, Dokter dan KB RSUD dr. RASIDIN Kota Padang Tahun Anggaran 2013 yang terjadi pada Tahun Anggaran 2013 atas nama tersangka Iskandar Hamzah, S.I.P. bin Amir Hamzah, Saiful Palantjui bin Palantjui yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polresta Padang.

Hasil Supervisi: P-21 berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Padang melalui surat Nomor: B-21/L.3.10/Fd.1/01/2020 tanggal 3 Januari 2020.

2. Dugaan TPK kegiatan pengadaan Alkes, Dokter dan KB RSUD dr. RASIDIN Kota Padang Tahun Anggaran 2013 yang terjadi pada Tahun Anggaran 2013 atas nama tersangka dr. Artati Suryani, M.P.H. binti Sudarjo Panoet yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polresta Padang.

Hasil Supervisi: P-21 berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Padang melalui surat Nomor: B-22/L.3.10/Fd.1/01/2020 tanggal 3 Januari 2020.

3. Dugaan TPK kegiatan pengadaan Alkes, Dokter dan KB RSUD dr. RASIDIN Kota Padang Tahun Anggaran 2013 yang terjadi pada Tahun Anggaran 2013 atas nama tersangka Ferry Oktaviano, S.E. bin Soejono yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polresta Padang.

Hasil Supervisi: P-21 berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Padang melalui surat Nomor: B-23/L.3.10/Fd.1/01/2020 tanggal 3 Januari 2020.

4. Dugaan TPK kegiatan pengadaan Alkes, Dokter dan KB RSUD dr. RASIDIN Kota Padang Tahun Anggaran 2013 yang terjadi pada Tahun Anggaran 2013 atas nama tersangka Iskandar Hamzah, S.I.P. bin Amir Hamzah, Saiful Palantjui bin Palantjui yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polresta Padang.

Hasil Supervisi: Tahap 2 berdasarkan surat Kepala Kepolisian Resor Kota Padang melalui surat Nomor: R/07/I/2020/Reskrim tanggal 7 Januari 2020.

5. Dugaan TPK kegiatan pengadaan Alkes, Dokter dan KB RSUD dr. RASIDIN Kota Padang Tahun Anggaran 2013 yang terjadi pada Tahun Anggaran 2013 atas nama tersangka dr. Artati Suryani, M.P.H. binti Sudarjo Panoet yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polresta Padang.

Hasil Supervisi: Tahap 2 berdasarkan surat Kepala Kepolisian Resor Kota Padang melalui surat Nomor: R/09/I/2020/Reskrim tanggal 7 Januari 2020.

6. Dugaan TPK kegiatan pengadaan Alkes, Dokter dan KB RSUD dr. RASIDIN Kota Padang Tahun Anggaran 2013 yang terjadi pada Tahun Anggaran 2013 atas nama tersangka Ferry Oktaviano, S.E. bin Soejono yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polresta Padang.

Hasil Supervisi: Tahap 2 berdasarkan surat Kepala Kepolisian Resor Kota Padang melalui surat Nomor: R/08/I/2020/Reskrim tanggal 7 Januari 2020.

7. Dugaan TPK berupa penerimaan hadiah atau janji terkait penanganan perkara penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP atas nama terdakwa RAYMOND RAWUNG dan HARRY SUWANDA yang dilakukan penuntutan di PN Jakarta Barat yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung RI atas nama tersangka YSP.

Hasil Supervisi: P-21 pada tanggal 21 November 2019

8. Dugaan TPK berupa penerimaan hadiah atau janji terkait penanganan perkara penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP atas nama terdakwa RAYMOND RAWUNG dan HARRY SUWANDA yang dilakukan penuntutan di PN Jakarta Barat yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung RI atas nama tersangka YH.

Hasil Supervisi: P-21 pada tanggal 21 November 2019

9. Dugaan TPK berupa penerimaan hadiah atau janji terkait penanganan perkara penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP atas nama terdakwa RAYMOND RAWUNG dan HARRY SUWANDA yang dilakukan penuntutan di PN Jakarta Barat yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung RI atas nama tersangka AWS.

Hasil Supervisi: P-21 pada tanggal 21 November 2019.

10. Dugaan TPK berupa penerimaan hadiah atau janji terkait penanganan perkara Tindak Pidana Kepabeanan atas nama terdakwa

Surya Soedarma bin Lie Tjek Jauw yang penuntutannya di PN Semarang tahun 2019 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung RI atas nama tersangka K Hasil Supervisi: P-21 pada tanggal 20 November 2019.

11. Dugaan TPK berupa penerimaan hadiah atau janji terkait penanganan perkara Tindak Pidana Kepabeanan atas nama terdakwa Surya Soedarma bin Lie Tjek Jauw yang penuntutannya di PN Semarang tahun 2019 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung RI atas nama tersangka BC Hasil Supervisi: P-21 pada tanggal 19 November 2019.

12. Dugaan TPK berupa penerimaan hadiah atau janji terkait penanganan perkara Tindak Pidana Kepabeanan atas nama terdakwa Surya Soedarma bin Lie Tjek Jauw yang penuntutannya di PN Semarang tahun 2019 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung RI atas nama tersangka RE Hasil Supervisi: P-21 pada tanggal 20 November 2019

13. Dugaan TPK berupa penerimaan hadiah atau janji terkait penanganan perkara penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP atas nama terdakwa RAYMOND RAWUNG dan HARRY SUWANDA yang dilakukan penuntutan di PN Jakarta Barat yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung RI atas nama tersangka YSP. Hasil Supervisi: telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU pada tanggal 21 November 2019.

14. Dugaan TPK berupa penerimaan hadiah atau janji terkait penanganan perkara penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP atas nama terdakwa RAYMOND RAWUNG dan HARRY SUWANDA yang dilakukan penuntutan di PN Jakarta Barat yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung RI atas nama tersangka YH. Hasil Supervisi: telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU pada tanggal 21 November 2019.

15. Dugaan TPK berupa penerimaan hadiah atau janji terkait penanganan perkara penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP atas nama terdakwa RAYMOND RAWUNG dan HARRY SUWANDA yang dilakukan penuntutan di PN Jakarta Barat yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung RI atas nama tersangka AWS. Hasil Supervisi: telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU pada tanggal 21 November 2019.

16. Dugaan TPK berupa penerimaan hadiah atau janji terkait penanganan perkara Tindak Pidana Kepabeanan atas nama terdakwa Surya Soedarma bin Lie Tjek Jauw yang penuntutannya di PN Semarang tahun 2019 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung RI atas nama tersangka K Hasil Supervisi: telah dilakukan penyerahan

tersangka dan barang bukti kepada JPU pada tanggal 21 November 2019.

17. Dugaan TPK berupa penerimaan hadiah atau janji terkait penanganan perkara Tindak Pidana Kepabeanan atas nama terdakwa Surya Soedarma bin Lie Tjek Jauw yang penuntutannya di PN Semarang tahun 2019 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung RI atas nama tersangka BC Hasil Supervisi: telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU pada tanggal 21 November 2019

18. Dugaan TPK berupa penerimaan hadiah atau janji terkait penanganan perkara Tindak Pidana Kepabeanan atas nama terdakwa Surya Soedarma bin Lie Tjek Jauw yang penuntutannya di PN Semarang tahun 2019 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung RI atas nama tersangka RE Hasil Supervisi: telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU pada tanggal 21 November 2019

19. Dugaan TPK pengelolaan dana Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari perkantoran, belanja barang operasional lainnya, pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja barang untuk persediaan barang konsumsi, belanja sewa di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Seni dan Budaya Yogyakarta TA. 2015 dan TA 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda DIY. Hasil Supervisi: Berkas perkara An. Terdakwa AGUNG NUGROHO ENDRO PRASETYO, SE., MM. Bin BAMBANG PURNOMO dinyatakan inkraht berdasarkan Salinan putusan dari Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Yyk Tanggal 23 Januari 2020.

20. Dugaan TPK pengelolaan dana Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari perkantoran, belanja barang operasional lainnya, pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja barang untuk persediaan barang konsumsi, belanja sewa di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Seni dan Budaya Yogyakarta TA. 2015 dan TA 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda DIY. Hasil Supervisi: Berkas perkara An. Terdakwa BONDAN SUPARNO, ST.MED Bin YOSO WIHARJO dinyatakan telah putus berdasarkan Salinan putusan dari Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Yyk Tanggal 16 Januari 2020.

21. Dugaan TPK pengelolaan dana Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari perkantoran, belanja

barang operasional lainnya, pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja barang untuk persediaan barang konsumsi, belanja sewa di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Seni dan Budaya Yogyakarta TA. 2015 dan TA 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda DIY. Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama NIRMALASARI S.Pd.I als. MALA binti ABD. LATIF telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Polewali Mandar Nomor B-761/P.4.29/Ft.1/10/2019 tanggal 20 Oktober 2019.

25. Dugaan TPK pada Pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang bersumber dari APBN TA. 2015 dan 2016 Periode Januari-April 2016 dan Dana BOMM/SSM (Bantuan Operasional Manajemen Mutu - Subsidi Sekolah Menengah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat disidik oleh Polres Polewali Mandar Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama NIRMALASARI S.Pd.I als. MALA binti ABD. LATIF telah diserahkan kepada JPU (Tahap II) pada tanggal 21 Januari 2020.

26. Dugaan TPK pada Pengelolaan Dana

barang operasional lainnya, pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja barang untuk persediaan barang konsumsi, belanja sewa di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Seni dan Budaya Yogyakarta TA. 2015 dan TA 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda DIY. Hasil Supervisi: Berkas perkara An. Terdakwa SALAMUN, SE., MBA., Ph.D Bin JARWO SUMARNO dinyatakan inkraht berdasarkan Salinan putusan dari Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Yyk Tanggal 13 Januari 2020.

22. Dugaan TPK Penggelapan Dana Marbot Mesjid di Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2018 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Lombok Tengah. Hasil Supervisi: Berkas perkara An. Terdakwa KAMARUDIN dinyatakan inkraht berdasarkan Salinan putusan dari Panitera Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr Tanggal 21 November 2019.

23. Dugaan TPK pada Pengadaan Sandang dan Pangan Tahap II pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2014 atas nama TSK SYAHMAT yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda NTB. Hasil Supervisi: Berkas perkara An. Terdakwa SYAHMAT dinyatakan telah putus berdasarkan Salinan putusan dari Panitera Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr Tanggal 11 September 2019

24. Dugaan TPK pada Pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang bersumber dari APBN TA. 2015 dan 2016 Periode Januari-April 2016 dan Dana BOMM/SSM (Bantuan Operasional Manajemen Mutu - Subsidi Sekolah Menengah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat yang disidik oleh Polres Polewali Mandar Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama NIRMALASARI S.Pd.I als. MALA binti ABD. LATIF telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Polewali Mandar Nomor B-761/P.4.29/Ft.1/10/2019 tanggal 20 Oktober 2019.

25. Dugaan TPK pada Pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang bersumber dari APBN TA. 2015 dan 2016 Periode Januari-April 2016 dan Dana BOMM/SSM (Bantuan Operasional Manajemen Mutu - Subsidi Sekolah Menengah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat disidik oleh Polres Polewali Mandar Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama NIRMALASARI S.Pd.I als. MALA binti ABD. LATIF telah diserahkan kepada JPU (Tahap II) pada tanggal 21 Januari 2020.

26. Dugaan TPK pada Pengelolaan Dana

- BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang bersumber dari APBN TA. 2015 dan 2016 Periode Januari-April 2016 dan Dana BOMM/SSM (Bantuan Operasional Manajemen Mutu - Subsidi Sekolah Menengah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat yang disidik oleh Polres Polewali Mandar
- Hasil Supervisi: Berkas Perkara atas nama MUHAMMAD SIDIQ, S.Pd bin H. M. TALIB telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Polewali Mandar Nomor B-765/P.4.29/Ft.1/10/2019 tanggal 20 Oktober 2019.
27. Dugaan TPK pada Pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang bersumber dari APBN TA. 2015 dan 2016 Periode Januari-April 2016 dan Dana BOMM/SSM (Bantuan Operasional Manajemen Mutu - Subsidi Sekolah Menengah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat disidik oleh Polres Polewali Mandar
- Hasil Supervisi: Berkas Perkara atas nama MUHAMMAD SIDIQ, S.Pd bin H. M. TALIB telah diserahkan kepada JPU (Tahap II) pada tanggal 21 Januari 2020.
28. Dugaan TPK pada Pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang bersumber dari APBN TA. 2015 dan 2016 Periode Januari-April 2016 dan Dana BOMM/SSM (Bantuan Operasional Manajemen Mutu - Subsidi Sekolah Menengah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat yang disidik oleh Polres Polewali Mandar
- Hasil Supervisi: Berkas Perkara atas nama ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag bin HEIN TAKINTA telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Polewali Mandar Nomor B-767/P.4.29/Ft.1/10/2019 tanggal 20 Oktober 2019.
29. Dugaan TPK pada Pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang bersumber dari APBN TA. 2015 dan 2016 Periode Januari-April 2016 dan Dana BOMM/SSM (Bantuan Operasional Manajemen Mutu - Subsidi Sekolah Menengah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat disidik oleh Polres Polewali Mandar
- Hasil Supervisi: Berkas Perkara atas nama ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag bin HEIN TAKINTA telah diserahkan kepada JPU (Tahap II) pada tanggal 21 Januari 2020.
30. Dugaan TPK pada Pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang bersumber dari APBN TA. 2015 dan 2016 Periode Januari-April 2016 dan Dana BOMM/SSM (Bantuan Operasional Manajemen Mutu - Subsidi Sekolah Menengah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat yang disidik oleh Polres Polewali Mandar
- Hasil Supervisi: Berkas Perkara atas nama YUSNAENI S.Pd als. IJA binti ZAINUDDIN telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Polewali Mandar Nomor B-766/P.4.29/Ft.1/10/2019 tanggal 20 Oktober 2019.
31. Dugaan TPK pada Pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang bersumber dari APBN TA. 2015 dan 2016 Periode Januari-April 2016 dan Dana BOMM/SSM (Bantuan Operasional Manajemen Mutu - Subsidi Sekolah Menengah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat disidik oleh Polres Polewali Mandar
- Hasil Supervisi: Berkas Perkara atas nama YUSNAENI S.Pd als. IJA binti ZAINUDDIN telah diserahkan kepada JPU (Tahap II) pada tanggal 21 Januari 2020.
32. Dugaan TPK Penyimpangan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Simeulue TA 2002 S/D 2012 Pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue atas nama Tersangka Darmili yang disidik oleh Kejati Aceh.
- Hasil Supervisi: Putusan PN Banda Aceh Nomor: 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna tanggal 20 Desember 2019.
33. Dugaan TPK Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik di Lingkungan VII Kel. Sei Berombang Kec. Panai Hilir yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai kontrak Rp. 990.900.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu yang disidik oleh Kejari Labuhanbatu.
- Hasil Supervisi: SP3 berdasarkan Surat Perintah Kajari Labuhanbatu Nomor : Print-05/N.2.16.4/Fd.1/10/2019 tanggal 25 Oktober 2019.
34. Dugaan TPK Pengadaan Tiang Octagonal 9 M dan Pemasangan Jaringan Serta Trafo untuk Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dari Jln. Sirandorung dan Pasar Glugur Kec. Rantau Utara DHI: Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Jln. Gatot Subroto, Jln. Bina Raga, Jln. Cut Nyak Dien, Jln. Imam Bonjol, dan Jln. Agus Salim Kec. Rantau Utara yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 662.500.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu yang disidik oleh Kejari Labuhanbatu.
- Hasil Supervisi: SP3 berdasarkan Surat Perintah Kajari Labuhanbatu Nomor : Print-06/N.2.16.4/Fd.1/10/2019 tanggal 25 Oktober 2019.
35. Dugaan TPK terkait pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Daftar Ulang Ijin Gangguan pada Perusahaan Perorangan dengan nama Perusahaan Dunia Service Tahun 2017 pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan atas nama Tersangka Nurlina yang disidik oleh Polda Sumatera Utara.
- Hasil Supervisi: SP3 berdasarkan Surat Perintah Dirreskrimsus Polda Sumatera Utara Nomor : Sprin.Sidik/192.a/XI/2019/Ditreskrimsus tanggal 6 November 2019.
36. Dugaan TPK dalam kegiatan peningkatan/pelebaran Jalan Kabanjahe-Kutabuluh pada Kementerian Pekerjaan Umum Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Medan TA 2013 dan 2014 (Multi Years) atas nama Tersangka alm. Ir. Hermansyah yang disidik oleh Polda Sumatera Utara.
- Hasil Supervisi: SP3 berdasarkan Surat Perintah Dirreskrimsus Polda Sumatera Utara Nomor : SPRIN/186.d/X/2019/Ditreskrimsus tanggal 22 Oktober 2019.
37. Dugaan TPK pada kegiatan penyelesaian Pembangunan WTP III dan Pemasangan Pipa Distribusi Utama sepanjang 600 meter di lokasi WTP Beting Semelur PDAM Tirta Kualo Kota Tanjung Balai Sumber Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2012-2014 dengan pagu Rp. 11.000.000.000 (sebelas milyar rupiah) atas nama tersangka Oktavia Sihombing yang disidik oleh Polda Sumatera Utara.
- Hasil Supervisi: P-21 berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui surat Nomor : B-5857/L.2.5/Ft.1/12/2019 tanggal 16 Desember 2019.
38. Dugaan TPK pada kegiatan penyelesaian Pembangunan WTP III dan Pemasangan Pipa Distribusi Utama sepanjang 600 meter di lokasi WTP Beting Semelur PDAM Tirta Kualo Kota Tanjung Balai Sumber Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2012-2014 dengan pagu Rp. 11.000.000.000 (sebelas milyar rupiah) atas nama tersangka Zaharuddin Sinaga, SE yang disidik oleh Polda Sumatera Utara.
- Hasil Supervisi: P-21 berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui surat Nomor : B-5859/L.2.5/Ft.1/12/2019 tanggal 16 Desember 2019.
39. Dugaan TPK pada kegiatan penyelesaian Pembangunan WTP III dan Pemasangan Pipa Distribusi Utama sepanjang 600 meter di lokasi WTP Beting Semelur PDAM Tirta Kualo Kota Tanjung Balai Sumber Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2012-2014 dengan pagu Rp. 11.000.000.000 (sebelas milyar rupiah) atas nama tersangka Herianto, SE yang disidik oleh Polda Sumatera Utara.
- Hasil Supervisi: P-21 berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui surat Nomor : B-5858/L.2.5/Ft.1/12/2019 tanggal 16 Desember 2019.
40. Dugaan TPK penyimpangan penyaluran dana bantuan khusus desa dari BPKAD Kabupaten Bengkayang kepada Kepala Desa di wilayah Kabupaten Bengkayang yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017 atas nama tersangka ROBERTA IKA, yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Kalimantan Barat.
- Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama ROBERTA IKA telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Nomor B-361/O.1.5/02/2020 tanggal 6 Februari 2020.
41. Dugaan TPK penyimpangan penyaluran dana bantuan khusus desa dari BPKAD Kabupaten Bengkayang kepada Kepala Desa di wilayah Kabupaten Bengkayang yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017 atas nama tersangka BENEDIKTUS BASUNI, yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Kalimantan Barat.
- Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama BENEDIKTUS BASUNI telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Nomor B-362/O.1.5/02/2020 tanggal 6 Februari 2020.
42. Dugaan TPK Pada Kegiatan Pemberian Bantuan Keuangan Desa (Dana Desa) TA 2016 di Desa Pulopanjang Kec. Puloampel Kab. Serang Prov. Banten atas nama Tersangka SUKARI Bin SUEB yang penyidikannya dilakukan oleh Polres Cilegon.
- Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama SUKARI BIN SUEB telah Inkracht berdasarkan Putusan dari Pengadilan Negeri Serang Nomor 13/Pid. Sus-TPK/2019/PN.Srg
43. Dugaan TPK dan atau TPPU pada kegiatan pembebasan lahan Rumah Potong Unggas (RPU) Tahun Anggaran 2015 pada SKPD Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Balikpapan, atas nama terdakwa Rusdiana, yang penyidikannya ditangani Polda Kalimantan Timur.
- Kegiatan: Berkas perkara atas nama terdakwa Rusdiana telah diputus oleh Pengadilan Tipikor pada PN Samarinda pada tanggal 17 Desember 2019 dengan putusan berupa hukuman penjara 8 (delapan) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
44. Dugaan TPK dan atau TPPU pada kegiatan pembebasan lahan Rumah Potong Unggas (RPU) Tahun Anggaran 2015 pada SKPD Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Balikpapan, atas nama tersangka Abdulloh, S.Sos. Bin Nawani (Alm) yang penyidikannya ditangani Polda Kalimantan Timur.
- Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka Abdulloh, S.Sos. Bin Nawani (Alm) telah dihentikan penyidikannya (SP3) berdasarkan Surat Dirreskrimsus Polda Kalimantan Timur Nomor: B/49.b/XII/RES.3.3/2019/Ditreskrimsus tanggal 24 Desember 2019 perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tsk.

- Abdulloh, S.Sos. Bin Nawani (Alm).
45. Dugaan TPK Penyimpangan Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) Bontang Tahun Anggaran 2014 dan 2015, atas nama tersangka Dandy Prio Anggono, S.Sos., yang penyidikannya dilakukan oleh Kejari Bontang.  
Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka Dandy Prio Anggono, S.Sos. telah dinyatakan lengkap (P-21).
46. Dugaan TPK dan atau TPPU pada kegiatan pembebasan lahan Rumah Potong Uggas (RPU) Tahun Anggaran 2015 pada SKPD Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Balikpapan, atas nama tersangka Abdul Yajid, yang penyidikannya ditangani oleh Polda Kaltim.  
Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka Abdul Yajid telah dinyatakan lengkap (P-21).
47. Dugaan TPK dan atau TPPU pada kegiatan pembebasan lahan Rumah Potong Uggas (RPU) Tahun Anggaran 2015 pada SKPD Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Balikpapan, atas nama tersangka Abdul Yajid, yang penyidikannya ditangani oleh Polda Kaltim.  
Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka Abdul Yajid telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada PN Samarinda (Tahap II).
48. Dugaan TPK Penyalahgunaan dana APBD Kabupaten Pulau Morotai TA 2015 sehubungan dengan proyek pembangunan gedung rawat jalan tahap I Dana Alokasi Umum (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai TA 2015 yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Maluku Utara.  
Hasil Supervisi: Berkas Perkara atas nama Charles Benawa dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Nomor B-989/Q.2.1/Ft.1/08/2019 tanggal 08/08/2019.
49. Dugaan TPK Penyalahgunaan dana APBD Kabupaten Pulau Morotai TA 2015 sehubungan dengan proyek pembangunan gedung rawat jalan tahap I Dana Alokasi Umum (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai TA 2015 yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Maluku Utara.  
Hasil Supervisi: Berkas Perkara atas nama Guntur A. Borneo, Amd., TS dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Nomor B-989/Q.2.1/Ft.1/08/2019 tanggal 08/08/2019.
50. Dugaan TPK Penyalahgunaan dana APBD Kabupaten Pulau Morotai TA 2015 sehubungan dengan proyek pembangunan gedung rawat jalan tahap I Dana Alokasi Umum (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai TA 2015 yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Maluku Utara.  
Hasil Supervisi: Berkas Perkara atas nama Charles Benawa telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara berdasarkan Surat Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Nomor: T/337/III/RES.3.5/2019/ Ditreskrimsus tanggal 21 Maret 2019.
51. Dugaan TPK Penyalahgunaan dana APBD Kabupaten Pulau Morotai TA 2015 sehubungan dengan proyek pembangunan gedung rawat jalan tahap I Dana Alokasi Umum (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai TA 2015 yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Maluku Utara.  
Hasil Supervisi: Berkas Perkara atas nama Guntur A. Borneo, Amd., TS telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara berdasarkan Surat Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Nomor: T/336/III/RES.3.5/2019/Ditreskrimsus tanggal 21 Maret 2019.
52. Dugaan TPK Penyalahgunaan dana APBD Kabupaten Pulau Morotai TA 2015 sehubungan dengan proyek pembangunan gedung rawat jalan tahap I Dana Alokasi Umum (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai TA 2015 yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Maluku Utara.  
Hasil Supervisi: Perkara atas nama Charles Benawa telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Ternate dengan Nomor Putusan: 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte tanggal 28 Januari 2020.
53. Dugaan TPK Penyalahgunaan dana APBD Kabupaten Pulau Morotai TA 2015 sehubungan dengan proyek pembangunan gedung rawat jalan tahap I Dana Alokasi Umum (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai TA 2015 yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Maluku Utara.  
Hasil Supervisi: Perkara atas nama Charles Benawan telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Ternate dengan Nomor Putusan: 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte tanggal 28 Januari 2020.
54. Dugaan TPK pembangunan Lembaga Perasyarakatan Dharmasraya TA 2014 yang menggunakan APBNTA 2014 pada Kementrian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Barat atas nama Tersangka Ir. Gunawan yang disidik oleh Polres Dharmasraya.  
Hasil Supervisi: P-21 berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui surat Nomor : B-1246/L.3.24/Ft.1/11/2019 tanggal 19 November 2019.
55. Dugaan TPK pembangunan Lembaga Perasyarakatan Dharmasraya TA 2014 yang menggunakan APBNTA 2014 pada Kementrian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Barat atas nama Tersangka Ir. Gunawan yang disidik oleh Polres Dharmasraya.  
Hasil Supervisi: Limpah ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang berdasarkan surat Nomor : B-1286/L.3.24/Ft.1/11/2019 tanggal 29 November 2019.
56. Dugaan TPK Penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah di Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012 dan 2013 atas nama Tersangka Nasdini Indriani yang disidik oleh Kejaksaan Negeri Pariaman  
Hasil Supervisi: P-21 berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman melalui surat Nomor : B-2138/L.3.13/Fd.1/12/2019 tanggal 31 Desember 2019.
57. Dugaan TPK Penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah di Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012 dan 2013 atas nama Tersangka Nasdini Indriani yang disidik oleh Kejaksaan Negeri Pariaman  
Hasil Supervisi: Tahap 2 berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman melalui surat Nomor : Print-207/L.3.13/Ft.1/02/2020 tanggal 14 Februari 2020.
58. Dugaan TPK Penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah di Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012 dan 2013 atas nama Tersangka Rusli Tanjung yang disidik oleh Kejaksaan Negeri Pariaman  
Hasil Supervisi: P-21 berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman melalui surat Nomor : B-415/L.3.13/Fd.1/02/2020 tanggal 6 Februari 2020.
59. Dugaan TPK Penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah di Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012 dan 2013 atas nama Tersangka Rusli Tanjung yang disidik oleh Kejaksaan Negeri Pariaman  
Hasil Supervisi: Tahap 2 berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman melalui surat Nomor : Print-181/L.3.13/Ft.1/02/2020 tanggal 11 Februari 2020.
60. Dugaan TPK terkait Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok dengan menggunakan Anggaran APBN-P Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang atas nama Tersangka ABDURRAHIM KASIM DJOU BIN MUHAMMAD KASIM DJOU.  
Posisi sebelum supervisi: Telah dilakukan pengiriman tersangka dan barang bukti (Tahap II) ke Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka tanggal 10 Juli 2019.  
Hasil supervisi : Berkas perkara an. Tersakwa ABDURRAHIM KASIM DJOU BIN MUHAMMAD KASIM DJOU dinyatakan inkracht berdasarkan salinan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor: Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR.
61. Dugaan TPK penyimpangan penyaluran dana bantuan khusus desa dari BPKAD Kabupaten Bengkayang kepada Kepala Desa di wilayah Kabupaten Bengkayang yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017 atas nama tersangka ROBERTA IKA, yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Kalimantan Barat.  
Posisi sebelum supervisi: Berkas perkara atas nama ROBERTA IKA telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Nomor B-361/O.1.5/02/2020 tanggal 6 Februari 2020.  
Hasil supervisi : Telah dilakukan pengiriman tersangka dan barang bukti terhadap berkas perkara atas nama ROBERTA IKA berdasarkan surat Nomor R/09/III/RES.3.5/2020/ Ditreskrimsus-3 tanggal 3 Maret 2020.
62. Dugaan TPK penyimpangan penyaluran dana bantuan khusus desa dari BPKAD Kabupaten Bengkayang kepada Kepala Desa di wilayah Kabupaten Bengkayang yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017 atas nama tersangka BENEDIKTUS BASUNI, yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Kalimantan Barat.  
Posisi sebelum supervisi: Berkas perkara atas nama BENEDIKTUS BASUNI telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Nomor B-362/O.1.5/02/2020 tanggal 6 Februari 2020.  
Hasil supervisi: Telah dilakukan pengiriman tersangka dan barang bukti terhadap berkas perkara atas nama BENEDIKTUS BASUNI berdasarkan surat Nomor R/08/III/RES.3.5/2020/Ditreskrimsus-3 tanggal 3 Maret 2020.
63. Dugaan TPK penyimpangan pada pelaksanaan pembangunan Masjid Agung Melawi sumber dana APBD Kab. Melawi Tahun Anggaran 2012 – 2015 atas nama terlapor ABANG TAJUDIN, yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Kalimantan Barat.  
Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan. Telah dilaksanakan gelar perkara antara Penyidik Polda Kalimantan Barat, Bareskrim Polri, BPK RI, dan Satgas Penindakan Korwil 4 KPK pada 19 Juni 2019, Fasilitasi pemeriksaan fisik (21 – 27 Juli 2019), Fasilitasi permintaan Ahli Teknik Konstruksi (12 September 2019 dan 28 Oktober 2019), Fasilitai Ahli Keuangan Negara (13 September 2019).  
Hasil supervisi: Berkas perkara atas nama ABANG TAJUDIN telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Nomor B-541/O.1.5/ Ft.1/02/2020 tanggal 26 Februari 2020.
64. Dugaan TPK penyimpangan pada pelaksanaan pembangunan Masjid Agung Melawi sumber dana APBD Kab. Melawi Tahun Anggaran 2012 – 2015 atas nama terlapor KUSMAHENDRI, yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Kalimantan Barat.  
Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan. Telah dilaksanakan gelar perkara antara Penyidik Polda Kalimantan Barat, Bareskrim Polri, BPK RI, dan Satgas Penindakan Korwil 4 KPK pada 19 Juni 2019, Fasilitasi pemeriksaan fisik (21 – 27 Juli 2019), Fasilitasi permintaan Ahli Teknik Konstruksi (12 September 2019 dan 28 Oktober 2019), Fasilitai Ahli Keuangan Negara (13 September 2019).

Hasil supervisi: Berkas perkara atas nama KUSMAHENDRI telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Nomor B-540/O.1.5/Ft.1/02/2020 tanggal 26 Februari 2020.

65. Dugaan TPK penyimpangan pada pelaksanaan pembangunan Masjid Agung Melawi sumber dana APBD Kab. Melawi Tahun Anggaran 2012 – 2015 atas nama terlapor PAKANUDIN, yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Kalimantan Barat.

Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan. Telah dilaksanakan gelar perkara antara Penyidik Polda Kalimantan Barat, Bareskrim Polri, BPK RI, dan Satgas Penindakan Korwil 4 KPK pada 19 Juni 2019, Fasilitas pemeriksaan fisik (21 – 27 Juli 2019), Fasilitas permintaan Ahli Teknik Konstruksi (12 September 2019 dan 28 Oktober 2019), Fasilitas Ahli Keuangan Negara (13 September 2019).

Hasil supervisi: Berkas perkara atas nama PAKANUDIN telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Nomor B-542/O.1.5/Ft.1/02/2020 tanggal 26 Februari 2020.

66. Dugaan TPK Penyimpangan dalam Kegiatan Pemutakhiran Data Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2008 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Klaten.

Posisi sebelum supervisi: Telah dilakukan gelar perkara antara Penyidik pada Kejari Klaten dan Unit Koorsup Penindakan KPK pada tanggal 19 Juni 2019 dengan 10 (sepuluh) kesimpulan dan 2 (dua) rekomendasi.

Hasil Supervisi: Telah dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas nama Prof. Dr. Tech. Ir. Danang Parikesit, M.Sc berdasarkan Nomor PRINT-1924/M.3.19/Fd.1/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019.

67. Dugaan TPK pada pengelolaan APBDDes Desa Jeruklegi Kulon Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Cilacap

Posisi sebelum supervisi: Telah dilakukan gelar perkara antara Jaksa pada Kejari Cilacap, Jaksa pada Kejati Jateng dan Unit Korwil Penindakan KPK pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan 5 (lima) simpulan dan 2 (dua) rekomendasi

Hasil Supervisi: Berkas Perkara atas nama Tsk. Ita Rosida telah dinyatakan lengkap (P-21) tanggal 28 Februari 2020.

68. Dugaan TPK Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan Keluarga Berencana (KB) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soewondo Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2013 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Kendal.

Posisi sebelum supervisi: Telah dilakukan gelar perkara antara Jaksa pada Kejari Kendal, Jaksa pada Kejati Jateng dan Unit Korwil Penindakan KPK pada tanggal 13 Agustus 2018.

Hasil Supervisi: Berkas Perkara atas nama Tsk. Zaenal Arifin telah dinyatakan lengkap (P-

21) berdasarkan dengan Surat B-236/M.3.27/Fd.1/02/2020 tanggal 10 Februari 2020.

69. Dugaan TPK Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan Keluarga Berencana (KB) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soewondo Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2013 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Kendal.

Posisi sebelum supervisi: Telah dilakukan gelar perkara antara Jaksa pada Kejari Kendal, Jaksa pada Kejati Jateng dan Unit Korwil Penindakan KPK pada tanggal 13 Agustus 2018.

Hasil Supervisi: Berkas Perkara atas nama Tsk. Enny Kusumawati telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan dengan Surat B-235/M.3.27/Fd.1/02/2020 tanggal 10 Februari 2020.

70. Dugaan TPK Pembangunan Pasar Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo TA. 2012 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Jateng.

Posisi sebelum supervisi: Telah dilakukan gelar perkara antara Penyidik pada Ditreskrimsus Polda Jateng dan Unit Koorsup Penindakan KPK pada tanggal 10 April 2019 dengan 5 (lima) kesimpulan dan 3 (tiga) rekomendasi

Hasil Supervisi: Telah dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) berdasarkan Nomor B/91. C/11/RES.3.5/2020/Reskrimsus tanggal 20 Februari 2020.

71. Dugaan TPK Tanpa Dasar Persetujuan Ahli Fungsi Hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI telah Menetapkan Uang Sewa Lapak dan Melakukan Pungutan Liar kepada Pengguna Lapak (Pedagang PKL Wonosari) yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polrestabes Semarang.

Posisi sebelum supervisi: Telah dilakukan rapat koordinasi antara Unit Koorsup Penindakan, Penyidik pada Ditreskrimsus Polda Jateng dan Penyidik pada Polrestabes Semarang tanggal 29 April 2019 dengan 5 (lima) simpulan dan 2 (dua) rekomendasi.

Hasil supervisi: Telah dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tanggal 6 Desember 2019.

72. Dugaan TPK dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dengan Anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro TA 2015-2017 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Bojonegoro

Posisi Sebelum Supervisi: Perkara a quo telah Limpah ke Pengadilan (P31) dengan surat Nomor: B-02/O.5.16/Ft.1/06/2019 tanggal 27 Juni 2019.

Hasil Supervisi: Inkracht.

73. Dugaan TPK Penyalahgunaan dana pembebasan tanah untuk kantor Pemkab Bandung Barat atas nama tersangka ENDANG RAHMAT, yang penyidikannya dilakukan oleh Polres Cimahi.

Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan.

Hasil supervisi : Berkas perkara atas nama ENDANG RAHMAT telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Nomor B-738/M.2.19/F.2/03/2020 tanggal 19 Maret 2020.

74. Dugaan TPK Pada Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cikamunding I Kec. Cilograng Kab. Lebak TA 2015 yang penyidikannya dilakukan oleh Polres Lebak.

Posisi sebelum supervisi : Berkas perkara atas nama Tersangka DODI ARIYADI telah Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti) dengan Surat Nomor C.1/72/X/2019/Reskrim tanggal 10 Oktober 2019.

Hasil supervisi : Berkas perkara atas nama Tersangka DODI ARIYADI telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (Inkracht) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 6 April 2020.

75. Dugaan TPK Pada Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cikamunding I Kec. Cilograng Kab. Lebak TA 2015 atas nama Tersangka ADE PASTI yang penyidikannya dilakukan oleh Polres Lebak.

Posisi sebelum supervisi : Berkas perkara atas nama Tersangka ADE PASTI telah Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti) dengan Surat Nomor C.1/67/X/2019/Reskrim tanggal 31 Oktober 2019.

Hasil supervisi : Berkas perkara atas nama Tersangka ADE PASTI telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (Inkracht) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 16 April 2020.

76. Dugaan TPK pada pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang terjadi pada tahun 2017 di pedukuhan Kadisoro, Kel. Gilangharjo, Kec. Pandak, Kab. Bantul atas nama BASUKI PANTARA yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Bantul.

Posisi sebelum supervisi: Telah dilakukan gelar perkara antara Penyidik pada Ditreskrimsus Polda DIY, Penyidik pada Polres Bantul, Jaksa pada Kejati DIY, Jaksa pada Kejari Bantul dan Unit Korwil Penindakan KPK pada tanggal 14 Agustus 2019 dengan 4 (empat) kesimpulan dan 2 (dua) rekomendasi.

Hasil Supervisi: Telah dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas nama BASUKI PANTARA tanggal 19 Maret 2020.

77. Dugaan TPK Penggunaan Dana APBDDes Tahun 2014 dan Tahun 2015 di Desa Tlogorejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak atas nama Tersangka SUHUDI yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Demak

Posisi sebelum supervisi: telah dilakukan gelar perkara pada tanggal 24 Mei 2018.

Hasil Supervisi: Telah dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas nama SUHUDI tanggal 24 Juli 2019.

78. Dugaan TPK Penggunaan Dana APBDDes Tahun 2014 dan Tahun 2015 di Desa Tlogorejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

atas nama Tersangka SUGIARTI yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Demak

Posisi sebelum supervisi: telah dilakukan gelar perkara pada tanggal 24 Mei 2018.

Hasil Supervisi: Telah dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas nama SUGIARTI tanggal 24 Juli 2019.

79. Dugaan TPK Penggunaan Dana APBDDes Tahun 2014 dan Tahun 2015 di Desa Tlogorejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak atas nama Tersangka A. MAULAL AKTAR yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Demak

Posisi sebelum supervisi: telah dilakukan gelar perkara pada tanggal 24 Mei 2018.

Hasil Supervisi: Telah dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas nama A. MAULAL AKTAR tanggal 11 November 2019.

80. Dugaan TPK Penyelewengan Dana PNPM di UPK Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Tahun 2016/2017 atas nama Tersangka SUHENDRAWAN yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Kabupaten Tegal

Posisi sebelum supervisi: Telah dilakukan gelar perkara antara Jaksa pada Kejari Kabupaten Tegal, Jaksa pada Kejati Jateng dan Unit Korwil Penindakan KPK pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan 5 (lima) simpulan dan 2 (dua) rekomendasi.

Hasil Supervisi: Berkas Perkara atas nama Tsk. SUHENDRAWAN telah dinyatakan lengkap (P-21) tanggal 02 Januari 2020.

81. Dugaan TPK Penyelewengan Dana PNPM di UPK Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Tahun 2016/2017 atas nama Tersangka SUHENDRAWAN yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Kabupaten Tegal

Posisi sebelum supervisi: Berkas Perkara atas nama Tsk. SUHENDRAWAN telah dinyatakan lengkap (P-21) tanggal 02 Januari 2020.

Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama Tsk. SUHENDRAWAN telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) pada tanggal 12 Februari 2020.

82. Dugaan TPK Penyelewengan Dana PNPM di UPK Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Tahun 2016/2017 atas nama Tersangka SISWIANTI yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Kabupaten Tegal

Posisi sebelum supervisi: Telah dilakukan gelar perkara antara Jaksa pada Kejari Kabupaten Tegal, Jaksa pada Kejati Jateng dan Unit Korwil Penindakan KPK pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan 5 (lima) simpulan dan 2 (dua) rekomendasi.

Hasil Supervisi: Berkas Perkara atas nama Tsk. SISWIANTI telah dinyatakan lengkap (P-21) tanggal 02 Januari 2020.

83. Dugaan TPK Penyelewengan Dana PNPM di UPK Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Tahun 2016/2017 atas nama Tersangka SISWIANTI yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Kabupaten Tegal

- Posisi sebelum supervisi: Berkas Perkara atas nama Tsk. SISWIANTI telah dinyatakan lengkap (P-21) tanggal 02 Januari 2020.
- Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama Tsk. SISWIANTI telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) pada tanggal 12 Februari 2020.
84. Dugaan TPK Dana Hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ke National Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalimantan Timur untuk Pelaksanaan Kegiatan PERPANAS (Pekan Paralimpik Nasional) XIV Tahun 2012 di Provinsi Riau, an, terdakwa Taufieq Susanto Bin Eddy Susanto, yang penyidikannya dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
- Posisi sebelum supervisi: Tahap persidangan dan telah dilakukan fasilitasi pemeriksaan ahli keuangan negara di persidangan pada Pengadilan Tipikor pada PN Samarinda tanggal 05 Desember 2019.
- Hasil supervisi: Berkas perkara atas nama terdakwa Taufieq Susanto Bin Eddy Susanto telah diputus oleh Pengadilan Tipikor pada PN Samarinda dengan Putusan Nomor: 26/Pid. Sus-TPK/2019/PN Smr tanggal 23 Januari 2020.
85. Dugaan TPK Dana Hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ke National Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalimantan Timur untuk Pelaksanaan Kegiatan PERPANAS (Pekan Paralimpik Nasional) XIV Tahun 2012 di Provinsi Riau, an, terdakwa Ardiansyah Bin Salimi (Alm), yang penanganannya dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
- Posisi sebelum supervisi: Tahap persidangan dan telah dilakukan fasilitasi pemeriksaan ahli keuangan negara di persidangan pada Pengadilan Tipikor pada PN Samarinda tanggal 05 Desember 2019.
- Hasil supervisi: Berkas perkara atas nama terdakwa Ardiansyah Bin Salimi (Alm) telah diputus oleh Pengadilan Tipikor pada PN Samarinda dengan putusan nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr tanggal 23 Januari 2020.
86. Dugaan TPK Penyempangan Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) Bontang Tahun Anggaran 2014 dan 2015, atas nama tersangka Dandy Prio Anggono, S.Sos., yang penyidikannya dilakukan oleh Kejari Bontang.
- Posisi sebelum supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka Dandy Prio Anggono, S.Sos. telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat nomor: B-055/O.4.5/Ft.1/02/2020 tanggal 14 Februari 2020
- Hasil supervisi: Telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) atas nama tersangka Dandy Prio Anggono, S. Sos melalui surat nomor: PRINT-01/O.4.5/Fd.1/02/2020 tanggal 18 Februari 2020.
87. Dugaan TPK Belanja Upah Kerja/ Land Clearing atas Giat Pengembangan Perluasan Lahan Pertanian pada Dinas Perkebunan Provinsi

- Sulawesi Barat TA 2013.
- Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan.
- Hasil supervisi: Berkas perkara atas nama SAINAL SAID telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat No: B-435/R.4.15/Ep.6.10/Fd.2/03/2020 pada tanggal 04 Maret 2020.
88. Dugaan TPK Belanja Upah Kerja/ Land Clearing atas Giat Pengembangan Perluasan Lahan Pertanian pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat TA 2013.
- Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan.
- Hasil supervisi: Berkas perkara atas nama SAINAL SAID telah dilakukan Pengiriman Tersangka dan Alat Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (Tahap II) pada berdasarkan surat No: BP.II/95 b/III/2020/Reskrim tanggal 12 Maret 2020.
89. Dugaan TPK Belanja Upah Kerja/ Land Clearing atas Giat Pengembangan Perluasan Lahan Pertanian pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat TA 2013.
- Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan.
- Hasil supervisi: Berkas perkara atas nama ANWAR RAROPI telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat No: B-436/R.4.15/Ep.6.10/Fd.2/03/2020 pada tanggal 04 Maret 2020.
90. Dugaan TPK Belanja Upah Kerja/ Land Clearing atas Giat Pengembangan Perluasan Lahan Pertanian pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat TA 2013.
- Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan.
- Hasil supervisi: Berkas perkara atas nama ANWAR RAROPI telah dilakukan Pengiriman Tersangka dan Alat Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (Tahap II) berdasarkan surat No: BP.II/96 b/III/2020/Reskrim pada tanggal 12 Maret 2020.
91. Dugaan TPK Paket 09 Pembangunan / Reklamasi Pantai Pasar Wameo Tahun Anggaran 2004
- Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan.
- Hasil supervisi: Berkas perkara atas nama AHMAD ARFA telah dihentikan penyidikannya (SP3) berdasarkan surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No: S.Tap/04/IX/2019/Reskrim Tanggal 6 September 2019.
92. Dugaan TPK Paket 09 Pembangunan / Reklamasi Pantai Pasar Wameo Tahun Anggaran 2004
- Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan.
- Hasil supervisi: Berkas perkara atas nama LAODE NIZARI Bin LAODE ABIBU telah dihentikan penyidikannya (SP3) berdasarkan surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No: S.Tap/04/IX/2019/Reskrim Tanggal 6 September 2019.
93. Dugaan TPK Paket 09 Pembangunan / Reklamasi Pantai Pasar Wameo Tahun Anggaran 2004
- Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan.
- Hasil supervisi: Berkas perkara atas nama RASMAN telah dihentikan penyidikannya (SP3) berdasarkan surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No: S.Tap/04/IX/2019/Reskrim Tanggal 6 September 2019.

94. Dugaan TPK Paket 09 Pembangunan / Reklamasi Pantai Pasar Wameo Tahun Anggaran 2004
- Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan.
- Hasil supervisi: Berkas perkara atas nama SUDIN NUR telah dihentikan penyidikannya (SP3) berdasarkan surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No: S.Tap/04/IX/2019/Reskrim Tanggal 6 September 2019.
95. Dugaan TPK dan TPPU pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat pada Dinas Perumahan Prov. Papua Barat, TA. 2015 senilai Rp. 4.500.000.000,00,-
- Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan.
- Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama NINA DIANA telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat No: B-186/R.2.5/Ft.1/03/2020 pada tanggal 23 Maret 2020.
96. TPK pekerjaan perencanaan pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Morowali Utara Tahap I yang dilaksanakan oleh CV. Aditya Cipta Media Jasa yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Sulawesi Tengah.
- Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan.
- Hasil Supervisi: Berkas Perkara atas nama Ir. BASO MUHTAR dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Nomor B-46/P.2.5/Ft.1/2/2020 tanggal 13/02/2020.
97. TPK pekerjaan perencanaan pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Morowali Utara Tahap I yang dilaksanakan oleh CV. Aditya Cipta Media Jasa yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Sulawesi Tengah.
- Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan.
- Hasil Supervisi: Berkas Perkara atas nama KRISTOFERUS LAGARINDA, ST., MT. dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Nomor B-45/P.2.5/Ft.1/1/2020 tanggal 10/01/2020.
98. Dugaan TPK pada kegiatan penyelesaian Pembangunan WTP III dan Pemasangan Pipa Distribusi Utama sepanjang 600 meter di lokasi WTP Beting Semelur PDAM Tirta Kualo Kota Tanjung Balai Sumber Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2012-2014 dengan pagu Rp. 11.000.000.000 (sebelas milyar rupiah) atas nama tersangka Oktavia Sihombing yang disidik oleh Polda Sumatera Utara.
- Hasil supervisi: Limpah ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan surat Nomor : B-1711/L.2.17/Ft.2/04/2020 tanggal 11 Mei 2020.
99. Dugaan TPK pada kegiatan penyelesaian Pembangunan WTP III dan Pemasangan Pipa Distribusi Utama sepanjang 600 meter di lokasi WTP Beting Semelur PDAM Tirta Kualo Kota Tanjung Balai Sumber Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2012-2014 dengan pagu Rp. 11.000.000.000 (sebelas milyar rupiah) atas nama tersangka Zaharuddin Sinaga, SE yang

- disidik oleh Polda Sumatera Utara.
- Hasil supervisi: Limpah ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan surat Nomor : B-1710/L.2.17/Ft.2/04/2020 tanggal 11 Mei 2020.
100. Dugaan TPK pada kegiatan penyelesaian Pembangunan WTP III dan Pemasangan Pipa Distribusi Utama sepanjang 600 meter di lokasi WTP Beting Semelur PDAM Tirta Kualo Kota Tanjung Balai Sumber Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2012-2014 dengan pagu Rp. 11.000.000.000 (sebelas milyar rupiah) atas nama tersangka Herianto, SE yang disidik oleh Polda Sumatera Utara.
- Hasil supervisi: Limpah ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan surat Nomor : B-1709/L.2.17/Ft.2/04/2020 tanggal 11 Mei 2020.
101. Dugaan TPK Penyalahgunaan Dana Dekonsentrasi Bersumber Dari P-APBN Sebesar Rp. 41.809.700.000,- Pemerintah Desa Se-Sumatera Utara Untuk Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparatus Pemerintah Desa Tahun 2015 Pada Paket III Zona Kisaran Asahan, Rantau Prapat Labuhan Batu, Penyabungan Mandailing Natal, Padangsidimpun Tapanuli Selatan, Padangsidimpun Padangsidimpun, Rantau Prapat Labuhan Batu Selatan, Sibuhan Padang Lawas, Rantau Prapat Labuhan Batu Utara, Gunung Tua Padang Lawas Utara atas nama Taufik H. M. yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati Sumatera Utara.
- Hasil supervisi: P-21 berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui surat Nomor : B-1270/L.2.5/Ft.1/03/2020 tanggal 10 Maret 2020.
102. Dugaan TPK Penyalahgunaan Dana Dekonsentrasi Bersumber Dari P-APBN Sebesar Rp. 41.809.700.000,- Pemerintah Desa Se-Sumatera Utara Untuk Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparatus Pemerintah Desa Tahun 2015 Pada Paket III Zona Kisaran Asahan, Rantau Prapat Labuhan Batu, Penyabungan Mandailing Natal, Padangsidimpun Tapanuli Selatan, Padangsidimpun Padangsidimpun, Rantau Prapat Labuhan Batu Selatan, Sibuhan Padang Lawas, Rantau Prapat Labuhan Batu Utara, Gunung Tua Padang Lawas Utara atas nama Budhianto Suryanata yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati Sumatera Utara.
- Hasil supervisi: Putusan PN Medan Nomor: 105/Pid. Sus-TPK/2017/PN Mdn tanggal 3 April 2018.
103. Dugaan TPK Penyalahgunaan Dana Dekonsentrasi Bersumber Dari P-APBN Sebesar Rp. 41.809.700.000,- Pemerintah Desa Se-Sumatera Utara Untuk Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparatus Pemerintah Desa Tahun 2015 Pada Paket III Zona Kisaran Asahan, Rantau Prapat Labuhan Batu, Penyabungan Mandailing Natal, Padangsidimpun Tapanuli Selatan,

- Padangsidimpuan Padangsidimpuan, Rantau Prapat Labuhan Batu Selatan, Sibuhan Padang Lawas, Rantau Prapat Labuhan Batu Utara, Gunung Tua Padang Lawas Utara atas nama Rahmat Jaya Pramana Suprijatna yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati Sumatera Utara.
- Hasil supervisi: Putusan PN Medan Nomor: 106/Pid. Sus-TPK/2017/PN Mdn tanggal 3 April 2018.
104. Dugaan TPK Pengadaan Cadangan Batubara oleh PT PLN Batubara yang bekerjasama dengan PT. Tansri Madjid Energy (PT. TME) senilai 1,35 Trilyun yang mengakibatkan kerugian keuangan negara tahun 2011 s/d 2012 yang disidk dan dilakukan penuntutan oleh Kejati DKI Jakarta
- Hasil Supervisi: Berkas perkara An. Terdakwa KOKOS JIANG dinyatakan inkraht berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadulan (P-48) No: Prin-1303/M.1.1.14/Fu.1/11/2019 tanggal 8 November 2019.
105. Dugaan TPK Pengadaan Cadangan Batubara oleh PT PLN Batubara yang bekerjasama dengan PT. Tansri Madjid Energy (PT. TME) senilai 1,35 Trilyun yang mengakibatkan kerugian keuangan negara tahun 2011 s/d 2012 yang disidk dan dilakukan penuntutan oleh Kejati DKI Jakarta
- Hasil Supervisi: Berkas perkara An. Terdakwa KHARIL WAHYUNI dinyatakan inkraht berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadulan (P-48) No: Prin-340/M.1.1.14/Fu.1/03/2020 tanggal 17 Maret 2020.
106. Dugaan TPK dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2011-2012 pada Bank Jawa Timur Cabang Pembantu Wolter Monginsidi Jakarta yang disidk dan dilakukan penuntutan oleh Kejati DKI Jakarta
- Hasil Supervisi: Berkas perkara An. Terdakwa ARYONO PRASODO dinyatakan inkraht berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadulan (P-48) No: Prin-1455/M.1.1.14/Fu.1/12/20219 tanggal 10 Desember 2019.
107. Dugaan TPK dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2011-2012 pada Bank Jawa Timur Cabang Pembantu Wolter Monginsidi Jakarta yang disidk dan dilakukan penuntutan oleh Kejati DKI Jakarta
- Hasil Supervisi: Berkas perkara An. Terdakwa RIYAD PRABOWO EDY dinyatakan inkraht berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2019/PT DKI tanggal 24 September 2019.
108. Dugaan TPK Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2010 di PT. BNI SKC Bandung pada peternak sapi Grup Simpang Jaya Dua dengan Plapon sebesar Rp 25.000.000.000 yang diduga berpotensi kerugian negara sebesar Rp 1.950.000.000 an. Tersangka DIDI SUPRIADI.
- Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama Terdakwa Didi Supriadi dinyatakan inkraht berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 32/Tipikor/2016/PT.Bdg.
109. Dugaan TPK penyalahgunaan wewenang dan jabatan dalam pengujian berkala kendaraan bermotor (KIR) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, an. Tersangka DIDIN SARIFUDIN.
- Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama Terdakwa DIDIN SARIFUDIN dinyatakan dihentikan (SP 3) berdasarkan Sp. Tap/17a/VII/2018/ Reskrim, tgl. 30-07-2018.
110. Dugaan TPK dalam kegiatan dukungan PON XIX-Peningkatan Jalas Tarisi-Batudua pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang TA 2016.
- Hasil Supervisi: Berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Nomor: B-2006/M.2.5/Ft.1/03/2020 tanggal 31 Maret 2020
111. Dugaan TPK penyalahgunaan pendistribusian Beras Raskin untuk Desa Mekarsari, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut Tahun 2014, 2015, dan 2016 An. Tersangka AHMAD SUTISNA.
- Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama Tersangka AHMAD SUTISNA dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Nomor: B-2414/M.2.15/Ft.1/12/2019 tanggal 16 Desember 2019.
112. Dugaan dalam pembangunan Gedung DPRD Kab. Gorontalo pada Tahun 2008 atas nama tersangka Jusuf Harun yang disidk oleh Kejati Gorontalo.
- Hasil Supervisi: P-21 berdasarkan Nota Dinas Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Gorontalo Nomor: B-1128/P.5.5/Fd.1/10/2019 tanggal 7 Oktober 2019.
113. Dugaan dalam pembangunan Gedung DPRD Kab. Gorontalo pada Tahun 2008 atas nama tersangka Jusuf Harun yang disidk oleh Kejati Gorontalo.
- Hasil Supervisi: Limpah ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Nomor Perkara: 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto tanggal register 29 Oktober 2019.
114. Dugaan dalam pembangunan Gedung DPRD Kab. Gorontalo pada Tahun 2008 atas nama tersangka Jusuf Harun yang disidk oleh Kejati Gorontalo.
- Hasil Supervisi: Putusan PN Gorontalo Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto tanggal 13 Maret 2020.
115. Dugaan TPK penyelewengan dana dalam pekerjaan pembangunan pasar rakyat Pontolo di Desa Ombulodata, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gorontalo Utara APBN-TP (Tahap I) Nilai Kontrak sebesar Rp. 4.329.386.000,- TA. 2015 atas nama tersangka Syafrudin Ngurawan yang disidk oleh Kejati Gorontalo.
- Hasil Supervisi: P-21 berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo melalui surat Nomor: B-801/R.5/Ft.1/05/2018 tanggal 28 Mei 2018.
116. Dugaan TPK penyelewengan dana dalam pekerjaan pembangunan pasar rakyat Pontolo di Desa Ombulodata, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gorontalo Utara APBN-TP (Tahap I) Nilai Kontrak sebesar Rp. 4.329.386.000,- TA. 2015 atas nama tersangka Syafrudin Ngurawan yang disidk oleh Kejati Gorontalo.
- Hasil Supervisi: Limpah ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Nomor Perkara: 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto tanggal 4 Juni 2018.
117. Dugaan TPK penyelewengan dana dalam pekerjaan pembangunan pasar rakyat Pontolo di Desa Ombulodata, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gorontalo Utara APBN-TP (Tahap I) Nilai Kontrak sebesar Rp. 4.329.386.000,- TA. 2015 atas nama tersangka Syafrudin Ngurawan yang disidk oleh Kejati Gorontalo.
- Hasil Supervisi: Putusan PN Gorontalo Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto tanggal 23 Oktober 2018.
118. Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan infrastruktur pembasahan untuk lahan gambut oleh Badan Restorasi Gambut pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah TA 2017, 2018, dan 2019 atas nama Tsk MOHAMMAD SEMAN, S.T yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Palangka Raya.
- Hasil Supervisi: Berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya melalui surat Nomor: B-1014/O.2.10/Ft.1/04/2020 tanggal 15 April 2020.
119. Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan infrastruktur pembasahan untuk lahan gambut oleh Badan Restorasi Gambut pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah TA 2017, 2018, dan 2019 atas nama Tsk ARIANTO, S.Hut., M.Si yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Palangka Raya.
- Hasil Supervisi: Berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya melalui surat Nomor: B-1030/O.2.10/Ft.1/05/2020 tanggal 26 Mei 2020.
120. Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan infrastruktur pembasahan untuk lahan gambut oleh Badan Restorasi Gambut pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah TA 2017, 2018, dan 2019 atas nama Tsk MOHAMMAD SEMAN, S.T yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Palangka Raya.
- Hasil Supervisi: Telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap 2) berdasarkan Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Benda Sitaan/Barang Bukti Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya tanggal 22 Mei 2020.
121. Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan infrastruktur pembasahan untuk lahan gambut oleh Badan Restorasi Gambut pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah TA 2017, 2018, dan 2019 atas nama Tsk ARIANTO, S.Hut., M.Si yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Palangka Raya.
- Hasil Supervisi: Telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap 2) berdasarkan Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Benda Sitaan/Barang Bukti Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya tanggal 26 Mei 2020.
122. Tindak Pidana Korupsi Dana APBD Kota Palembang TA 2013 pada Kegiatan Pembangunan Gerbang Batas Kota Palembang-Banyuasin Lokasi Jalan Tanjung Api-Api Kec. Sukarami Kota Palembang yang dilaksanakan oleh Dinas PU Cipta Karya Kota Palembang Tahun 2013 atas nama Tsk OTONG ISKANDAR Z Bin UMAR yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.
- Hasil Supervisi: Berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Palembang melalui surat Nomor: B-3300/L.6.10/Ft.1/05/2020 tanggal 19 Mei 2020.
123. Tindak Pidana Korupsi Dana APBD Kota Palembang TA 2013 pada Kegiatan Pembangunan Gerbang Batas Kota Palembang-Banyuasin Lokasi Jalan Tanjung Api-Api Kec. Sukarami Kota Palembang yang dilaksanakan oleh Dinas PU Cipta Karya Kota Palembang Tahun 2013 atas nama Tsk KHAIRUL RIZAL, S.T, MTP Bin H NAHROWI yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.
- Hasil Supervisi: Berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Palembang melalui surat Nomor: B-3299/L.6.10/Ft.1/05/2020 tanggal 19 Mei 2020.
124. Dugaan TPK dan atau penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada kegiatan pengadaan dan pemasangan Pipa Transmisi PE Dn 500 mm di kota Tembilahan yang dilaksanakan oleh Dinas PU Prov. Riau pada Tahun 2013 dengan menggunakan dana APBD Propinsi Riau TA. 2013 atas nama tersangka EDI MUFTI, BE Bin SYAR'I HARUN
- Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama Terdakwa EDI MUFTI, BE Bin SYAR'I HARUN dinyatakan inkraht berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 9/Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.PBR tanggal 13 Juni 2019.
125. Dugaan TPK dan atau penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada kegiatan pengadaan dan pemasangan Pipa Transmisi PE Dn 500 mm di kota Tembilahan yang



- dilaksanakan oleh Dinas PU Prov. Riau pada Tahun 2013 dengan menggunakan dana APBD Propinsi Riau TA. 2013 atas nama tersangka SABAR STEVANUS P. SIMALONGO, SH  
Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama Terdakwa SABAR STEVANUS P. SIMALONGO, SH dinyatakan inkraht berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 11/Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.PBR tanggal 13 Juni 2019.
126. Dugaan TPK dan atau penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada kegiatan pengadaan dan pemasangan Pipa Transmisi PE Dn 500 mm di kota Tembilahan yang dilaksanakan oleh Dinas PU Prov. Riau pada Tahun 2013 dengan menggunakan dana APBD Propinsi Riau TA. 2013 atas nama tersangka SYAFRIZAL THAHER, DS, ST.,MT.  
Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama Terdakwa SYAFRIZAL THAHER, DS, ST.,MT dinyatakan inkraht berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 10/Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.PBR tanggal 13 Juni 2019.
127. Dugaan TPK pekerjaan rehabilitasi sarana irigasi D.I. Sampuro Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, sumber dana Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum (APBD Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2014), pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak dengan nilai kontrak Rp 699.700.000,-, atas nama Tersangka RUDIYANTO yang penyidikannya dilakukan oleh Polres Landak  
Posisi sebelum supervisi: Berkas perkara atas nama Tersangka RUDIYANTO telah dinyatakan Tahap II dengan Surat Nomor B/1168/X/RES.3.5/2019/Tipikor tanggal 3 Oktober 2019.  
Posisi setelah supervisi: Berkas perkara atas nama Tersangka RUDIYANTO telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (Inkraht) berdasarkan putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk tanggal 12 Februari 2020.
128. Dugaan TPK pekerjaan rehabilitasi sarana irigasi D.I. Sampuro Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, sumber dana Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum (APBD Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2014), pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak dengan nilai kontrak Rp 699.700.000,-, atas nama Tersangka RANGGA YUDHA ANDHIKA yang penyidikannya dilakukan oleh Polres Landak.  
Posisi sebelum supervisi: Berkas perkara atas nama Tersangka RANGGA YUDHA ANDHIKA telah dinyatakan Tahap II dengan Surat Nomor B/1168/X/RES.3.5/2019/Tipikor tanggal 3 Oktober 2019.  
Posisi setelah supervisi: Berkas perkara atas nama Tersangka RANGGA YUDHA ANDHIKA telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (Inkraht) berdasarkan putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk tanggal 12 Februari 2020.
129. Dugaan TPK penyimpangan pengadaan peralatan kedokteran dan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sambas Tahun Anggaran 2011 di Kabupaten Sambas atas nama Tersangka AMIN ANDIKA yang penyidikannya dilakukan oleh Polres Sambas.  
Posisi sebelum supervisi: Berkas perkara atas nama Tersangka AMIN ANDIKA telah dilakukan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II).  
Posisi setelah supervisi: Berkas perkara atas nama Tersangka AMIN ANDIKA telah memperoleh keputusan berkekuatan hukum tetap (Inkraht) berdasarkan putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk tanggal 8 April 2020.
130. Dugaan TPK Penyimpangan Pengadaan Benih Lada pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat Dalam Perluasan Tanaman Lada di Kabupaten Sambas TA 2015 atas nama Tersangka JUNIAR BIN SALIMIN yang dilakukan penyidikan oleh Polres Sambas.  
Posisi sebelum supervisi: Berkas perkara atas nama Tersangka JUNIAR BIN SALIMIN telah dilakukan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) dengan Surat Nomor B/1955/X/2019/Reskrim tanggal 29 Oktober 2019.  
Posisi setelah supervisi: Berkas perkara atas nama Tersangka JUNIAR BIN SALIMIN telah memperoleh keputusan berkekuatan hukum tetap (Inkraht) berdasarkan putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk tanggal 20 April 2020.
131. Dugaan TPK penyimpangan pada pelaksanaan pembangunan Masjid Agung Melawi sumber dana APBD Kab. Melawi Tahun Anggaran 2012 – 2015 atas nama tersangka ABANG TAJUDIN, yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Kalimantan Barat.  
Posisi sebelum supervisi: Berkas perkara atas nama ABANG TAJUDIN telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Nomor B-541/O.1.5/Ft.1/02/2020 tanggal 26 Februari 2020.  
Posisi setelah supervisi: Berkas perkara atas nama ABANG TAJUDIN telah dilakukan penyerahan Barang Bukti dan Tersangka (Tahap II) pada tanggal 13 Juli 2020.
132. Dugaan TPK penyimpangan pada pelaksanaan pembangunan Masjid Agung Melawi sumber dana APBD Kab. Melawi Tahun Anggaran 2012 – 2015 atas nama tersangka KUSMAHENDRI, yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Kalimantan Barat.  
Posisi sebelum supervisi: Berkas perkara atas nama KUSMAHENDRI telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Nomor B-540/O.1.5/Ft.1/02/2020 tanggal 26 Februari 2020.  
Posisi setelah supervisi: Berkas perkara atas nama KUSMAHENDRI telah dilakukan penyerahan Barang Bukti dan Tersangka (Tahap II) pada tanggal 13 Juli 2020.
133. Dugaan TPK penyimpangan pada pelaksanaan pembangunan Masjid Agung Melawi sumber dana APBD Kab. Melawi Tahun Anggaran 2012 – 2015 atas nama tersangka PAKANUDIN, yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Kalimantan Barat.  
Posisi sebelum supervisi: Berkas perkara atas nama PAKANUDIN telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Nomor B-542/O.1.5/Ft.1/02/2020 tanggal 26 Februari 2020.  
Posisi setelah supervisi: Berkas perkara atas nama PAKANUDIN telah dilakukan penyerahan Barang Bukti dan Tersangka (Tahap II) pada tanggal 13 Juli 2020.
134. Dugaan TPK Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Dua – Perawas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2017 atas nama Tersangka EDDY SANTOSO, yang penyidikannya dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.  
Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan. Telah dilaksanakan gelar perkara antara Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Satgas Penindakan Korwil 4 KPK pada 31 Oktober 2019 dengan 11 (sebelas) simpulan dan 3 (tiga) rekomendasi.  
Posisi setelah supervisi: Berkas perkara atas nama Tersangka EDDY SANTOSO telah dinyatakan lengkap (P21).
135. Dugaan TPK Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Dua – Perawas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2017 atas nama Tersangka HENDY MALIKI, yang penyidikannya dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.  
Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan. Telah dilaksanakan gelar perkara antara Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Satgas Penindakan Korwil 4 KPK pada 31 Oktober 2019 dengan 11 (sebelas) simpulan dan 3 (tiga) rekomendasi.  
Posisi setelah supervisi: Berkas perkara atas nama Tersangka HENDY MALIKI telah dinyatakan lengkap (P21).
136. Dugaan TPK Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Dua – Perawas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2017 atas nama Tersangka MULYADI, yang penyidikannya dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.  
Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan. Telah dilaksanakan gelar perkara antara Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Satgas Penindakan Korwil 4 KPK pada 31 Oktober 2019 dengan 11 (sebelas) simpulan dan 3 (tiga) rekomendasi.  
Posisi setelah supervisi: Berkas perkara atas nama Tersangka MULYADI telah dinyatakan lengkap (P21).
137. Dugaan TPK Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Balai Berkuak – Mereban (Soil – Cement – HRS atas nama Tersangka EDY KUSNADI, yang penyidikannya dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.  
Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan. Telah dilaksanakan gelar perkara antara Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Satgas Penindakan Korwil 4 KPK pada 31 Oktober 2019 dengan 11 (sebelas) simpulan dan 3 (tiga) rekomendasi.  
Posisi setelah supervisi: Berkas perkara atas nama Tersangka EDY KUSNADI telah dinyatakan lengkap (P21).
138. Dugaan TPK Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Balai Berkuak – Mereban (Soil – Cement – HRS atas nama Tersangka ABDUL MUJIBBURAHMAN, yang penyidikannya dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.  
Posisi sebelum: Tahap Penyidikan. Telah dilaksanakan gelar perkara antara Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Satgas Penindakan Korwil 4 KPK pada 31 Oktober 2019 dengan 11 (sebelas) simpulan dan 3 (tiga) rekomendasi.  
Posisi setelah supervisi: Berkas perkara atas nama Tersangka ABDUL MUJIBBURAHMAN telah dinyatakan lengkap (P21).
139. Dugaan TPK Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Balai Berkuak – Mereban (Soil – Cement – HRS atas nama Tersangka HENDI MALIKI, yang penyidikannya dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.  
Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan. Telah dilaksanakan gelar perkara antara Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Satgas Penindakan Korwil 4 KPK pada 31 Oktober 2019 dengan 11 (sebelas) simpulan dan 3 (tiga) rekomendasi.  
Posisi setelah supervisi: Berkas perkara atas nama Tersangka HENDI MALIKI telah dinyatakan lengkap (P21).
140. Dugaan TPK dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Auditorium Serba Guna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi TA 2018 an. tersangka KRISTIANA, S.T., M. PSDA BINTI ANWAR, yang penanangan perkaranya dilaksanakan oleh Kejati Jambi.  
Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan  
Hasil Supervisi: Berkas Perkara atas nama tersangka KRISTIANA, S.T., M. PSDA BINTI ANWAR telah dinyatakan lengkap (P-21) sesuai surat nomor: B-1433/L.5.5/Ft.1/04/2020 tanggal 21 April 2020
141. Dugaan TPK dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Auditorium Serba Guna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi TA 2018 an. tersangka KRISTIANA, S.T., M. PSDA BINTI ANWAR, yang penanangan perkaranya dilaksanakan oleh Kejati Jambi.

Posisi sebelum supervisi: Berkas Perkara dinyatakan lengkap (P-21)

Hasil supervisi: Telah dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) atas tersangka KRISTIANA,ST.,M.PSDA BINTI ANWAR berdasarkan surat nomor: PRINT-35/L.5.19/Ft.1/03/2020 tanggal 23/04/2020

142. Dugaan TPK dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Auditorium Serba Guna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi TA 2018 an. tersangka ISKANDAR ZULKARNAEN ALS RUDI BIN H.M.YUSUF, yang penanangan perkaranya dilaksanakan oleh Kejati Jambi.

Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan

Hasil supervisi: Berkas Perkara atas nama tersangka ISKANDAR ZULKARNAEN ALS RUDI BIN H.M.YUSUF telah dinyatakan lengkap (P-21) sesuai surat nomor: B-1137/L.5.5/Ft.1/03/2020 tanggal 19 Maret 2020

143. Dugaan TPK dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Auditorium Serba Guna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi TA 2018 an. tersangka ISKANDAR ZULKARNAEN ALS RUDI BIN H.M.YUSUF, yang penanangan perkaranya dilaksanakan oleh Kejati Jambi.

Posisi sebelum supervisi: Berkas Perkara dinyatakan lengkap (P-21)

Hasil supervisi: Telah dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) atas tersangka ISKANDAR ZULKARNAEN ALS RUDI BIN H.M.YUSUF berdasarkan surat nomor: PRINT-25/L.5.19/Ft.1/03/2020 tanggal 20 Maret 2020

144. Dugaan TPK dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Auditorium Serba Guna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi TA 2018 an. tersangka HERMANTONI, SPd.I BIN ABDUL MAKI, yang penanangan perkaranya dilaksanakan oleh Kejati Jambi.

Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan

Hasil supervisi: Berkas Perkara atas nama tersangka HERMANTONI, SPd.I BIN ABDUL MAKI telah dinyatakan lengkap (P-21) sesuai surat nomor: B-1135/L.5.5/Ft.1/03/2020 tanggal 19 Maret 2020.

145. Dugaan TPK dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Auditorium Serba Guna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi TA 2018 an. tersangka HERMANTONI, SPd.I BIN ABDUL MAKI, yang penanangan perkaranya dilaksanakan oleh Kejati Jambi.

Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan

Hasil supervisi: Telah dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) atas nama tersangka HERMANTONI, SPd.I BIN ABDUL MAKI berdasarkan surat nomor: PRINT-26/L.5.19/Ft.1/03/2020 tanggal 20 Maret 2020.

146. Dugaan TPK dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Auditorium Serba Guna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha

Saifuddin Jambi TA 2018 an. tersangka JOHN SIMBOLON, yang penanangan perkaranya dilaksanakan oleh Kejati Jambi.

Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan

Hasil supervisi: Berkas Perkara atas nama tersangka JOHN SIMBOLON telah dinyatakan lengkap (P-21) sesuai surat nomor: B-1136/L.5.5/Ft.1/03/2020 tanggal 19 Maret 2020.

147. Dugaan TPK dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Auditorium Serba Guna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi TA 2018 an. tersangka JOHN SIMBOLON, yang penanangan perkaranya dilaksanakan oleh Kejati Jambi.

Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan

Hasil supervisi: Telah dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) atas tersangka JOHN SIMBOLON berdasarkan surat nomor: PRINT-24/L.5.19/Ft.1/03/2020 tanggal 20 Maret 2020.

148. Dugaan TPK dalam penyaluran dana bantuan sosial program peningkatan pendidikan TA 2013-2014 yang anggarannya bersumber dari APBD Provinsi Jambi TA 2013-2014, yang penanangan perkaranya dilaksanakan oleh Kejati Jambi.

Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan

Hasil supervisi: Telah dilakukan penghentian penyidikan (SP3) atas perkara a quo berdasarkan Surat Nomor: Print-132/L.5/Fd.1/05/2020 tanggal 30 Mei 2020.

149. Dugaan TPK Revitalisasi Asrama Haji Tahun 2016 pada Kanwil Departemen Agama Provinsi Jambi an. terdakwa MULYADI Als EDO Bin RUSDI, yang penanangan perkaranya dilakukan oleh Polda Jambi.

Posisi sebelum supervisi: Tahap Penuntutan

Hasil supervisi: Berkas perkara an. terdakwa MULYADI Als EDO Bin RUSDI telah diputus oleh Pengadilan Tipikor pada PN Jambi melalui Surat Putusan Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jambi tanggal 17 Maret 2020.

150. Dugaan TPK Revitalisasi Asrama Haji Tahun 2016 pada Kanwil Departemen Agama Provinsi Jambi an. terdakwa EKO DIAN IING SOLIHIN Bin ARNADI, yang penanangan perkaranya dilakukan oleh Polda Jambi.

Posisi sebelum supervisi: Tahap Penuntutan

Hasil supervisi: Berkas perkara an. terdakwa EKO DIAN IING SOLIHIN Bin ARNADI telah diputus oleh Pengadilan Tipikor pada PN Jambi melalui Surat Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jambi tanggal 17 Maret 2020.

151. Dugaan TPK Revitalisasi Asrama Haji Tahun 2016 pada Kanwil Departemen Agama Provinsi Jambi an. terdakwa DASMAM, A.Md Bin SURI SUTA MARAJO, yang penanangan perkaranya dilakukan oleh Polda Jambi.

Posisi sebelum supervisi: Tahap Penuntutan

Hasil supervisi: Berkas perkara an. terdakwa DASMAM, A.Md Bin SURI SUTA MARAJO telah diputus oleh Pengadilan Tipikor pada PT Jambi melalui Surat Putusan Nomor: 6/PID.TPK/2020/

PT JMB tanggal 04 Mei 2020.

152. Dugaan TPK Revitalisasi Asrama Haji Tahun 2016 pada Kanwil Departemen Agama Provinsi Jambi an. terdakwa Drs. H.M THAHIR RAHMAN, M.Hi Bin H. ABD RAHMAN, yang penanangan perkaranya dilakukan oleh Polda Jambi.

Posisi sebelum supervisi: Tahap Penuntutan

Hasil supervisi: Berkas perkara an. terdakwa Drs. H.M THAHIR RAHMAN, M.Hi Bin H. ABD RAHMAN telah diputus oleh Pengadilan Tipikor pada PN Jambi melalui Surat Putusan Nomor: 30/Pid. Sus-TPK/2019/PN Jambi tanggal 17 Maret 2020.

153. Dugaan TPK Revitalisasi Asrama Haji Tahun 2016 pada Kanwil Departemen Agama Provinsi Jambi an. terdakwa H. TENDRISYAH, S.Pt Als TENDRI Bin M. ALI, yang penanangan perkaranya dilakukan oleh Polda Jambi.

Posisi sebelum supervisi: Tahap Penuntutan

Hasil supervisi: Berkas perkara an. terdakwa H. TENDRISYAH, S.Pt Als TENDRI Bin M. ALI telah diputus oleh Pengadilan Tipikor pada PN Jambi melalui Surat Putusan Nomor: 31/Pid. Sus-TPK/2019/PN Jambi tanggal 17 Maret 2020.

154. Dugaan TPK Revitalisasi Asrama Haji Tahun 2016 pada Kanwil Departemen Agama Provinsi Jambi an. terdakwa H. JOHAN ARIPI MUBA Bin H. MUHTABAR, yang penanangan perkaranya dilakukan oleh Polda Jambi.

Posisi sebelum supervisi: Tahap Penuntutan

Hasil supervisi: Berkas perkara an. terdakwa H. JOHAN ARIPI MUBA Bin H. MUHTABAR telah diputus oleh Pengadilan Tipikor pada PN Jambi melalui Surat Putusan Nomor: 35/Pid. Sus-TPK/2019/PN Jambi tanggal 17 Maret 2020.

155. Dugaan TPK Revitalisasi Asrama Haji Tahun 2016 pada Kanwil Departemen Agama Provinsi Jambi an. terdakwa dr. BAMBANG MARSUDI RAHARJA Bin ASWARI, yang penanangan perkaranya dilakukan oleh Polda Jambi.

Posisi sebelum supervisi: Tahap Penuntutan

Hasil supervisi: Berkas perkara an. terdakwa dr. BAMBANG MARSUDI RAHARJA Bin ASWARI telah diputus oleh Pengadilan Tipikor pada PN Jambi melalui Surat Putusan Nomor: 34/Pid. Sus-TPK/2019/PN Jambi tanggal 17 Maret 2020.

156. TPK Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang turut serta dalam pengadaan barang dan jasa yang diurus atau diawasinya atas nama terdakwa ESH yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Sulawesi Selatan.

Posisi sebelum supervisi: Tahap II berdasarkan Surat Nomor: C1.02/41/V/2018/Dit Reskrimsus tanggal 24 Mei 2018.

Posisi setelah supervisi: Perkara telah inkraht berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor 51/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks

157. Dugaan TPK Pengadaan Barang Persediaan Sanggar Kerajinan Lorong-lorong Kota Makassar pada Dinas Koperasi dan UKM TA 2016 atas nama terdakwa AGS yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Sulawesi Selatan.

Posisi sebelum supervisi: telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti

(Tahap II) ke JPU Kejati Sulawesi Selatan.

Posisi setelah supervisi: Perkara telah inkraht berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks.

158. TPK pada Pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning di PT. Pertamina EP Cepu ADK Tahun TPK pada Pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning di PT. Pertamina EP Cepu ADK Tahun 2014 dengan terdakwa an. ANDY RIKIE LAM

Posisi setelah supervisi: Dakwaan terbukti dengan putusan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, pidana denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp116.434.368.945,30 (seratus enam belas milyar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh lima rupiah, tiga puluh sen).

159. Dugaan TPK kegiatan pengadaan Alkes, Dokter dan KB RSUD dr. RASIDIN Kota Padang Tahun Anggaran 2013 yang terjadi pada Tahun Anggaran 2013 atas nama terdakwa dr. ARTATI SURYANI, M.P.H. BINTI SUDARJO PANOET.

Posisi setelah supervisi: Dakwaan terbukti dengan putusan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, pidana denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp136.500.000 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

160. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana APBD Kota Palembang TA 2013 pada Kegiatan Pembangunan Gerbang Batas Kota Palembang-Ogan Ilir Lokasi Jakabaring Kec. SU I Kota Palembang yang dilaksanakan oleh Dinas PU Cipta Karya Kota Palembang Tahun 2013 atas nama Tsk AHMAT TOHA, S.E Bin ABIDIN yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.

Hasil Supervisi: Berkas perkara telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap (inkraht) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 02 Desember 2019.

161. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana APBD Kota Palembang TA 2013 pada Kegiatan Pembangunan Gerbang Batas Kota Palembang-Ogan Ilir Lokasi Jakabaring Kec. SU I Kota Palembang yang dilaksanakan oleh Dinas PU Cipta Karya Kota Palembang Tahun 2013 atas nama Tsk ASMOL HAKIM, S.T Bin YARIF HUSIN yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.

Hasil Supervisi: Berkas perkara telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap (inkraht) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 02 Desember 2019.

162. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana APBD Kota Palembang TA 2013 pada Kegiatan

- Pembangunan Gerbang Batas Kota Palembang-Ogan Ilir Lokasi Jakabaring Kec. SU I Kota Palembang yang dilaksanakan oleh Dinas PU Cipta Karya Kota Palembang Tahun 2013 atas nama Tsk M. ICHSAN PAHLEVI, S.E Bin SYAMSUDIN ACHMAD yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.
- Hasil Supervisi: Berkas perkara telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap (inkracht) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 02 Desember 2019.
163. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana APBD Kota Palembang TA 2013 pada Kegiatan Pembangunan Gerbang Batas Kota Palembang-Ogan Ilir Lokasi Jakabaring Kec. SU I Kota Palembang yang dilaksanakan oleh Dinas PU Cipta Karya Kota Palembang Tahun 2013 atas nama Tsk KHAIRUL RIZAL, S.T, MTP Bin H NAHROWI yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.
- Hasil Supervisi: Berkas perkara telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap (inkracht) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 02 Desember 2019.
164. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana APBD Kota Palembang TA 2013 pada Kegiatan Pembangunan Gerbang Batas Kota Palembang-Banyuasin Lokasi Jalan Tanjung Api-Api Kec. Sukarami Kota Palembang yang dilaksanakan oleh Dinas PU Cipta Karya Kota Palembang Tahun 2013 atas nama Tsk OTONG ISKANDAR Z Bin UMAR yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.
- Hasil Supervisi: Telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap 2) berdasarkan surat Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Nomor: B/293.j/VIII/RES.1.24/2020/Reskrim tanggal 06 Agustus 2020.
165. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana APBD Kota Palembang TA 2013 pada Kegiatan Pembangunan Gerbang Batas Kota Palembang-Banyuasin Lokasi Jalan Tanjung Api-Api Kec. Sukarami Kota Palembang yang dilaksanakan oleh Dinas PU Cipta Karya Kota Palembang Tahun 2013 atas nama Tsk KHAIRUL RIZAL, S.T, MTP Bin H NAHROWI yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.
- Hasil Supervisi: Telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap 2) berdasarkan surat Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Nomor: B/292.j/VIII/RES.1.24/2020/Reskrim tanggal 06 Agustus 2020.
166. Dugaan TPK pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKPBPBS) pada Pekerjaan Perencanaan untuk Paket Kegiatan Pembangunan Terminal Pelabuhan Penyeberangan Balohan Sabang TA 2016 dengan anggaran sebesar Rp 633.975.000,- yang disidk oleh Kejari Sabang.
- Posisi setelah supervisi: Berkas perkara An. Tersangka T. HARRI KURNIASYAH, ST BIN T. HUSSAIN ALAMSYAH akan dilakukan penyerahan barang bukti dan tersangka (Tahap II) berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31) Nomor: B-786/L.1.16/Ft.1/08/2020 tanggal 3 Agustus 2020.
167. Dugaan TPK pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKPBPBS) pada Pekerjaan Perencanaan untuk Paket Kegiatan Pembangunan Terminal Pelabuhan Penyeberangan Balohan Sabang TA 2016 dengan anggaran sebesar Rp 633.975.000,- yang disidk oleh Kejari Sabang.
- Posisi setelah supervisi: Berkas perkara An. Tersangka MUHAMMAD TAJUDDIN, ST., M.Si Bin ALM. CHUZAIMAH akan dilakukan penyerahan barang bukti dan tersangka (Tahap II) berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31) Nomor: B-787/L.1.16/Ft.1/08/2020 tanggal 3 Agustus 2020.
168. Dugaan TPK pada Pembayaran gaji Pegawai Paratur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima yang terlibat Tindak Pidana dan telah mendapatkan Vonis Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- Hasil supervisi: Berkas perkara An. Tersangka Drs. SURIADI dan Drs. H. ALWI YASIN, M.Ap dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan Surat Nomor: B-1226/N.2.14/Fd.1/06/2020 tanggal 16 Juni 2020.
169. Dugaan TPK dan TPPU pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat pada Dinas Perumahan Prov. Papua Barat, TA. 2015 senilai Rp. 4.500.000.000,00,- atas nama Tersangka NINA DIANA.
- Posisi sebelum supervisi: Berkas perkara atas nama NINA DIANA telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat No: B-186/R.2.5/Ft.1/03/2020 pada tanggal 23 Maret 2020.
- Hasil supervisi: Berkas perkara atas nama Tersangka NINA DIANA telah dinyatakan Tahap II.
170. TPK dan TPPU dengan kasus pokok TPK Dana APBD Kabupaten Kaimana TA 2017 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana TA. 2017 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana untuk Pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) sesuai kontrak Nomor: 602/71/PUPR/2017 tanggal 25 September 2017 dengan nilai kontrak sejumlah Rp 18.280.000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) atas nama Tersangka JIMMY SEMUEL REINHARD.
- Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan. Telah dilakukan gelar perkara antara Penyidik Polda Papua Barat, Bareskrim Polri, dan Unit Koorwil Penindakan KPK pada tanggal 21 Juni 2019.
- Hasil supervisi: Berkas perkara atas nama Tersangka JIMMY SEMUEL REINHARD telah dinyatakan lengkap (P-21).
171. TPK dan TPPU dengan kasus pokok TPK Dana APBD Kabupaten Kaimana TA 2017 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana TA. 2017 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana untuk Pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) sesuai kontrak Nomor: 602/71/PUPR/2017 tanggal 25 September 2017 dengan nilai kontrak sejumlah Rp 18.280.000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) atas nama Tersangka CICILIA ESTI TRI WAHYUNI.
- Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan. Telah dilakukan gelar perkara antara Penyidik Polda Papua Barat, Bareskrim Polri, dan Unit Koorwil Penindakan KPK pada tanggal 21 Juni 2019.
- Hasil supervisi: Berkas perkara atas nama Tersangka CICILIA ESTI TRI WAHYUNI telah dinyatakan lengkap (P-21).
172. TPK dan TPPU dengan kasus pokok TPK Dana APBD Kabupaten Kaimana TA 2017 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana TA. 2017 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana untuk Pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) sesuai kontrak Nomor: 602/71/PUPR/2017 tanggal 25 September 2017 dengan nilai kontrak sejumlah Rp 18.280.000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) atas nama Tersangka DIAN PIETER THIE HONCE.
- Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan. Telah dilakukan gelar perkara antara Penyidik Polda Papua Barat, Bareskrim Polri, dan Unit Koorwil Penindakan KPK pada tanggal 21 Juni 2019.
- Hasil supervisi: Berkas perkara atas nama Tersangka DIAN PIETER THIE HONCE telah dinyatakan lengkap (P-21).
173. Dugaan TPK pada pengelolaan APBDes Desa Jeruklegi Kulon Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017, an. tersangka ITA ROSIDA, yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Cilacap.
- Posisi sebelum Supervisi: P-21
- Hasil Supervisi: Telah dilakukan pelimpahan perkara a quo ke Pengadilan Tipikor pada PN Semarang pada tanggal 26 Mei 2020.
174. Dugaan TPK penyimpangan/ penyelewengan keuangan negara pada pengelolaan keuangan daerah (Deposito) Kab. Muna TA. 2014-2015, yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Muna.
- Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan
- Hasil Supervisi: Telah dilakukan penghentian penyidikan melalui Surat Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: Print-778/P.3.13/07/2019 tanggal 18 Juli 2019.
175. Dugaan TPK kegiatan pengadaan Alkes, Dokter dan KB RSUD dr. RASIDIN Kota Padang Tahun Anggaran 2013 yang terjadi pada Tahun Anggaran 2013 atas nama terdakwa FERRY OKTAVIANO, SE.
- Hasil supervisi: Dakwaan terbukti dengan putusan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, pidana denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp231.950.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
176. Dugaan TPK kegiatan pengadaan Alkes, Dokter dan KB RSUD dr. RASIDIN Kota Padang Tahun Anggaran 2013 yang terjadi pada Tahun Anggaran 2013 atas nama terdakwa SAIFUL PALANTJUI dan ISKANDAR HAMZAH.
- Hasil supervisi: Dakwaan terbukti untuk terdakwa an. ISKANDAR HAMZAH dengan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, pidana denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan dakwaan terbukti untuk terdakwa an. SAIFUL PALANTJUI dengan putusan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, pidana denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)
177. Dugaan TPK Penyalahgunaan/ Penyelewengan Dana Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung (Prospek) Kab. Biak Numfor Tahun Anggaran 2017 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Polres Biak Numfor.
- Hasil supervisi: SP3 berdasarkan Surat Polres Biak Numfor Nomor: B/158.A5/VIII/2020/Reskrim tanggal 18 Agustus 2020.
178. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Kantor DPRD Kab. Morut Tahap I 2016 yang dikerjakan oleh PT. Multi Global Konstrindo dengan nilai kontrak setelah perubahan (Addendum) sebesar Rp.9.004.617.000,- yang diduga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara atas nama Tersangka Ir. SYARIFUDDIN H. MAJID yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah.
- Hasil Supervisi: Berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah melalui surat Nomor: B-60/P.2.5/Fd.1/4/2020 tanggal 06 April 2020.
179. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Kantor DPRD Kab. Morut Tahap I 2016 yang dikerjakan oleh PT. Multi Global Konstrindo dengan nilai kontrak setelah perubahan (Addendum) sebesar Rp.9.004.617.000,- yang diduga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara atas nama Tersangka GUSLAND TOMBOELU, S.Sos., MAP yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah.
- Hasil Supervisi: Berkas perkara telah dinyatakan

- lengkap (P-21) berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah melalui surat Nomor: B-173/P.2.5/Ft.1/9/2020 tanggal 16 September 2020.
180. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD Kab. Morowali Utara TA 2015 dengan nilai Rp.588.000.000,- yang diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atas nama Tsk TERHARD LAWANDI, S.Sos, M.Si yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah.  
Hasil Supervisi: Berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah melalui surat Nomor: B-59/P.2.5/Fd.1/4/2020 tanggal 06 April 2020.
181. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD Kab. Morowali Utara TA 2015 dengan nilai Rp.588.000.000,- yang diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atas nama Tsk ABDUL RIFAI BAGENDA, S.H yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah.  
Hasil Supervisi: Berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah melalui surat Nomor: B-174/P.2.5/Fd.1/4/2020 tanggal 06 April 2020.
182. Dugaan TPK penyalahgunaan APBD TA 2013 untuk pekerjaan pematangan tanah lokasi kantor BPBD Kab. Raja Ampat atas nama Tersangka ALFARIS MAMBRAKU yang ditangani oleh Polres Raja Ampat  
Posisi sebelum Supervisi: Berkas perkara atas nama Tersangka ALFARIS MAMBRAKU telah dinyatakan lengkap (P-21).  
Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama Tersangka ALFARIS MAMBRAKU telah dilakukan penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) berdasarkan surat Nomor B/273/IX/2020/Reskrim tanggal 9 September 2020.
183. Dugaan TPK penyalahgunaan APBD TA 2013 untuk pekerjaan pematangan tanah lokasi kantor BPBD Kab. Raja Ampat atas nama Tersangka KARIM KADIR yang ditangani oleh Polres Raja Ampat  
Posisi sebelum Supervisi: Berkas perkara atas nama Tersangka KARIM KADIR telah dinyatakan lengkap (P-21).  
Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama Tersangka KARIM KADIR telah dilakukan penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) berdasarkan surat Nomor B/270/IX/2020/Reskrim tanggal 9 September.
184. Dugaan TPK penyalahgunaan APBD TA 2013 untuk pekerjaan pematangan tanah lokasi kantor BPBD Kab. Raja Ampat atas nama Tersangka ABU SALEH TAFALAS yang ditangani oleh Polres Raja Ampat  
Posisi sebelum Supervisi: Berkas perkara atas nama Tersangka ABU SALEH TAFALAS telah dinyatakan lengkap (P-21).  
Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama Tersangka ABU SALEH TAFALAS telah dilakukan penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) berdasarkan surat Nomor B/271/IX/2020/Reskrim tanggal 9 September.
185. Dugaan TPK penyalahgunaan APBD TA 2013 untuk pekerjaan pematangan tanah lokasi kantor BPBD Kab. Raja Ampat atas nama Tersangka MUH. YAMIN MARADJABESSY yang ditangani oleh Polres Raja Ampat  
Posisi sebelum Supervisi: Berkas perkara atas nama Tersangka MUH. YAMIN MARADJABESSY telah dinyatakan lengkap (P-21).  
Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama Tersangka MUH. YAMIN MARADJABESSY telah dilakukan penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) berdasarkan surat Nomor B/272/IX/2020/Reskrim tanggal 9 September.
186. Dugaan TPK penyalahgunaan APBD TA 2013 untuk pekerjaan pematangan tanah lokasi kantor BPBD Kab. Raja Ampat atas nama Tersangka ANDI ABDUL KADIR yang ditangani oleh Polres Raja Ampat  
Posisi sebelum Supervisi: Berkas perkara atas nama Tersangka ANDI ABDUL KADIR telah dinyatakan lengkap (P-21).  
Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama Tersangka ANDI ABDUL KADIR telah dilakukan penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) berdasarkan surat Nomor B/274/IX/2020/Reskrim tanggal 9 September.
187. Dugaan TPK penyalahgunaan APBD TA 2013 untuk pekerjaan pematangan tanah lokasi kantor BPBD Kab. Raja Ampat atas nama Tersangka YUSRAN yang ditangani oleh Polres Raja Ampat  
Posisi sebelum Supervisi: Berkas perkara atas nama Tersangka YUSRAN telah dinyatakan lengkap (P-21).  
Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama Tersangka YUSRAN telah dilakukan penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) berdasarkan surat Nomor B/275/IX/2020/Reskrim tanggal 9 September.
188. Dugaan TPK penyalahgunaan APBD TA 2013 untuk pekerjaan pematangan tanah lokasi kantor BPBD Kab. Raja Ampat atas nama Tersangka AHMAD RIZAL yang ditangani oleh Polres Raja Ampat  
Posisi sebelum Supervisi: Berkas perkara atas nama Tersangka AHMAD RIZAL telah dinyatakan lengkap (P-21).  
Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama Tersangka AHMAD RIZAL telah dilakukan penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) berdasarkan surat Nomor B/276/IX/2020/Reskrim tanggal 9 September.
189. Dugaan TPK penyalahgunaan APBD TA 2013 untuk pekerjaan pematangan tanah lokasi kantor BPBD Kab. Raja Ampat atas nama Tersangka AHMAD RIDHA HANAFI yang ditangani oleh Polres Raja Ampat  
Posisi sebelum Supervisi: Berkas perkara atas nama Tersangka AHMAD RIDHA HANAFI telah dinyatakan lengkap (P-21).  
Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama Tersangka AHMAD RIDHA HANAFI telah dilakukan penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) berdasarkan surat Nomor B/277/IX/2020/Reskrim tanggal 9 September.
190. Dugaan TPK dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Auditorium Serba Guna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi TA 2018 an. tersangka KRISTIANA,ST.,M.PSDA BINTI ANWAR, yang penanangan perkaranya dilaksanakan oleh Kejati Jambi.  
Posisi sebelum supervisi: Tahap Persidangan  
Hasil Supervisi: Berkas Perkara atas nama tersangka KRISTIANA,ST.,M.PSDA BINTI ANWAR telah diputus oleh Pengadilan Tipikor pada PN Jambi pada tanggal 16 September 2020.
191. Dugaan TPK dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Auditorium Serba Guna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi TA 2018 an. tersangka ISKANDAR ZULKARNAEN ALS RUDI BIN H.M.YUSUF, yang penanangan perkaranya dilaksanakan oleh Kejati Jambi.  
Posisi sebelum supervisi: Tahap Persidangan  
Hasil supervisi: Berkas Perkara atas nama tersangka ISKANDAR ZULKARNAEN ALS RUDI BIN H.M.YUSUF telah diputus oleh Pengadilan Tipikor pada PN Jambi pada tanggal 16 September 2020.
192. Dugaan TPK dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Auditorium Serba Guna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi TA 2018 an. tersangka HERMANTONI, SPd.I BIN ABDUL MAKI, yang penanangan perkaranya dilaksanakan oleh Kejati Jambi.  
Posisi sebelum supervisi: Tahap Persidangan  
Hasil supervisi: Berkas Perkara atas nama tersangka HERMANTONI, SPd.I BIN ABDUL MAKI telah diputus oleh Pengadilan Tipikor pada PN Jambi pada tanggal 16 September 2020.
193. Dugaan TPK dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Auditorium Serba Guna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi TA 2018 an. tersangka JOHN SIMBOLON, yang penanangan perkaranya dilaksanakan oleh Kejati Jambi.  
Posisi sebelum supervisi: Tahap Persidangan  
Hasil supervisi: Berkas Perkara atas nama tersangka JOHN SIMBOLON telah diputus oleh Pengadilan Tipikor pada PN Jambi pada tanggal 16 September 2020.
194. Dugaan TPK Pengadaan Barang Persediaan Sanggar Kerajinan Lorong-lorong Kota Makassar pada Dinas Koperasi dan UKM TA 2016 atas nama tersangka MEE yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Sulawesi Selatan.  
Posisi sebelum supervisi: tahap penyidikan.  
Hasil supervisi: Penyidikan perkara telah selesai (P-21).
195. Dugaan TPK Pengadaan Barang Persediaan Sanggar Kerajinan Lorong-lorong Kota Makassar pada Dinas Koperasi dan UKM TA 2016 atas nama tersangka MEE yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Sulawesi Selatan.  
Posisi sebelum supervisi: penyidikan telah selesai (P-21).  
Hasil supervisi: dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) ke JPU Kejati Sulawesi Selatan.
196. Dugaan TPK Pengadaan Barang Persediaan Sanggar Kerajinan Lorong-lorong Kota Makassar pada Dinas Koperasi dan UKM TA 2016 atas nama terdakwa MEE yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Sulawesi Selatan.  
Posisi sebelum supervisi: dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) ke JPU Kejati Sulawesi Selatan.  
Hasil supervisi: Perkara telah inkraht berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks.
197. Dugaan TPK pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat dengan nilai kontrak Rp 9.966.330 dan Dugaan TPK pengadaan dan pemasangan jaringan pipa wilayah Kec. Telluwanua dengan nilai kontrak Rp 4.643.170.000 atas nama tersangka BS yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Sulawesi Selatan.  
Posisi sebelum supervisi: tahap penyidikan.  
Hasil supervisi: penyidikan telah selesai (P-21) berdasarkan surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan nomor B-69/P.4.5/Ft.1/06/2020 tanggal 5 Juni 2020.
198. Dugaan TPK pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat dengan nilai kontrak Rp 9.966.330 dan Dugaan TPK pengadaan dan pemasangan jaringan pipa wilayah Kec. Telluwanua dengan nilai kontrak Rp 4.643.170.000 atas nama tersangka AD yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Sulawesi Selatan.  
Posisi sebelum supervisi: tahap penyidikan.  
Posisi setelah supervisi: penyidikan telah selesai (P-21) berdasarkan surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan nomor B-68/P.4.5/Ft.1/06/2020 tanggal 5 Juni 2020.
199. Dugaan TPK pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat dengan nilai kontrak Rp 9.966.330 dan Dugaan TPK pengadaan dan pemasangan jaringan pipa wilayah Kec. Telluwanua dengan nilai kontrak Rp 4.643.170.000 atas nama tersangka HA yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Sulawesi Selatan.  
Posisi sebelum supervisi: tahap penyidikan.  
Hasil supervisi: penyidikan telah selesai (P-21) berdasarkan surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan nomor B-67/P.4.5/Ft.1/06/2020 tanggal

- 5 Juni 2020.
200. Dugaan TPK pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat dengan nilai kontrak Rp 9.966.330 dan Dugaan TPK pengadaan dan pemasangan jaringan pipa wilayah Kec. Telluwanua dengan nilai kontrak Rp 4.643.170.000 atas nama tersangka IA yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Sulawesi Selatan.  
Posisi sebelum supervisi: tahap penyidikan.  
Hasil supervisi: penyidikan telah selesai (P-21) berdasarkan surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan nomor B-71/P.4.5/Ft.1/06/2020 tanggal 5 Juni 2020.
201. Dugaan TPK pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat dengan nilai kontrak Rp 9.966.330 dan Dugaan TPK pengadaan dan pemasangan jaringan pipa wilayah Kec. Telluwanua dengan nilai kontrak Rp 4.643.170.000 atas nama tersangka FF yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Sulawesi Selatan.  
Posisi sebelum supervisi: tahap penyidikan.  
Hasil supervisi: penyidikan telah selesai (P-21) berdasarkan surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan nomor B-70/P.4.5/Ft.1/06/2020 tanggal 5 Juni 2020.
202. Dugaan TPK pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat dengan nilai kontrak Rp 9.966.330 dan Dugaan TPK pengadaan dan pemasangan jaringan pipa wilayah Kec. Telluwanua dengan nilai kontrak Rp 4.643.170.000 atas nama tersangka BS yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Sulawesi Selatan.  
Posisi sebelum supervisi: penyidikan telah selesai (P-21) berdasarkan surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan nomor B-69/P.4.5/Ft.1/06/2020 tanggal 5 Juni 2020  
Hasil supervisi: telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) ke JPU Kejati Sulawesi Selatan berdasarkan surat Polda Sulawesi Selatan nomor C.1.02/44/VIII/2020/Ditreskrimsus tanggal 7 Agustus 2020.
203. Dugaan TPK pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat dengan nilai kontrak Rp 9.966.330 dan Dugaan TPK pengadaan dan pemasangan jaringan pipa wilayah Kec. Telluwanua dengan nilai kontrak Rp 4.643.170.000 atas nama tersangka AD yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Sulawesi Selatan.  
Posisi sebelum supervisi: penyidikan telah selesai (P-21) berdasarkan surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan nomor B-68/P.4.5/Ft.1/06/2020 tanggal 5 Juni 2020.  
Hasil supervisi: telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) ke JPU Kejati Sulawesi Selatan berdasarkan surat Polda Sulawesi Selatan nomor C.1.02/45/VIII/2020/Ditreskrimsus tanggal 7 Agustus 2020.
204. Dugaan TPK pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat dengan nilai kontrak Rp 9.966.330 dan Dugaan TPK pengadaan dan pemasangan jaringan pipa wilayah Kec. Telluwanua dengan nilai kontrak Rp 4.643.170.000 atas nama tersangka HA yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Sulawesi Selatan.  
Posisi sebelum supervisi: penyidikan telah selesai (P-21) berdasarkan surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan nomor B-67/P.4.5/Ft.1/06/2020 tanggal 5 Juni 2020.  
Hasil supervisi: telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) ke JPU Kejati Sulawesi Selatan berdasarkan surat Polda Sulawesi Selatan nomor C.1.02/48/VIII/2020/Ditreskrimsus tanggal 7 Agustus 2020.
205. Dugaan TPK pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat dengan nilai kontrak Rp 9.966.330 dan Dugaan TPK pengadaan dan pemasangan jaringan pipa wilayah Kec. Telluwanua dengan nilai kontrak Rp 4.643.170.000 atas nama tersangka IA yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Sulawesi Selatan.  
Posisi sebelum supervisi: penyidikan telah selesai (P-21) berdasarkan surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan nomor B-71/P.4.5/Ft.1/06/2020 tanggal 5 Juni 2020.  
Hasil supervisi: telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) ke JPU Kejati Sulawesi Selatan berdasarkan surat Polda Sulawesi Selatan nomor C.1.02/46/VIII/2020/Ditreskrimsus tanggal 7 Agustus 2020.
206. Dugaan TPK pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat dengan nilai kontrak Rp 9.966.330 dan Dugaan TPK pengadaan dan pemasangan jaringan pipa wilayah Kec. Telluwanua dengan nilai kontrak Rp 4.643.170.000 atas nama tersangka FF yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Sulawesi Selatan.  
Posisi sebelum supervisi: penyidikan telah selesai (P-21) berdasarkan surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan nomor B-70/P.4.5/Ft.1/06/2020 tanggal 5 Juni 2020.  
Hasil supervisi: telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) ke JPU Kejati Sulawesi Selatan berdasarkan surat Polda Sulawesi Selatan nomor C.1.02/47/VIII/2020/Ditreskrimsus tanggal 7 Agustus 2020.
207. TPK pada Pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning di PT. Pertamina EP Cepu ADK Tahun TPK pada Pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning di PT. Pertamina EP Cepu ADK Tahun 2014 dengan terdakwa an. PERRY WIDYANANDA.  
Hasil Supervisi: Dakwaan terbukti dengan putusan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun berdasarkan putusan PN nomor: 104/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst tanggal 15 Juli 2020.
208. Dugaan TPK pada Peningkatan Jalan Ruas Bumi Jawa - Purbolinggo oleh CV. Tangguh Serasi senilai Rp. 2.141.800.000,- pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015 dengan Tersangka atas nama ZULYADI.  
Hasil Supervisi: P-21 berdasarkan Surat Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor: B-4415/L.8.5/Ft.1/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019.
209. Dugaan TPK pada Peningkatan Jalan Ruas Bumi Jawa - Purbolinggo oleh CV. Tangguh Serasi senilai Rp. 2.141.800.000,- pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015 dengan Tersangka atas nama ZULYADI.  
Hasil Supervisi: Tahap II berdasarkan Nota Dinas dari Aspidsus Kejati Lampung kepada Kajati Lampung Nomor: ND-144/L.8.5/Fd.1/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019.
210. Dugaan TPK pada Peningkatan Jalan Ruas Bumi Jawa - Purbolinggo oleh CV. Tangguh Serasi senilai Rp. 2.141.800.000,- pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015 dengan Tersangka atas nama ZULYADI.  
Hasil Supervisi: Telah memperoleh putusan Pengadilan Negeri Nomor: 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tjk tanggal 13 Februari 2020.
211. Dugaan TPK dalam kegiatan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I pada Dinas Perhubungan Prov. Lampung TA 2014 dengan Tersangka atas nama SULAIMAN.  
Hasil Supervisi: P-21 berdasarkan Surat Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor: B-4952/L.8.5/Ft.1/11/2019 tanggal 29 November 2019.
212. Dugaan TPK dalam kegiatan pengadaan gedung Rawat Inap Lt. 2 dan Lt. 3 RSUD Kabupaten Pesawaran TA. 2018 dengan Tersangka atas nama TAUFIQ URRAHMAN.  
Hasil Supervisi: P-21 berdasarkan Surat Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor: B-5179/L.8.5/Ft.1/12/2019 tanggal 18 Desember 2019.
213. Dugaan TPK dalam kegiatan pengadaan gedung Rawat Inap Lt. 2 dan Lt. 3 RSUD Kabupaten Pesawaran TA. 2018 dengan Tersangka atas nama RADEN INTAN PUTRA.  
Hasil Supervisi: P-21 berdasarkan Surat Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor: B-5178/L.8.5/Ft.1/12/2019 tanggal 18 Desember 2019.
214. Dugaan TPK dalam kegiatan pengadaan gedung Rawat Inap Lt. 2 dan Lt. 3 RSUD Kabupaten Pesawaran TA. 2018 dengan Tersangka atas nama JULI.  
Hasil Supervisi: P-21 berdasarkan Surat Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor: B-5180/L.8.5/Ft.1/12/2019 tanggal 18 Desember 2019.
215. Dugaan TPK dalam kegiatan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I pada Dinas Perhubungan Prov. Lampung TA 2014 dengan Tersangka atas nama SULAIMAN.  
Hasil Supervisi: Tahap II berdasarkan Surat Kepolisian Daerah Lampung Nomor: BP/25/V/2019/DITRESKRIMSUS tanggal 13 Mei 2019.
216. Dugaan TPK dalam kegiatan pengadaan gedung Rawat Inap Lt. 2 dan Lt. 3 RSUD Kabupaten Pesawaran TA. 2018 dengan Tersangka atas nama TAUFIQ URRAHMAN.  
Hasil Supervisi: Tahap II berdasarkan Surat Kepolisian Daerah Lampung Nomor: BP/65/X/2019/2019/subdit/reskrimsus tanggal 24 Oktober 2019.
217. Dugaan TPK dalam kegiatan pengadaan gedung Rawat Inap Lt. 2 dan Lt. 3 RSUD Kabupaten Pesawaran TA. 2018 dengan Tersangka atas nama RADEN INTAN PUTRA.  
Hasil Supervisi: Tahap II berdasarkan Surat Kepolisian Daerah Lampung Nomor: BP/63/X/2019/2019/subdit/reskrimsus tanggal 24 Oktober 2019.
218. Dugaan TPK dalam kegiatan pengadaan gedung Rawat Inap Lt. 2 dan Lt. 3 RSUD Kabupaten Pesawaran TA. 2018 dengan Tersangka atas nama JULI.  
Hasil Supervisi: Tahap II berdasarkan Surat Kepolisian Daerah Lampung Nomor: BP/64/X/2019/2019/subdit/reskrimsus tanggal 24 Oktober 2019.
219. Dugaan TPK pada Pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang bersumber dari APBN TA. 2015 dan 2016 Periode Januari - April 2016 dan Dana BOMM/SSM (Bantuan Operasional Manajemen Mutu - Subsidi Sekolah Menengah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat yang disidik oleh Polres Polewali Mandar atas nama Terdakwa atas nama NIRMALASARI S.Pd.I als. MALA binti ABD. LATIF.  
Hasil Supervisi: Perkara atas nama Terdakwa NIRMALASARI S.Pd.I als. MALA binti ABD. LATIF telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 25 Agustus 2020.
220. Dugaan TPK pada Pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang bersumber dari APBN TA. 2015 dan 2016 Periode Januari - April 2016 dan Dana BOMM/SSM (Bantuan Operasional Manajemen Mutu - Subsidi Sekolah Menengah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat yang disidik oleh Polres Polewali Mandar atas nama Terdakwa MUHAMMAD SIDIQ, S.Pd bin H. M. TALIB.  
Hasil Supervisi: Perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD SIDIQ, S.Pd bin H. M. TALIB telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 25 Agustus 2020.

221. Dugaan TPK pada Pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang bersumber dari APBN TA. 2015 dan 2016 Periode Januari - April 2016 dan Dana BOMM/SSM (Bantuan Operasional Manajemen Mutu - Subsidi Sekolah Menengah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat yang disidik oleh Polres Polewali Mandar atas nama Terdakwa ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag bin HEIN TAKINTA.  
Hasil Supervisi: Perkara atas nama Terdakwa ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag bin HEIN TAKINTA telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 25 Agustus 2020.
222. Dugaan TPK pada Pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang bersumber dari APBN TA. 2015 dan 2016 Periode Januari - April 2016 dan Dana BOMM/SSM (Bantuan Operasional Manajemen Mutu - Subsidi Sekolah Menengah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat yang disidik oleh Polres Polewali Mandar atas nama Terdakwa YUSNAENI S.Pd als. IJA binti ZAINUDDIN.  
Hasil Supervisi: Perkara atas nama Terdakwa YUSNAENI S.Pd als. IJA binti ZAINUDDIN telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 25 Agustus 2020.
223. Dugaan TPK pembangunan jembatan Sungai Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir TA 2013 atas nama Tersangka H. JAMARIS. ST  
Hasil Supervisi: SP3 berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Kajari Indragiri Hilir Nomor: Print-03/L.4.14/Fd.1/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020.
224. Dugaan TPK penyimpangan penyaluran dana bantuan khusus desa dari BPKAD Kabupaten Bengkayang kepada Kepala Desa di wilayah Kabupaten Bengkayang yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017 atas nama tersangka BENEDIKTUS BASUNI, yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Kalimantan Barat.  
Hasil supervisi: Berkas perkara atas nama BENEDIKTUS BASUNI telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (Inkracht) berdasarkan putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk.
225. Dugaan TPK Bantuan Sosial untuk pemberdayaan sosial dalam bentuk uang dalam rangka bantuan pengembangan sarana serta sentra pemberdayaan pemuda Tahun 2013 yang diterima pengelola sentra pemuda Kec. Butuh Kab. Purworejo Alamat Jl. Raya Kebumen Km.05, Butuh Kab. Purworejo, yang terjadi pada tahun 2012 s/d 2014 di Gedung sentra pemuda Tjokronegoro ikut Desa Dlangu Kec. Butuh Kab. Purworejo, yang ditangani oleh Polres Purworejo.  
Hasil supervisi: Telah mendapat putusan Pengadilan Negeri Semarang atas nama terdakwa Ahmad Alaudin Syarif berdasarkan putusan nomor 89/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg tanggal 16 Maret 2020.
226. Dugaan TPK Penyalahgunaan Wewenang dalam Pelaksanaan Kegiatan Operasional Sistem Polder Kali Semarang (Pekerjaan Grease Pelumas Pada Dinas PSDA dan ESDM Semarang TA. 2014), yang ditangani oleh Polrestabes Semarang.  
Hasil supervisi: Perkara telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa Peneliti Berkas Perkara pada Kejaksaan Negeri Semarang berdasarkan surat nomor B-1386/M.3.10/Ft.1/06/2020 tanggal 24 Juni 2020.
227. Dugaan TPK penyimpangan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban Anggaran/Dana Jasa Pelabuhan di lingkungan PT. Pertamina RU-IV Cilacap Fungsi Marine atas nama tersangka Andriyanto, yang ditangani oleh Kejari Cilacap.  
Hasil supervisi: Perkara atas nama tersangka Andriyanto telah dinyatakan lengkap (P21) berdasarkan surat nomor ND-25/M.3.17/Fd.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020.
228. Dugaan TPK penyimpangan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban Anggaran/Dana Jasa Pelabuhan di lingkungan PT. Pertamina RU-IV Cilacap Fungsi Marine, atas nama tersangka Andriyanto, yang ditangani oleh Kejari Cilacap.  
Hasil supervisi: Perkara telah dilakukan tahap 2 pada tanggal 21 Oktober 2020.
229. Dugaan TPK terkait Red Notice atas nama JOKO SOEGIARTO TJANDRA yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Bareskrim Polri dengan tersangka atas nama TOMMY SUMARDI.  
Hasil supervisi: P-21 berdasarkan surat kepada Kejaksaan Agung Nomor: B-42/F.3/Ft.1/10/2020 tanggal 5 Oktober 2020.
230. Dugaan TPK terkait Red Notice atas nama JOKO SOEGIARTO TJANDRA yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Bareskrim Polri dengan tersangka atas nama PRASETIJO UTOMO, S.I.K., M.Si,  
Hasil supervisi: P-21 berdasarkan surat kepada Kejaksaan Agung Nomor: B-40/F.3/Ft.1/10/2020 tanggal 5 Oktober 2020.
231. Dugaan TPK terkait Red Notice atas nama JOKO SOEGIARTO TJANDRA yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Bareskrim Polri dengan tersangka atas nama JOKO SOEGIARTO TJANDRA.  
Hasil supervisi: P-21 berdasarkan surat kepada Kejaksaan Agung Nomor: B-39/F.3/Ft.1/10/2020 tanggal 5 Oktober 2020.
232. Dugaan TPK terkait Red Notice atas nama JOKO SOEGIARTO TJANDRA yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Bareskrim Polri dengan tersangka atas nama NAPOLEON BONAPARTE.  
Hasil supervisi: P-21 berdasarkan surat kepada Kejaksaan Agung Nomor: B-41/F.3/Ft.1/10/2020 tanggal 5 Oktober 2020.
233. Dugaan TPK terkait Red Notice atas nama JOKO SOEGIARTO TJANDRA yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Bareskrim Polri dengan tersangka atas nama JOKO SOEGIARTO TJANDRA.  
Hasil supervisi: Tahap 2 berdasarkan surat kepada Kejaksaan Agung Nomor: B-B/5736/X/RES.3.2/2020/Bareskrim tanggal 14 Oktober 2020.
234. Dugaan TPK terkait Red Notice atas nama JOKO SOEGIARTO TJANDRA yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Bareskrim Polri dengan tersangka atas nama NAPOLEON BONAPARTE.  
Hasil supervisi: Tahap 2 berdasarkan surat kepada Kejaksaan Agung Nomor: B-B/5733/X/RES.3.2/2020/Bareskrim tanggal 14 Oktober 2020.
235. Dugaan TPK terkait Red Notice atas nama JOKO SOEGIARTO TJANDRA yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Bareskrim Polri dengan tersangka atas nama PRASETIJO UTOMO.  
Hasil supervisi: Tahap 2 berdasarkan surat kepada Kejaksaan Agung Nomor: B-B/5734/X/RES.3.2/2020/Bareskrim tanggal 14 Oktober 2020.
236. Dugaan TPK terkait Red Notice atas nama JOKO SOEGIARTO TJANDRA yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Bareskrim Polri dengan tersangka atas nama TOMMY SUMARDI.  
Hasil supervisi: Tahap 2 berdasarkan surat kepada Kejaksaan Agung Nomor: B-B/5735/X/RES.3.2/2020/Bareskrim tanggal 14 Oktober 2020.
237. Dugaan TPK pada kegiatan penyelesaian Pembangunan WTP III dan Pemasangan Pipa Distribusi Utama sepanjang 600 meter di lokasi WTP Beting Semelur PDAM Tirta Kualo Kota Tanjung Balai Sumber Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2012-2014 dengan pagu Rp. 11.000.000.000 (sebelas milyar rupiah) atas nama tersangka Oktavia Sihombing yang disidik oleh Polda Sumatera Utara.  
Hasil supervisi: Putusan Pengadilan Tipidkor pada PN Sumatera Utara Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tanggal 30 September 2020.
238. Dugaan TPK pada kegiatan penyelesaian Pembangunan WTP III dan Pemasangan Pipa Distribusi Utama sepanjang 600 meter di lokasi WTP Beting Semelur PDAM Tirta Kualo Kota Tanjung Balai Sumber Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2012-2014 dengan pagu Rp. 11.000.000.000 (sebelas milyar rupiah) atas nama tersangka Zaharuddin Sinaga, SE yang disidik oleh Polda Sumatera Utara.  
Hasil supervisi: Putusan Pengadilan Tipidkor pada PN Sumatera Utara Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tanggal 30 September 2020.
239. Dugaan TPK pada kegiatan penyelesaian Pembangunan WTP III dan Pemasangan Pipa Distribusi Utama sepanjang 600 meter di lokasi WTP Beting Semelur PDAM Tirta Kualo Kota Tanjung Balai Sumber Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2012-2014 dengan pagu Rp. 11.000.000.000 (sebelas milyar rupiah) atas nama tersangka Herianto, SE yang disidik oleh Polda Sumatera Utara.  
Hasil supervisi: Putusan Pengadilan Tipidkor pada PN Sumatera Utara Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tanggal 30 September 2020.
240. Dugaan TPK Kegiatan pembangunan Pasar Baqa Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pasar Kota Samarinda dengan Tersangka atas nama MIFTACHUL CHOIR, ST bin ZAMHOERI.  
Hasil Supervisi: Telah memperoleh Putusan Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 4/Pid.sus-TPK/2020/PN.Smr tanggal 18 Juni 2020 dan telah dilaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut berdasarkan Surat Perintah Putusan Pengadilan Nomor: PRINT-3599/O.4.11/Fu.1/07/2020.
241. Dugaan TPK atau penyalahgunaan wewenang dalam jabatan terhadap program kegiatan Rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung Bukit Suligi Blok A seluas 250 Ha. APBN TA 2010 sebesar Rp.780.960.000,- atas nama Tersangka H. YOSRIZAL, SP., JAMRIS Als. IJAM Bin JA'PAR.  
Hasil Supervisi: Perkara atas nama Terdakwa H. YOSRIZAL, SP., JAMRIS Als. IJAM Bin JA'PAR telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/Pbr, tanggal 19 Desember 2019.
242. TPK Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan Keluarga Berencana (KB) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soewondo Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2013, an. tersangka Zaenal Arifin, yang ditangani oleh Kejari Kendal.  
Hasil supervisi: Telah dilakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti an. tersangka Zaenal Arifin (Tahap II) berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Nomor: B/645/M.3.27/Ft.1/11/2020 tanggal 30 November 2020.
243. TPK Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan Keluarga Berencana (KB) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soewondo Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2013, an. tersangka Enny Kusumawati, yang ditangani oleh Kejari Kendal.  
Hasil supervisi: Telah dilakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti an. tersangka Enny Kusumawati (Tahap II) berdasarkan Surat

- Pelimpahan Perkara Nomor: B/647/M.3.27/ Ft.1/11/2020 tanggal 30 November 2020.
244. Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pembelian tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 297 di Jorong Tabek Nagari Tabek Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar seharga 600 Juta oleh Unit Pengelola Kegiatan dengan tersangka atas nama ROBER ANIZA DATUAK TALANAI SATI yang Penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Polres Tanah Datar. Hasil supervisi: P-21 berdasarkan surat kepada Kejaksaan Negeri Tanah Datar Nomor: B-1485/L.3.17/Fd.1/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020.
245. Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pembelian tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 297 di Jorong Tabek Nagari Tabek Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar seharga 600 Juta oleh Unit Pengelola Kegiatan dengan tersangka atas nama GUSNALDI, S.H yang Penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Polres Tanah Datar. Hasil supervisi: P-21 berdasarkan surat kepada Kejaksaan Negeri Tanah Datar Nomor: B-1486/L.3.17/Fd.1/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020.
246. Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pembelian tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 297 di Jorong Tabek Nagari Tabek Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar seharga 600 Juta oleh Unit Pengelola Kegiatan dengan tersangka atas nama ROBER ANIZA DATUAK TALANAI SATI yang Penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Polres Tanah Datar. Hasil supervisi: Tahap II berdasarkan surat kepada Kejaksaan Negeri Tanah Datar Nomor: R/159/X/2020/Reskrim tanggal 31 Oktober 2020.
247. Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pembelian tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 297 di Jorong Tabek Nagari Tabek Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar seharga 600 Juta oleh Unit Pengelola Kegiatan dengan tersangka atas nama GUSNALDI yang Penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Polres Tanah Datar. Hasil supervisi: Tahap II berdasarkan surat kepada Kejaksaan Negeri Tanah Datar Nomor: R/160/X/2020/Reskrim tanggal 31 Oktober 2020.
248. Dugaan TPK pengadaan tanah untuk tempat pembuangan sampah atau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Desa Dokan Kecamatan Merek Kabupaten Karo Tahun 2016 sebesar Rp. 2.525.000.000 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karo atas nama tersangka Chandra Tarigan yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Karo. Hasil supervisi: P-21 berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Karo melalui surat Nomor: B-3084/L.2.19/FT.1/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020.
249. Dugaan TPK pengadaan tanah untuk tempat pembuangan sampah atau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Desa Dokan Kecamatan Merek Kabupaten Karo Tahun 2016 sebesar Rp. 2.525.000.000 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karo atas nama tersangka Chandra Tarigan yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Karo. Hasil supervisi: Limpah ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Perkara: 72/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tanggal register 27 Oktober 2020.
250. Dugaan TPK pengadaan tanah untuk tempat pembuangan sampah atau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Desa Dokan Kecamatan Merek Kabupaten Karo Tahun 2016 sebesar Rp. 2.525.000.000 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karo atas nama tersangka Sueka Bonafide Baron Kaban yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Karo. Hasil supervisi: P-21 berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Karo melalui surat Nomor: B-2069/L.2.19/FT.1/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020.
251. Dugaan TPK pengadaan tanah untuk tempat pembuangan sampah atau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Desa Dokan Kecamatan Merek Kabupaten Karo Tahun 2016 sebesar Rp. 2.525.000.000 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karo atas nama tersangka Sueka Bonafide Baron Kaban yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Karo. Hasil supervisi: Limpah ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Perkara: 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tanggal register 10 Agustus 2020.
252. Dugaan TPK pengadaan tanah untuk tempat pembuangan sampah atau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Desa Dokan Kecamatan Merek Kabupaten Karo Tahun 2016 sebesar Rp. 2.525.000.000 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karo atas nama tersangka Risdianto alias Anto yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Karo. Hasil supervisi: P-21 berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Karo melalui surat Nomor: B-2068/L.2.19/FT.1/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020.
253. Dugaan TPK pengadaan tanah untuk tempat pembuangan sampah atau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Desa Dokan Kecamatan Merek Kabupaten Karo Tahun 2016 sebesar Rp. 2.525.000.000 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karo atas nama tersangka Risdianto alias Anto yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Karo. Hasil supervisi: Limpah ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Perkara: 57/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tanggal register 10 Agustus 2020.
254. Dugaan TPK pembangunan Dermaga/Jetty/ Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 yang disidk oleh Polda NTB. Hasil Supervisi: Berkas perkara An. Tersangka ANWAR AZIZI, S.Si. Y., berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan Surat Pemberitahuan hasil penyidikan Perkara dari Kejati NTB Nomor: B-3082/N.2.5/Ft.1/12/2020 tanggal 10 Desember 2020.
255. Dugaan TPK pembangunan Dermaga/Jetty/ Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 yang disidk oleh Polda NTB. Hasil Supervisi: Berkas perkara An. Tersangka SUWANDI berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan Surat Pemberitahuan hasil penyidikan Perkara dari Kejati NTB Nomor: B-3083/N.2.5/Ft.1/12/2020 tanggal 10 Desember 2020.
256. Dugaan TPK pembangunan Dermaga/Jetty/ Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 yang disidk oleh Polda NTB. Hasil Supervisi: Berkas perkara An. Tersangka EDI SANDI A. RAHMAN. SE., berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan Surat Pemberitahuan hasil penyidikan Perkara dari Kejati NTB Nomor: B-3084/N.2.5/Ft.1/12/2020 tanggal 10 Desember 2020.
257. Dugaan TPK berupa penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada Kegiatan Pemberian Dana Hibah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Bengkalis yang dananya bersumber dari APBD Kab. Bengkalis Tahun Anggaran 2012 atas nama Tersangka YUDHI VERYANTORO. Hasil Supervisi: Limpah ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor Surat Pelimpahan: B - 3490 / L.4.13 / Ft.1 / 12 / 2019, tanggal pendaftaran 11 Desember 2020.
258. Dugaan TPK berupa penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada Kegiatan Pemberian Dana Hibah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Bengkalis yang dananya bersumber dari APBD Kab. Bengkalis Tahun Anggaran 2012 atas nama Tersangka YUDHI VERYANTORO. Hasil Supervisi: Perkara atas nama Tersangka YUDHI VERYANTORO telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 57/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr, tanggal 5 Maret 2020.
259. Dugaan TPK Belanja Upah Kerja/ Land Clearing atas Giat Pengembangan Perluasan Lahan Pertanian pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat TA 2013 atas nama Tersangka ANWAR RAROPI. Hasil Supervisi: Perkara atas nama Tersangka ANWAR RAROPI telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam, tanggal 30 Juli 2020.
260. Dugaan TPK Belanja Upah Kerja/ Land Clearing atas Giat Pengembangan Perluasan Lahan Pertanian pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat TA 2013 atas nama Tersangka SAINAL SAID. Hasil Supervisi: Perkara atas nama Tersangka SAINAL SAID telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar dalam tingkat banding Nomor: 33/PID.TPK /2020/PT.MKS, tanggal 10 November 2020.
261. TPK Penyelewengan Dana PNPM di UPK Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Tahun 2016/2017 atas nama terdakwa Siswianti, yang ditangani oleh Kejari Tegal. Hasil supervisi: telah diputus oleh PN Jateng berdasarkan Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/PN.Smg tanggal 1 Juli 2020 dan telah dilaksanakan putusan tersebut tanggal 24 Agustus 2020.
262. TPK Penyelewengan Dana PNPM di UPK Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Tahun 2016/2017 atas nama terdakwa Suhendrawan, yang ditangani oleh Kejari Tegal. Hasil supervisi: telah diputus oleh PN Jateng berdasarkan Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Smg tanggal 11 September 2020 dan telah dilaksanakan putusan tersebut tanggal 14 Desember 2020.

## V. PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENEGAK HUKUM

- Pelatihan Bersama Peningkatan Kemampuan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Wilayah Hukum Provinsi Aceh yang dilaksanakan pada tanggal 25-27 Agustus 2020 bertempat di Kota Banda Aceh dengan rincian sebagai berikut:
  - Jumlah peserta 50 orang yang terdiri atas:
    - 25 orang peserta dari Polda dan jajaran;
    - 25 orang peserta dari Kejati dan jajaran;
    - 4 orang peserta dari Perwakilan BPKP Provinsi Aceh; dan
    - 6 orang Hakim pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
  - Materi yang disampaikan:
    - Tindak Pidana Pencucian Uang dengan narasumber Bapak Robertus de Deo;
    - Pengelolaan Keuangan Daerah dengan narasumber Bapak Haryanto;
    - Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan narasumber Bapak Tjipto Prasetyo Nugroho.
- Pelatihan Bersama Peningkatan Kemampuan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Wilayah Hukum Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan pada tanggal 11-13 Agustus 2020 bertempat di Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:
  - Jumlah peserta 50 orang yang terdiri atas:
    - 11 orang peserta dari Polda dan jajaran;

- b) 19 orang peserta dari Kejati dan jajaran;
- c) 8 orang peserta dari BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- d) 8 orang peserta dari Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau; dan
- e) 4 orang Hakim dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang.
- ii. Materi yang disampaikan:
  - a) Tindak Pidana Pencucian Uang dengan narasumber Ibu Titik Utami dan Bapak Robertus de Deo;
  - b) Pengelolaan Keuangan Daerah dengan narasumber Bapak Haryanto;
  - c) Korupsi dalam Sektor Sumber Daya Alam dengan narasumber Bapak Ahmad Redi; dan
  - d) Titik Rawan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan narasumber Bapak Fahrurrazi.
- 3. Pelatihan Bersama Peningkatan Kemampuan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi wilayah Hukum Provinsi Papua Barat yang dilaksanakan pada 22-24 September 2020 bertempat di Kota Manokwari dengan rincian sebagai berikut:
  - i. Pelaksanaan kegiatan pelatihan diikuti dan dihadiri oleh 50 peserta dengan rincian:
    - a) Hakim pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebanyak 4 peserta;
    - b) Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan jajarannya sebanyak 12 peserta;
    - c) Penyidik pada Kepolisian Daerah Papua Barat dan jajarannya sebanyak 25 peserta;
    - d) Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat sebanyak 5 peserta;
    - e) Auditor pada BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat sebanyak 4 peserta.
  - ii. Materi dan Narasumber pada kegiatan Pelatihan diantaranya:
    - a) Keuangan Daerah oleh narasumber Bapak Nasrun dan Bapak Jimmy Revido dari Kementerian Dalam Negeri,
    - b) Tindak Pidana Pencucian Uang Tahap Penyidikan oleh narasumber Bapak Robertus De Deo dari Bareskrim Polri,
    - c) TPPU Tahap Penuntutan oleh narasumber Bapak Yudi Kristiana dari Kejaksaan;
    - d) Pengadaan barang dan jasa oleh narasumber Bapak Fahrurrazi dari LKPP, dan
    - e) Potensi Penyimpangan Pengadaan barang dan jasa pada masa darurat Covid-19 oleh Bapak Agus Setiyawan dari BPKP
- 4. Pelatihan Bersama Peningkatan Kemampuan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Wilayah Hukum Provinsi Jambi yang dilaksanakan pada tanggal 29 September s.d. 01 Oktober 2020 bertempat di Kota Jambi dengan rincian sebagai berikut:
  - i. Jumlah peserta 40 orang yang terdiri atas:
    - a) Penyidik pada Kepolisian Daerah Jambi dan jajarannya sebanyak 15 (lima belas) peserta;
    - b) Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Jambi dan jajarannya sebanyak 15 (lima belas) peserta;
    - c) Auditor pada Perwakilan BPK Provinsi Jambi sebanyak 5 (lima) peserta;
    - d) Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi sebanyak 5 (lima) peserta.
  - ii. Materi yang disampaikan:
    - a) Keuangan Daerah, yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haryanto, CA.;
    - b) Tindak Pidana Pencucian Uang, yang disampaikan oleh Bapak Robert de Deo;
    - c) Pengadaan Barang dan Jasa dalam Keadaan Darurat, yang disampaikan oleh Bapak Dr. H. Fahrurrazi, M.Si.
  - 5. Pelatihan Bersama Peningkatan Kemampuan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi wilayah hukum Provinsi Bali pada tanggal 7 – 9 September 2020 bertempat di Kota Bali dengan rincian sebagai berikut:
    - iii. Pelaksanaan kegiatan pelatihan diikuti dan dihadiri oleh 50 peserta dengan rincian:
      - d) Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Bali dan jajarannya sebanyak 20 peserta;
      - e) Penyidik pada Kepolisian Daerah Bali dan jajarannya sebanyak 20 peserta;
      - f) Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali sebanyak 5 peserta;
      - g) Auditor pada BPK Perwakilan Provinsi Bali sebanyak 5 peserta.
    - iv. Materi yang disampaikan:
      - a) Tindak Pidana Pencucian Uang dengan narasumber Bapak Robertus de Deo dan Titik Utami.
      - b) Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dengan narasumber Ibu Najmatuzzahrah.
      - c) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam keadaan darurat dengan narasumber Bapak Ronny Dwi Susanto.
      - d) teknik pembuktian suap lampau dengan narasumber Ariawan Agustiartono.
  - 6. Pelatihan Bersama Peningkatan Kemampuan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi wilayah hukum Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 20 – 22 September 2020 bertempat di Hotel d'Maleo Mamuju, Sulawesi Barat dengan rincian sebagai berikut:
    - i. Pelaksanaan kegiatan pelatihan diikuti dan dihadiri oleh 44 peserta dengan rincian:
      - a) Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar dan jajarannya sebanyak 5 peserta
      - b) Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dan jajarannya sebanyak 13 peserta;
      - c) Penyidik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dan jajarannya sebanyak 20 peserta;
      - d) Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 5 peserta;
      - e) Auditor pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 1 peserta.

- ii. Materi yang disampaikan:
    - a) Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Narasumber Bapak DR. Yudi Kristiana dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur;
    - b) Praktik Penelusuran Aset (Asset Tracing) oleh Narasumber Bapak Mungki Hadipratikto dari Unit Labuksi KPK;
    - c) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh Narasumber Bapak Fahrurrazi dari Pemerintah Kota Sukabumi;
    - d) Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Narasumber Bapak Haryanto dari Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
  - 7. Pelatihan Bersama Peningkatan Kemampuan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Wilayah Hukum Provinsi Kalimantan Utara yang dilaksanakan pada tanggal 10-12 November 2020 bertempat di Kota Tarakan dengan rincian sebagai berikut:
    - i. Jumlah peserta 40 orang yang terdiri atas:
      - a) 14 orang peserta dari Polda dan jajaran;
      - b) 14 orang peserta dari Kejati dan jajaran;
      - c) 4 orang peserta dari BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
      - d) 4 orang peserta dari Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara;
      - e) 2 orang Hakim dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda; dan
      - f) 2 orang Hakim dari Pengadilan Negeri Tarakan.
    - ii. Materi yang disampaikan:
      - a) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dengan narasumber Bapak Sarjita;
      - b) Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan narasumber Bapak Supardi;
      - c) Tindak Pidana Pencucian Uang dengan narasumber Bapak Robertus de Deo; dan
      - d) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Keadaan Darurat dengan narasumber Bapak Fahrurrazi.
- VI. KEGIATAN KOLABORASI**
- 1. Kegiatan Kolaborasi Satgas Penindakan dan Satgas Pencegahan Korwil V terkait penyelesaian aset daerah yang bermasalah di wilayah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 24 Juni 2020.
  - 2. Kegiatan Kolaborasi Kesepakatan Pemanfaatan Aset antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kota Palembang, Pemerintah Kota Prabumulih dan Kabupaten Banyuasin dengan PT Pertamina (Persero) terkait penertiban aset Lapangan Golf Kenten.
  - 3. Kegiatan Kolaborasi Satgas Penindakan dan Satgas Pencegahan Korwil V terkait penyelesaian aset daerah yang bermasalah di wilayah Provinsi Bengkulu serta launching aplikasi e-Ngadu pada tanggal 7 Juli.
  - 4. Telah dilaksanakan kegiatan kolaborasi

- Pencegahan dan Penindakan oleh Koordinasi Wilayah VII di wilayah hukum Jawa Tengah pada tanggal 13 Juli 2020.
- 5. Koordinasi terkait penertiban pemulihan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Pemerintah Kota Medan dalam rangka koordinasi pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.
 

Kegiatan: Rapat Koordinasi Sekretaris Daerah Kota Medan, Inspektur Daerah Kota Medan, Kepala Dinas Perkimtaru Kota Medan, Kepala BPPRD Kota Medan, Kejari Kota Medan, Kasi Datun dan Pidsus Kota Medan, Satgas Bidang Pencegahan Unit Koordinasi Wilayah I dan perwakilan Satgas Bidang Penindakan Unit Koordinasi Wilayah I melalui rapat daring pada aplikasi Zoom pada tanggal 3 Juni 2020.
- 6. Kegiatan Kolaborasi Kesepakatan Pemanfaatan Aset antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kota Palembang, Kabupaten Barito Timur dengan PT Pertamina (Persero) terkait penertiban aset berupa jalan yang terletak di Desa Bentot Kec. Petangkep Tutui sampai dengan Desa Telang Baru Kec. Paju Epat, Kab. Barito Timur dan landing site yang terletak di Sungai Patai Telang Baru, Kab. Barito Timur.
- 7. Koordinasi terkait penanganan aset pemerintah provinsi DKI Jakarta di PAM JAYA.
 

Kegiatan: Rapat Koordinasi bersama Jajaran Direksi dan Badan Pengawasan PAM JAYA terkait penanganan aset pemerintah pada Pemprov DKI Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2020.
- 8. Kegiatan Kolaborasi berupa Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi terkait Pelaksanaan SKK (Surat Kuasa Khusus) Penanganan Pengamanan Aset Antara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan jajaran dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 19 November 2020 di Aula Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.
- 9. Kegiatan pendampingan audiensi yang dilaksanakan oleh Pimpinan KPK di wilayah Sumatera Barat.
 

Kegiatan: melakukan pendampingan audiensi Pimpinan KPK bersama Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah wilayah Sumatera Barat beserta jajaran terkait peningkatan integritas nasional. Audiensi dilaksanakan pada tanggal 24 November 2020 bertempat di Aula Mapolda Sumatera Barat.
- 10. Kegiatan kolaborasi untuk penyelesaian kredit bermasalah, klaim Asuransi bermasalah dan notaris yang bermasalah, kegiatan penguatan APIP dan APH serta koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terkait PKKN yang diminta oleh APH di Provinsi Sumatera Utara.
 

Kegiatan: Rapat Koordinasi serta pengumpulan data dan informasi di Polda Sumut, Kejati Sumut, Inspektorat di Provinsi Sumut, Bank Sumut, Pemprov. Sumut dan BPKP Perwakilan Provinsi Sumut bersama dengan Satgas



- Bidang Pencegahan Unit Koordinasi Wilayah I dan perwakilan Satgas Bidang Penindakan Unit Koordinasi Wilayah I pada tanggal 30 November – 4 Desember 2020.
11. Kegiatan penandatanganan PKS antara Pemprov Sumatera Selatan dengan PT Pertamina Persero, MOU Penyelenggaraan Piala Dunia antara Pemprov Sumatera Selatan dengan PT Angkasa Pura 2, Penyerahan Sertifikat kepada Bupati/Walikota dan PT PLN Persero oleh Kanwil BPN Sumatera Selatan tanggal 03 Desember 2020 di Pendopo Griya Agung Sumatera Selatan.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejati Aceh Nomor: R/343/KOR.03/20-25/02/2020 tanggal 14 Februari 2020.
  12. Kegiatan penyerahan aset fasum dan fasos dari pengembang di wilayah Palembang kepada Pemerintah Kota Palembang tanggal 04 Desember 2020 di Kantor Walikota Palembang.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejati Aceh Nomor: R/343/KOR.03/20-25/02/2020 tanggal 14 Februari 2020.
  13. Kegiatan Penyerahan Sertifikat dari Kanwil BPN Sulawesi Tengah kepada PT PLN Persero Wilayah Sulawesi Tengah dan beberapa aset daerah milik Pemprov Sulawesi Tengah dan jajarannya tanggal 07 Desember 2020 di Kantor BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejati Sumut Nomor: R/346/KOR.03/20-25/02/2020 tanggal 14 Februari 2020.
  14. Kegiatan koordinasi tindak lanjut penyelesaian aset konflik antara Pemda di Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 08 Desember 2020 di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejati Sumut Nomor: R/346/KOR.03/20-25/02/2020 tanggal 14 Februari 2020.
  15. Kegiatan tindak lanjut progress SKK antara Pemda se-Sulawesi Tengah dengan jajarannya Datun Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 08 Desember 2020 di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejati Sumbang Nomor: R/342/KOR.03/20-25/02/2020 tanggal 14 Februari 2020.
  16. Kegiatan koordinasi dengan Kajari Banggai dan jajarannya perihal progress SKK antara Pemerintah Kabupaten Banggai dengan Kejari Banggai dimana dalam SKK tersebut lebih banyak terkait dengan piutang pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak kepada Pemkab Banggai tanggal 10 Desember di Kejaksaan Negeri Banggai.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejati Sumbang Nomor: R/342/KOR.03/20-25/02/2020 tanggal 14 Februari 2020.
  17. Kegiatan penertiban dan optimalisasi aset atau barang milik negara khususnya pada Kementerian Sekretariat Negara (PT GBK dan PT Kemayoran), PT PLN Persero dan PT Pertamina Persero tanggal 14 Desember 2020 di Gedung Merah Putih KPK RI.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejati Bengkulu Nomor: R/334/KOR.03/20-25/02/2020 tanggal 14 Februari 2020.
  18. Laporan kegiatan kolaborasi yang dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan D.I. Yogyakarta terkait penguatan APH – APIP, pengelolaan barang milik negara/ daerah, dan tindak lanjut pengaduan masyarakat periode tahun 2020.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejati Bengkulu Nomor: R/341/KOR.03/20-25/02/2020 tanggal 14 Februari 2020.
- VII. MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI SPDP ONLINE
1. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kepolisian Daerah Aceh dan jajarannya.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Polda Aceh Nomor: R/340/KOR.03/20-25/02/2020 tanggal 14 Februari 2020.
  2. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kejaksaan Tinggi Aceh dan jajarannya.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejati Aceh Nomor: R/338/KOR.03/20-25/02/2020 tanggal 14 Februari 2020.
  3. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan jajarannya.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejati Sumut Nomor: R/335/KOR.03/20-25/02/2020 tanggal 14 Februari 2020.
  4. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan jajarannya.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejati Sumut Nomor: R/346/KOR.03/20-25/02/2020 tanggal 14 Februari 2020.
  5. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan jajarannya.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejati Sumbang Nomor: R/336/KOR.03/20-25/02/2020 tanggal 14 Februari 2020.
  6. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan jajarannya.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejati Sumbang Nomor: R/342/KOR.03/20-25/02/2020 tanggal 14 Februari 2020.
  7. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kepolisian Daerah Bengkulu dan jajarannya.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Polda Bengkulu Nomor: R/334/KOR.03/20-25/02/2020 tanggal 14 Februari 2020.
  8. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan jajarannya.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejati Bengkulu Nomor: R/341/KOR.03/20-25/02/2020 tanggal 14 Februari 2020.
  9. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung dan jajarannya.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Polda Babel Nomor: R/339/KOR.03/20-25/02/2020 tanggal 14 Februari 2020.
  10. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kejaksaan Tinggi Kep. Bangka Belitung dan jajarannya.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejati Aceh Nomor: R/338/KOR.03/20-25/02/2020 tanggal 14 Februari 2020.
  11. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan jajarannya.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejati Jawa Timur Nomor: R/357/KOR.03/20-25/02/2020 tanggal 17 Februari 2020.
  12. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Polda Jawa Timur dan jajarannya.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Polda Jawa Timur Nomor: R/358/KOR.03/20-25/02/2020 tanggal 17 Februari 2020.
  13. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kajati NTT dan jajarannya.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejati NTT Nomor: R/375/KOR.03/20-25/02/2020 tanggal 19 Februari 2020.
  14. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kapolda NTT dan jajarannya.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Polda NTT Nomor: R/376/KOR.03/20-25/02/2020 tanggal 19 Februari 2020.
  15. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kejati Bali dan jajarannya.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejati Bali Nomor: R/378/KOR.03/20-25/02/2020 tanggal 19 Februari 2020.
  16. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Polda Bali dan jajarannya.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Polda Bali Nomor: R/377/KOR.03/20-25/02/2020 tanggal 19 Februari 2020.
  17. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP online di Polda Jateng dan jajarannya.  
Kegiatan: Pendampingan penginputan dan perkembangan penanganan perkara TPK pada data SPDP online pada tanggal 12 Maret 2020.
  18. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP online di Kejati Jateng dan jajarannya.  
Kegiatan: Pendampingan penginputan dan perkembangan penanganan perkara TPK pada data SPDP online pada tanggal 11 Maret 2020.
  19. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Polda DIY dan jajarannya.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Polda DIY Nomor: R/741/KOR.03/20-25/04/2020 tanggal 22 April 2020.
  20. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kejati DIY dan jajarannya.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejati DIY Nomor: R/740/KOR.03/20-25/04/2020 tanggal 22 April 2020.
  21. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP online pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan jajarannya.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP online berdasarkan surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor: R/738/KOR.03/20-25/04/2020 tanggal 22 April 2020.
  22. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP online pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dan jajarannya.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP online berdasarkan surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor: R/739/KOR.03/20-25/04/2020 tanggal 22 April 2020.
  23. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP online pada Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dan jajarannya.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP online berdasarkan surat kepada Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor: R/742/KOR.03/20-25/04/2020 tanggal 22 April 2020.
  24. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kepolisian Daerah Gorontalo dan jajarannya.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Polda Gorontalo Nomor: R/913/KOR.03/20-25/05/2020 tanggal 26 Mei 2020.
  25. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan jajarannya.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejati Gorontalo Nomor: R/914/KOR.03/20-25/05/2020 tanggal 26 Mei 2020.
  26. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kepolisian Daerah Maluku Utara dan jajarannya.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejati Gorontalo Nomor: R/914/KOR.03/20-25/05/2020 tanggal 26 Mei 2020.
  27. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan jajarannya.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejati Maluku Nomor: R/911/KOR.03/20-25/05/2020 tanggal 26 Mei 2020.
  28. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kepolisian Daerah Kalimantan Utara dan jajarannya.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejati Maluku Nomor: R/912/KOR.03/20-25/05/2020 tanggal 26 Mei 2020.
  29. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara dan jajarannya.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Polda Kalimantan Utara Nomor: R/910/KOR.03/20-25/05/2020 tanggal 26 Mei 2020.
  30. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP online pada Kejaksaan Tinggi Riau dan jajarannya.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP online

- berdasarkan surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Nomor: R/916/KOR.03/20-25/05/2020 tanggal 26 Mei 2020.
31. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP online pada Kejaksaan Tinggi Maluku dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP online berdasarkan surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Nomor: R/933/KOR.03/20-25/05/2020 tanggal 27 Mei 2020.
32. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP online pada Kepolisian Daerah Maluku dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP online berdasarkan surat kepada Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor: R/932/KOR.03/20-25/05/2020 tanggal 27 Mei 2020.
33. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP online pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP online berdasarkan surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: R/929/KOR.03/20-25/05/2020 tanggal 27 Mei 2020.
34. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP online pada Kejaksaan Tinggi Jambi dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP online berdasarkan surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor: R/931/KOR.03/20-25/05/2020 tanggal 27 Mei 2020.
35. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP online pada Kepolisian Daerah Jambi dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP online berdasarkan surat kepada Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: R/930/KOR.03/20-25/05/2020 tanggal 27 Mei 2020.
36. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kepolisian Daerah Banten dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kepolisian Daerah Banten Nomor: R/1030/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 09 Juni 2020.
37. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kejaksaan Tinggi Banten dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejaksaan Tinggi Banten Nomor: R/1031/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 09 Juni 2020.
38. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Nomor: R/1032/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 09 Juni 2020.
39. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor: R/1033/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 09 Juni 2020.
40. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: R/1034/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 09 Juni 2020.
41. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor: R/1033/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 09 Juni 2020.
42. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Nomor: R/1029/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 09 Juni 2020.
43. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kepolisian Daerah Sulut dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Polda Sulut Nomor: R/1072/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 11 Juni 2020.
44. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kejati Sulut dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejati Sulut Nomor: R/1073/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 11 Juni 2020.
45. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kepolisian Daerah Metro Jaya dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Polda Metro Jaya Nomor: R/1129/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 23 Juni 2020.
46. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kejati DKI Jakarta dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejati DKI Jakarta Nomor: R/1128/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 23 Juni 2020.
47. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kepolisian Daerah NTB dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Polda NTB Nomor: R/1130/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 23 Juni 2020.
48. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kejati NTB dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejati NTB Nomor: R/1131/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 23 Juni 2020.
49. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Polda Kepulauan Riau Nomor: R/977/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 02 Juni 2020.
50. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejati Kepulauan Riau Nomor: R/979/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 02 Juni 2020.
51. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kepolisian Daerah Lampung dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Polda Lampung Nomor: R/969/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 02 Juni 2020.
52. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kejaksaan Tinggi Lampung dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejati Lampung Nomor: R/968/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 02 Juni 2020.
53. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Polda Kalimantan Timur Nomor: R/980/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 02 Juni 2020.
54. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejati Kalimantan Timur Nomor: R/967/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 02 Juni 2020.
55. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejati Bengkulu Nomor: R/1175/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 29 Juni 2020.
56. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi sistem SPDP Online Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tanggal 24 Juni 2020.
57. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi sistem SPDP Online Kepolisian Daerah Jawa Barat tanggal 23 Juni 2020.
58. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP online pada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP online berdasarkan surat kepada Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: R/1069/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 11 Juni 2020.
59. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP online pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP online berdasarkan surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor: R/1070/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 11 Juni 2020.
60. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP online pada Kepolisian Daerah Bali dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP online berdasarkan surat kepada Kepala Kepolisian Daerah Bali Nomor: R/1071/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 11 Juni 2020.
61. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP online pada Kejaksaan Tinggi Bali dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP online berdasarkan surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor: R/1074/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 11 Juni 2020.
62. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP online pada Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP online berdasarkan surat kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: R/1112/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 18 Juni 2020.
63. Laporan kegiatan Monitoring dan Evaluasi implementasi SPDP Online Polda Sulawesi Selatan.
64. Laporan kegiatan Monitoring dan Evaluasi implementasi SPDP Online Kejati Sulawesi Selatan.
65. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kepolisian Daerah Papua dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Polda Papua Nomor: R/1145/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 25 Juni 2020.
66. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kejaksaan Tinggi Papua dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejati Papua Nomor: R/1147/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 25 Juni 2020.
67. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu pada tanggal 7 Juli 2020 terkait kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi SPDP Online serta memberikan alternatif solusi yang terhadap kendala tersebut.
68. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kepolisian Daerah Banten dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kepolisian Daerah Banten Nomor: R/2399/KOR.03/20-25/11/2020 tanggal 23 November 2020.
69. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kejaksaan Tinggi Banten dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejaksaan Tinggi Banten Nomor: R/2400/KOR.03/20-25/11/2020 tanggal 23 November 2020.

70. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: R/2398/KOR.03/20-25/11/2020 tanggal 23 November 2020.
71. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor: R/2397/KOR.03/20-25/11/2020 tanggal 23 November 2020.
72. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 19 November 2020.
73. Kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan SPDP online oleh Polda Sulawesi Tenggara dan jajarannya pada 17 November 2020.
74. Kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan SPDP online oleh Kejati Sulawesi Tenggara dan jajarannya pada 18 November 2020.
75. Kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan SPDP online oleh Polda Maluku dan jajarannya pada 25 November 2020.
76. Kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan SPDP online oleh Kejati Maluku dan jajarannya pada 26 November 2020.
77. Kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan SPDP online oleh Polda Jawa Tengah dan jajarannya pada 30 November 2020.
78. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan jajaran.  
Kegiatan: Dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kejati Sumatera Barat dan jajaran tanggal 25 November 2020.
79. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan jajaran.  
Kegiatan: Dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Polda Sumatera Barat dan jajaran tanggal 25 November 2020.
80. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Polda Sumatera Utara Nomor: R/2426/KOR.03/20-25/11/2020 tanggal 25 November 2020.
81. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejati Sumatera Utara Nomor: R/2425/KOR.03/20-25/11/2020 tanggal 25 November 2020.
82. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejati Kalimantan Timur Nomor: R/2585/KOR.03/20-25/12/2020 tanggal 15 Desember 2020.
83. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejati Gorontalo Nomor: R/2639/KOR.03/20-25/12/2020 tanggal 21 Desember 2020.
84. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kepolisian Daerah Maluku Utara dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Polda Maluku Nomor: R/2637/KOR.03/20-25/12/2020 tanggal 21 Desember 2020.
85. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejati Maluku Utara Nomor: R/2638/KOR.03/20-25/12/2020 tanggal 21 Desember 2020.
86. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Nomor: R/2760/KOR.03/20-25/12/2020 tanggal 30 Desember 2020.
87. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor: R/2761/KOR.03/20-25/12/2020 tanggal 30 Desember 2020.
88. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Nomor: R/2762/KOR.03/20-25/12/2020 tanggal 30 Desember 2020.
89. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kepolisian Daerah Sulut dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Polda Sulut Nomor: R/1072/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 22 Desember 2020.
90. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kejati Sulut dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejati Sulut Nomor: R/1073/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 22 Desember 2020.
91. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kepolisian Daerah Metro Jaya dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Polda Metro Jaya Nomor: R/1129/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 22 Desember 2020.
92. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kejati DKI Jakarta dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejati DKI Jakarta Nomor: R/1128/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 22 Desember 2020.
93. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kepolisian Daerah NTB dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Polda NTB Nomor: R/1130/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 22 Desember 2020.
94. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kejati NTB dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejati NTB Nomor: R/1131/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 22 Desember 2020.
95. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kepolisian Daerah Aceh dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Polda Aceh Nomor: R/1130/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 22 Desember 2020.
96. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kejati Aceh dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejati Aceh Nomor: R/1131/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 22 Desember 2020.
97. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Polda Kepulauan Riau Nomor: R/2724/KOR.03/20-25/12/2020 tanggal 23 Desember 2020.
98. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejati Kepulauan Riau Nomor: R/2721/KOR.03/20-25/12/2020 tanggal 23 Desember 2020.
99. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kepolisian Daerah Lampung dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Polda Lampung Nomor: R/2723/KOR.03/20-25/12/2020 tanggal 23 Desember 2020.
100. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kejaksaan Tinggi Lampung dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejati Lampung Nomor: R/2720/KOR.03/20-25/12/2020 tanggal 23 Desember 2020.
101. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Polda Kalimantan Timur Nomor: R/2722/KOR.03/20-25/12/2020 tanggal 23 Desember 2020.
102. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejati Kalimantan Timur Nomor: R/2718/KOR.03/20-25/12/2020 tanggal 23 Desember 2020.
103. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Polda Nusa Tenggara Timur Nomor: R/2725/KOR.03/20-25/12/2020 tanggal 23 Desember 2020.
104. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejati Nusa Tenggara Timur Nomor: R/2719/KOR.03/20-25/12/2020 tanggal 23 Desember 2020.
105. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejati Bengkulu Nomor: R-2512/KOR.03/20-25/12/2020 tanggal 8 Desember 2020.
106. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejati Jawa Barat Nomor: R-2594/KOR.03/20-25/12/2020 tanggal 15 Desember 2020.
107. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Polda Jawa Barat dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Polda Jawa Barat Nomor: R-2597/KOR.03/20-25/12/2020 tanggal 15 Desember 2020.
108. Kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi sistem SPDP Online pada Kepolisian Daerah Riau tanggal 15 Desember 2020.
109. Kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi sistem SPDP Online pada Kejaksaan Tinggi Riau tanggal 22 Desember 2020.
110. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP online pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan

- Barat dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP online berdasarkan surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor: R/2576/KOR.03/20-25/12/2020 tanggal 15 Desember 2020.
111. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP online pada Kepolisian Daerah Papua Barat dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP online berdasarkan surat kepada Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor: R/2579/KOR.03/20-25/12/2020 tanggal 15 Desember 2020.
112. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP online pada Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP online berdasarkan surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Nomor: R/2580/KOR.03/20-25/12/2020 tanggal 15 Desember 2020.
113. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP online pada Kepolisian Daerah Jawa Timur dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP online berdasarkan surat kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: R/2578/KOR.03/20-25/12/2020 tanggal 15 Desember 2020.
114. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP online pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP online berdasarkan surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: R/2577/KOR.03/20-25/12/2020 tanggal 15 Desember 2020.
115. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi penggunaan SPDP online oleh Kejati Jawa Tengah dan jajarannya pada 01 Desember 2020.
116. Laporan kegiatan Monitoring dan Evaluasi implementasi SPDP Online Polda Kepulauan Bangka Belitung.
117. Laporan kegiatan Monitoring dan Evaluasi implementasi SPDP Online Kejati Kepulauan Bangka Belitung.
118. Laporan kegiatan Monitoring dan Evaluasi implementasi SPDP Online Polda Kalimantan Selatan.
119. Laporan kegiatan Monitoring dan Evaluasi implementasi SPDP Online Kejati Kalimantan Selatan.
120. Laporan kegiatan Monitoring dan Evaluasi implementasi SPDP Online Polda D.I. Yogyakarta.
121. Laporan kegiatan Monitoring dan Evaluasi implementasi SPDP Online Kejati D.I. Yogyakarta.
122. Laporan kegiatan Monitoring dan Evaluasi implementasi SPDP Online Polda Sulawesi Selatan.
123. Laporan kegiatan Monitoring dan Evaluasi implementasi SPDP Online Kejati Sulawesi Selatan.
124. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kepolisian Daerah Papua dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Polda Papua Nomor: R/2589/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 15 Desember 2020.
125. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kejaksaan Tinggi Papua dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejati Papua Nomor: R/2588/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 15 Desember 2020.
126. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kepolisian Daerah Bali dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Polda Bali Nomor: R/2587/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 15 Desember 2020.
127. Kegiatan monitoring dan evaluasi sistem SPDP Online pada Kejaksaan Tinggi Bali dan jajaran.  
Kegiatan: Koordinasi evaluasi SPDP Online berdasarkan surat ke Kejati Bali Nomor: R/2586/KOR.03/20-25/06/2020 tanggal 15 Desember 2020.